

**MEDIA DAN ISLAM POLITIK
ANALISIS ISI PEMBERITAAN KOMPAS DAN REPUBLIKA**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM (SHI)**

OLEH :

**BUDI AYANI
09370018**

PEMBIMBING :

NOORHAIDI HASAN, MA, M. Phil., Ph.D

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Islam politik merupakan gejala sosial politik aktivis sekelompok individu melakukan gerakan berdasarkan ideologi yang diyakininya, meliputi pemikiran dan aksi yang mengantikan istilah fundamentalisme, radikalisme, revivalisme, dan reformisme Islam. Awal muncul gerakan ini sebagai jawaban atas ketidakpuasan pada kondisi sosial-politik yang dialami sejumlah individu kelompok masyarakat Islam. Akhir-akhir ini, gerakan mereka semakin eksklusif dan mengeras, kemudian melakukan tindak-tanduk radikal seperti teror dan penyerangan berdasarkan ideologi yang diyakininya. Di Indonesia, gerakan ini berkembang pesat setelah jatuhnya kekuasaan Orde Baru. Di mana kran demokrasi terbuka lebar serta gagalnya pemerintahan transisi dalam menjembatani tuntutan aspirasi mereka, mempercepat perkembangan gerak ini. Akhirnya, Indonesia juga disibukan dengan penanganan gerakan tersebut.

Namun dalam sorotan media massa, wacana ini sudah ditentukan oleh hubungan antara media, wacana Islam politik, serta audiensnya yang ditentukan oleh relasi-relasi sebaliknya seperti; kebijakan redaksional media, ideologi, ekonomi, kekuasaan, kebudayaan serta *framing*. Ini dilakukan agar pembaca/audiens disesuaikan dengan orientasi yang diinginkan oleh sesuatu yang berada dibalik pemberitaan media tersebut. Setidaknya pembaca/audiens sesuai dengan semangat yang ada dibalik wacana Islam politik ini. Oleh karena itu, wacana Islam politik di media mampu melahirkan varian pandangan umat Islam –menjadi radikal, fobia, dan moderat-atas wacana Islam politik ini.

Penelitian ini berusaha untuk menjawab bagaimana wacana Islam politik dihadirkan di media massa sehingga mampu mempengaruhi pandangan audiens terhadap wacana itu. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) yang berbentuk deskriptif-analitik. Data primer penelitian ini berupa koran dan buku-buku yang terkait serta hasil wawancara dengan sejumlah informans. Penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan dan menjelaskan secara komprehensif kemudian ditambah dengan penjelasan sejumlah informas di dalamnya dengan tujuan menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan didalamnya yaitu politik media.

Peneliti menemukan bahwa wacana Islam politik menjadi perbincangan masyarakat, termasuk juga media massa- sebagai reaktif terhadap kondisi dan situasi sosial-politik masyarakat muslim saat ini yang tidak memihak kepada sekelompok individu umat muslim. Kehadiran media dalam wacana ini, memiliki posisi strategis, kemudian dimanfaatkan oleh relasi kekuasaan di belakangnya. Lewat analisis isi terhadap sejumlah pemberitaan kasus wacana Islam politik di media, ditemukan bahwa kedua media nasional ini (harian Republika dan harian *Kompas*) sama-sama mempengaruhi pembaca. Bedanya, harian Republika selalu membungkus wacana Islam politik kedalam dinamika keislaman. Sedangkan harian *Kompas* mbingkai wacana ini kedalam dinamika ke-Indonesia-an dalam kerangka kebinekaan dan kesatuan bangsa. Letak persamaanya, kedua media ini sama-sama menekankan arti penting peran pemerintah dalam penanganan kasus Islam politik di Indonesia.

Signifikansi penelitian ini dapat menjadi bahan kritis untuk pembaca dalam menerima atau membaca wacana Islam politik di media massa. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai penambah bahan analisis terhadap wacana Islam politik saat ini.

Kata kunci: media, Islam politik, analisis isi, dan *framing*.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budi Ayani
NIM : 09370018
Jurusan : Jinayah Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 September 2013
Yang Menyatakan



Budi Ayani
Nim: 09370018



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Budi ayani
Nim : 09370018
Judul skripsi : Media dan Islam Politik : Analisis Isi Pemberitaan
Republika dan *Kompas*

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untk memperoleh gear sarjana strata dalam ilmu hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudar tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alikum wr. Wb.

Yogyakarta, 19 September 2013
Pembimbing

Noorhaidi Hasan, MA, M. Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH



Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 YOGYAKARTA 55281

PENGESAGAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/206/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : Media dan Islam Politik Analisis Isi Pemberitaan *Kompas*
Dan *Republika*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Budi Ayani
NIM : 09370018
Telah dimunaqosyahkan pada : 20 September 2013
Dengan nilai : 90 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH

Penguji I/Ketua Sidang,

Noorhaidi, S.Ag, MA, M.Phil., Ph.D
NIP.19711207 199503 1 002

Penguji II

DR. H. Kamsi, M.A
NIP.19570207 198703 1 003

Penguji III

Subaidi, S.Ag., M.Si.
NIP.19750517 200501 1 004

Yogyakarta, 20 September 2013



Noorhaidi, S.Ag, MA, M.Phil., Ph.D
NIP.19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan 0543b/U/1987. Berikut akan dijelaskan secara umum.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah
ع	'Ain	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof

ي	Yā	Y	Ye
---	----	---	----

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متَعَدِّينَ	ditulis	muta‘aqqidīn
عِدَّة	ditulis	‘iddah

C. Tā' marbutah di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	Hibah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	ni'matullāh
زكاة الفطر	ditulis	zakātul-fitri

D. Vokal Pendek

---	Fathah	ditulis	A
ضَرَبَ		ditulis	daraba
---	Kasrah	ditulis	i
فَهِمَ		ditulis	fahima
---	Dammah	ditulis	u

كُتِبَ		ditulis	kutiba
--------	--	---------	--------

E. Vokal Panjang:

1	fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Â Jāhiliyyah
2	fathah + alifmaqṣūr يسعي	Ditulis Ditulis	Ā yas'ā
3	kasrah + yamati مجيد	Ditulis Ditulis	Ī Majīd
4	dammah + waumati فروض	Ditulis Ditulis	Ū Furūd

F. Vokal Rangkap:

1	fathah + yā mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
2	fathah + wau mati قول	Ditulis Ditulis	Au Qaul

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الانتم	Ditulis	a'antum
اعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	Ditulis	Asy-Syams
السماء	Ditulis	As-Samā'

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	ditulis	Zawi al-Furūd
اهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

MOTTO

*Membebaskan diri dari tendensi jadi robot, membesaskan diri
dari ketakutan kepada kata-kata yang berarti, dan membaskan
diri dari proses kehilangan arti*

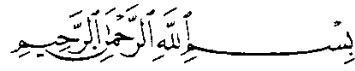
(Goenawan Mohamad, Caping III, hlm. 185)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada pembaca yang membutuhkan dan menghargai



KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan taufik-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, meskipun dalam prosesnya menemui hambatan dan rintangan. Penulis juga menyadari, skripsi ini tetap jauh dari kata sempurna, karena masih banyak kekurangan dan kesalahan di dalamnya, tetapi itu murni kesalahan penulis. Shalawat dan salam semoga tercurahkan atas Rasulullah SAW, sahabat, dan para pengikutnya yang telah menebarkan kesempurnaan akhlak pada umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi yang berjudul **Media dan Islam Politik; Analisis Isi Pemberitaan Republika dan Kompas** ini telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu penulis perlu berterimakasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik yang bersifat moril maupun materil. Maka, pada kesempatan inilah penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta stafnya.
3. Ketua Jurusan Jinayah Siyasah beserta stafnya.

4. Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag yang menjadi penasehat akademik, ia adalah “orang tua” bagi penulis di jurusan Jinayah Siyasah.
5. Noorhaidi Hasan, MA, M. Phil., Ph.D yang membimbing penulis dalam menganalisis apa yang ada di balik pemberitaan harian Republika dan harian *Kompas* tentang pemberitaan Islam politik di media.
6. Begitu juga terhadap seluruh staf pengajar di jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum. Terimakasih atas semuanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir di UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada kedua orang saya, *umak* dan *Ayah* yang tidak henti-hentinya mengakui kami sebagai anaknya. Rasanya tidak cukup karya ini untuk membalas jasa-jasa dalam menjawab harapannya.
8. Kepada *mamak-mamak ambo, etek-etek ambo, dunsanak ambo (uda, uni, dan adiak-adiak) sadonyo*.
9. Kepada *Uda, Uni,* dan *dunsanak urang sakaum* Surau Tuo Yogyakarta *tampek batuka carito* tentang kehidupan bagi penulis dengan dinamika kalian masing-masing.
10. Seluruh guru mengajari saya.
11. Teman-teman jurusan Jinayah Siyasah angkatan 2009 yang sama-sama belajar berproses.

Demikianlah, peneliti juga membuka ruang kritik dan saran atas kekurangan dan kesalahan di dalam penelitian ini, demi sebuah kepentingan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 17 September 2013

Penulis

Budi Ayani

NIM: 09370018



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAM PERNYATAAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Kerangka Teoretik.....	13
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II PEMBERITAAN ISLAM POLITIK DI MEDIA	21
A. Media dan Wacana.....	21
B. Wacana Islam Politik	29
C. Hubungan Media dan pemberitaan Islam Politik.....	42
BAB III KONTESTASI PEMEBERITAAN WACANA ISLAM POLITIK DI MEDIA.....	46
A. Praktek-praktek Wacana di Media.....	48

B. Ideologi	51
C. Ekonomi	60
D. Kekuasaan	67
E. Kebudayaan.....	75
BAB IV ANALISIS ISI DAN PERSEPSI MASYARAKAT	
TETANG PEMBERITAAN ISLAM POLITIK DI MEDIA.....	81
A. Hasil Analisis Isi	81
B. Islam Radikal	94
C. Islamfobia	98
D. Islam Moderat	104
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran-saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

DAFTAR TABEL

A. Tabel 01: Frekwensi Berita Penyerang Ahmadiyah, Cikeusik, Banten. Penyerangan Gereja Temanggung, Jawa Tengah. Penyerangan Syiah Sampang, Jawa Timur. Berita Partai-partai Islam setelah Verifikasi KPU Januari 2013	82
B. Tabel 02: Berdasarkan Halaman Pemberitaan Penyerang Ahmadiyah, Cikeusik, Banten, Penyerangan Gereja Temanggung, Jawa Tengah, Penyerangan Syiah di Sampang, Jawa Timur, Berita Partai-partai Islam setelah Verifikasi KPU Januari 2013	85
C. Tabel 03: Judul Berita Substantif dan Non Substantif Pemberitaan Penyerang Ahmadiyah, Cikeusik, Banten. Penyerangan Gereja Temanggung, JawaTengah. Penyerangan Syiah Sampang, Jawa Timur. Berita Partai-partai Islam setelah Verifikasi KPU Januari 2013	87
D. Tabel 04: Sumber Berita Pemberitaan Penyerang Ahmadiyah, Cikeusik, Banten, Penyerangan Gereja Temanggung, JawaTengah, Penyerangan Syiah Sampang, Jawa Timur, dan Berita Partai-partai Islam setelah Verifikasi KPU Januari 2013	89
E. Tabel 05: Fokus Pemberitaan Penyerang Ahmadiyah, Cikeusik, Banten, Penyerangan Gereja di Temanggung, JawaTengah, Penyerangan Syiah Sampang, Jawa Timur, dan Berita Partai-partai Islam setelah Verifikasi KPU Januari 2013	90
F. Tabel 06. Freming Pemberitaan Pemberitaan Penyerang Ahmadiyah, Cikeusik, Banten, Penyerangan Gereja Temanggung, JawaTengah, Penyerangan Syiah Sampang, Jawa Timur, Berita Partai-partai Islam setelah Verifikasi KPU Januari 2013	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam politik adalah gejala sosial politik di berbagai belahan dunia yang terkait dengan aktivitas sekelompok individu muslim yang melakukan gerakan dengan landasan ideologi yang diyakini bersama.¹ Seperti radikalisme, terorisme, fundamentalisme Islam, negara syariah atau negara Islam dan sebagainya.

Belakangan ini, wacana ini menarik perhatian media. Buktinya, aktivitas gerakan Islam politik menjadi pemberitaan di berbagai media. Ada media yang meliput secara khusus dan memuat pemberitaannya di halaman terdepan atau ada yang menjadikannya sebagai *trending topic*. Karena itu Wacana Islam politik bisa dikatakan cukup mewarnai pemberitaan media.

Selain hangat dibicarakan di media, wacana di atas juga menjadi bahan perbincangan publik, mulai dari akademisi, pengamat, pemerintah dan masyarakat. Dalam perbincangan tersebut ada yang menghubungkannya dengan persoalan ideologis dikalangan aktivis Islam politik dan ada juga yang menghubungkannya dengan kalangan muslim terhadap sekularisasi Barat dan

¹ Noorhaidi Hasan yang dikutip dari Gilles Kepel, *Jihad: The Trail of Political Islam*. dalam bukunya; *Islam Politik di Dunia Kontemporer; Konsep, Genelogi, dan Teori* (Yogyakarta: Suka Press, 2012), hlm. 2.

dominasi atas dunia Islam, di samping respon terhadap krisis kepemimpinan dikalangan umat Islam sendiri.²

Kalau dianalisis lebih jauh, pemberitaan Islam politik mesti melalui proses yang panjang, dan pemberitaanya tidak berangkat dari ruang kosong, apalagi sesuatu *taken for granted*, tetapi ada suatu kondisi sosial keagamaan yang menakutkan dan membahayakan yang terjadi. Dimana kondisi tersebut menjadi wacana yang menarik dibicarakan di media.

Kondisi ketakutan terhadap bahaya terorisme diperparah dengan dramatisasi pemberitaannya oleh media. Pemberitaannya itu ikut membangun kondisi ketakutan publik yang berlebihan terhadap wacana Islam politik. Ini menunjukkan bahwa pemberitaan media ikut membangun kondisi dan psikologi sosial terhadap wacana Islam politik, sehingga menjadi realitas.

Pada dasarnya, media dan Wacana Islam politik adalah dua hal yang berbeda. Tetapi keduanya memiliki hubungan yang dapat diperhitungkan dan dikalkulasikan. Jika kepentingan keduanya sama, bisa jadi, media melihat Islam politik bukan sekedar obyek pemberitaan tetapi sesuatu yang perlu difasilitasi dalam menyuarakan kepentingan-kepentingan Islam politik. Sebaliknya tidak akan memiliki hubungan apa-apa bila kedua belah pihak tidak memiliki kepentingan yang sama. Yang lebih membahayakan lagi adalah media dan Islam politik sama-sama melupakan kepentingan publik.

Sebetulnya bentuk hubungan media dan Islam politik dipengaruhi oleh ketergantungan pada pilihan rasional kedua belah pihak media. Pilihan

² Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syariah*, alih bahasa Ahmad Suaedy & Amirudin ar-Rany (Yogyakarta: LKiS, 2011), hlm. 7.

rasional itu didasarkan atas pertimbangan untung-rugi. Nantinya, pilihan rasional itulah yang akan menentukan isi pemberitaan media. Oleh karenanya, kita tidak bisa menafikan dalam pemberitaan Islam politik ada perbedaan antara fakta peristiwa (yang sebenarnya) dengan pemberitaan media.

Tetapi berberapa hasil pemberitan Islam poltik, peran media sangat dominan. Media bisa menggambarkan Islam politik dengan berbagai cara, meskipun secara normatif sudah diatur dalam etika pres dan jurnalistik. Sehingga peristiwa yang disampaikan tetap menimbulkan persepsi yang berbeda di kalangan konsumen atau audiens. Hal ini tidak terlepas dari perlakuan media terhadap pemberitaan Islam politik itu sendiri. Tentunya, citra dan stigma terhadap Islam politik tergantung pada media yang menyampaikannya.

Di antara cara yang sering digunakan media yaitu upaya mempengaruhi isi atau pesan media. Nantinya, isi pesan media itu sendiri dapat mempengaruhi pandangan pembaca terhadap Islam politik. Jadi isi pesan media bukan sekedar informasi belaka tetapi ikut menyumbang paradigma tersendiri pada Islam politik. Jadi apapun bentuk pesan dan citra yang disampaikan media tergantung pada perlakuannya yang diinginkan redaktur media.

Untuk mempengaruhi isi pesan media banyak cara yang dapat dilakukan media. Dengan agenda setting atau kebijakan redaksional yang dimiliki media, sangat mungkin mempengaruhi pesan-pesan media, seperti penggunaan bahasa yang menonjolkan dan menekankan Islam politik. Wacana

ini tergantung pada media yang menyampaikan. Beda media, beda kebijakan redaksional dan akan melahirkan teks atau isi pesan yang berbeda pula.

Selain hal di atas, pemilihan fakta dan penekanan dari sebuah sisi juga akan mempengaruhi informasi media. Penekanan sebuah fakta atau kejadian seperti tindakan kekerasan dengan pendekatan ideologinya yang berlebihan, membuat pesan yang akan diterima pembaca atau konsumen media hanya dari sisi kekerasannya juga. Karena media hanya menyoroti dari sisi tindakan kekerasan yang dilakukan Islam politik saja. Pemberitaan media seperti itu disebabkan oleh berbagai kepentingan media yang ada dibelakangnya. Seperti ideologi, ekonomi politik dan kekuasaan.³

Tindakan kekerasan seperti teror yang dilakukan aktivis Islam politik tidak jarang media menyorotinya dari sisi ketakutan dampak yang diakibatkannya. Selain itu, hampir semua pemberitaan menonjolkan dan menegatifkan tindakan itu. Tetapi media tidak mendalam untuk menyoroti dari sisi yang lain, misalnya tindakan itu dilakukan sebagai bentuk protes pada kekuasaan atau ketimpangan sosial yang dialami oleh aktivis Islam politik.

Jadi pesan dan citra apa saja yang diterima dan terbentuk di masyarakat tentang Islam politik sangat bergantung pada media. Apapun bentuk persepsi atau pandangan yang diterima dan ditimbulkan di tengah-tengah masyarakat tentang Islam politik tergantung pada medianya. Tentunya

³ Kekuasaan menurut Rederik Martin yang dikutipnya dari Weber adalah kemungkinan seseorang pelaku mewujudkan keinginannya di dalam suatu hubungan sosial yang termasuk dengan kekuatan atau tanpa menghiraukan landasan yang menjadi pijakan kemungkinan itu. Definisi yang lain yaitu kemampuan potensial dari seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi yang lainnya di dalam sistem yang ada. Rederik Martin, *Sosiologi Kekuasaan* (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 71.

semua ini tidak mungkin dapat dilakukan oleh media tanpa maksud dan tujuan apa-apa. Idologis, orientasi ekonomi dan kekuasaan sebuah media menjadi faktor dominan untuk yang perlu dicermati.

Di sini media bukan sekedar melakukan pratek-praktek produksi wacana atau pesan tentang Islam politik. Tetapi media juga berusaha untuk mempertahankan kepentingan ideologi, ekonomi, politik, kekuasaan, dan budaya yang ada di balik pemberitaan tersebut. Jadi pemberitaan tentang Islam politik yang begitu gencar dilakukan oleh media bisa dicurigai sebagai bentuk perlawanan pada ideologi, kepentingan ekonomi, politik yang diusung oleh Islam politik. Citra, opini dan persepsi yang diterima Islam politik akan dilakukan dengan proses penyesuaian ideologi atau kepentingan media.

Penyesuaian-penyesuaian dalam proses produksi wacana dalam media adalah suatu hal yang sangat mungkin terjadi. Penyesuaian dalam bidang ekonomi akan terjadi, saat media massa mau tak mau harus memikirkan pasar demi memperoleh keuntungan dari penjual iklan.⁴ Jadi media bukanlah sarana yang netral, tetapi cenderung menampilkan aktor tertentu sebagai subjek yang mendefinisikan peristiwa atau kelompok tertentu,⁵ yang sesuai dengan ideologi dan kepentingannya. Dapat disimpulkan dalam sebuah pesan yang disampaikan merupakan bentuk ideologisasi dari kepentingan sebuah media

⁴ Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis Terhadap Berita-berita Politik* (Jakarta: Granit, Mei, 2004), hlm. 3.

⁵ Dalam analisis wacana Sara Mills. Dalam bukunya Eriyanto, menempatkan representasi sebagai bagian terpenting. Bagaimana satu pihak orang, atau gagasan peristiwa sebagai subjek atau obyek akan ditampilkan agar dapat mempengaruhi makna dari sebuah wacana berita ketika diterima khalayak, Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 201.

itu sendiri, yang jauh dari mewakili kepentingan publik secara umum. Sedangkan pesan dan gambar itu tidak bisa dilepaskan dari peran media.⁶ Proses yang dilalui memberi ruang yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan dalam proses pemberitaannya.

Sebetulnya, banyak cara yang dapat dipergunakan dalam melihat wacana diatas, yaitu cara mengetahui makna yang ingin disampaikan media melalui pemberitaannya dan cara untuk mengungkap maksud dari sebuah relasi kuasa yang bermain dibelakang teks atau pesan media itu sendiri. Menurut Noorhaidi Hasan kemampuan memaknai makna di balik makna dari sebuah wacana menjadi mutlak, bila seseorang tidak ingin terjebak pada penjelasan siplistik yang menggagalkannya untuk mencari akar sesungguhnya dari suatu persoalan.⁷

Karena yang ingin dilihat adalah isi pemberitaan maka penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*).⁸ Analisis isi adalah pembahasan mendalam dari suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa, dalam hal ini terkait dengan isi pemberitaan Islam politik. Analisis isi merupakan sebagai teknik pengumpulan dan pengalisis isi dari suatu teks.⁹ Singkatnya analisis isi merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu

⁶ Menurut Dedi Kurnia Syah Putra. Nilai lebih yang melekat pada media adalah Keserapakan pesan, media mampu mengantarkan pesan dalam keseragaman dalam satu waktu, di tempat yang berbeda-beda. Kominikan terpisah oleh ruang dan waktu, sedangkan media massa mampu menembusnya tanpa halangan sedikitpun. Dedi Kurnia Syah Putra, *Media dan Politik: Menemukan Relasi antara Dimensi Simbiosis-Mutualisme Media dan Politik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 12.

⁷ Noorhaidi Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer...*, hlm. 148.

⁹ Nanang Martno, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisa Isi dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta; Rajawali Press, 2010), hlm. 76.

komunikasi.¹⁰ Cara mempergunakan dalam analisis isi tersebut menggunakan paradigma kritikal. Bentuk kritikal yang dipergunakan yaitu paradigma analisis wacana analisis kritis (CDA).¹¹ Analisis wacana kritis sebagai teori akan digunakan untuk melihat proses produksi makna, relasi kuasa dan ideologi di balik pemberitaan Islam politik (terorisme, fudamentalisme, radikalisme, Negara syariah dan lain-lainya. Sehingga nantinya akan menggambarkan praktek kuasa dan ideologi dalam proses produksi teks yang dilakukan media selama ini terhadap wacana Islam politik.

Karena analisis wacana itu banyak dan dapat dipergunakan mengungkap semua informasi media dan teks. Untuk memudahkan penelitian ini, peneliti akan menggunakan *Kompas* dan *Republika* sebagai objek penelitian. Kedua media ini dipilih untuk mewakili beberapa orientasi dan pandangan media. *Kompas* sebagai sebuah media cetak yang mewakili pandangan moderat dan sekuler. Sedangkan *Republika* pandangan islamis.

Maka dari latar belakang masalah di atas penulis ingin meneliti tentang “Media dan Islam Politik: Analisis Isi Pemberitaan *Kompas* dan *Republika*.”

¹⁰ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positifistik, Rasionalitatif, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, cet. III (Yogyakarta: Rake Sarin, 1996), hlm. 49.

¹¹ Menurut Ibnu Hamad yang dikutipnya dari Norman Fairlough. Analisis wacana kritis memperlihatkan keterpaduan (a) analisis teks, (b) analisis proses produksi, konsumsi, dan distribusi teks, serta (c) analisis sosiokultural yang berkembang di sekitar wacana. Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. hlm. 35.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang melatar belakangi pemberitaan Wacana Islam politik di media?
2. Bagaimana Wacana Islam politik berkaitan dengan ekonomi, politik, ideologi, dan budaya dalam teks media?
3. Apa pengaruh pemberitaan media terhadap persepsi masyarakat tentang Islam politik?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini akan melacak *pertama*, latar belakang pemberitaan Islam politik di media *kedua*, bagaimana Wacana Islam politik berkaitan dengan ekonomi, politik, ideologi dan budaya dalam teks media. *ketiga*, menjelaskan pengaruh pemberitaan media terhadap pandangan atau persepsi masyarakat.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan latar belakang Wacana Islam politik menjadi pemberitaan di media.
- b. Untuk memahami bagaimana Wacana Islam politik berkaitan dengan kekuasaan, ideologi, politik, ekonomi, dan budaya dalam teks.
- c. Mengetahui persepsi masyarakat tentang Wacana Islam politik.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk membantu dalam memahami dan menjelaskan Wacana Islam politik dalam media.

- b. Menjelaskan bagaimana kaitan wacana Islam politik dan ideologi, ekonomi, politik, dan budaya dengan media. Serta menjelaskan pandangan masyarakat terhadap Wacana Islam Politik.
- c. Menambah khazanah ilmu pengetahuan.

E. Telaah Pustaka

Kajian tentang analisis isi sudah banyak dibahas oleh beberapa kalangan dan dipraktekkan dalam berbagai penelitian khususnya yang berhubungan dengan media. Melihat dampak yang ditimbulkan oleh teks maka sangat dirasa perlu sekali analisis isi dengan pendekatan analisis wacana kritis yang akan dipergunakan untuk membidik berbagai relasi kuasa dan praktek-praktek ideologi yang terkandung di dalam teks media.

Di antaranya buku *Analisis Wacana; Pengantar Teks Media oleh Eriyanto*. Buku ini merupakan sebuah pengantar metodologis dan teoritis dalam analisis wacana, terutama analisis wacana teks media. Di samping itu dia juga menjelaskan konsep dan tokoh penting di dalam analisis wacana tersebut. Menurutnya, wacana merupakan suatu analisis untuk membongkar maksud-maksud dan makna-makna tertentu. Wacana adalah suatu upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari sang subjek yang mengemukakan suatu pernyataan.¹² Bagi Eriyanto, analisis wacana merupakan alternatif selain dari analisis isi kuantitatif. Dengan analisis wacana kita dapat mengetahui tentang isi teks media dan mengetahui bagaimana pesan atau teks media itu disampaikan serta melihat maksud teks media.

¹² Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 5.

Buku Eriyanto tentang *Analisis Framing; Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Menurutnya analisis *framing* secara umum adalah bagaimana media membingkai sebuah peristiwa. Caranya dengan membentuk konstruksi atas realitas, menyajikannya dan menampilkan pada khalayak. Dia juga menjelaskan elemen apa yang dipakai untuk melihat strategi media dalam mengemas dan menyajikan berita. Analisis *framing* ini menggunakan pendekatan *pertama*, level makro struktural, yaitu pemingkai yang dilakukan dalam tingkatan wacana. *Kedua*, mikro-struktural, yaitu dengan pemilihan fakta apa yang menonjol dan fakta apa yang disembunyikan. *Ketiga*, elemen retorik, di sini dalam fakta ditekankan.¹³ Di samping itu, dia menjelaskan bahwa analisis *framing* itu berangkat dari pandangan konstruksionis fenomenologis, dengan demikian, kita mudah memahami pemberitaan media yang sudah diberitakan berdasarkan konstruksi. Dalam buku ini juga, dia menjelaskan beberapa konsep *framing* dari berbagai kalangan tokoh seperti Robert N. Etnam.

Buku Ibnu Hamad berawal dari disertasinya yang kemudian dibukukan berjudul, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa; Sebuah Studi Analisis Critical Discourse Analysis Terhadap Pemberitaan Berita-berita politik*. Ibnu Hamad menjelaskan cara paradigma kritis dan kerangka kritis CDA, bahwa di balik realitas yang teramati (*virtual reality*) pada level deskriptif terdapat “realitas kesejarahan dan pengaruh kekuatan sosial, budaya dan ekonomi-politik yang berpengaruh atas pengkonstruksian partai-partai

¹³ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 327.

politik. Dan secara umum dia membagi pengkonstruksi tersebut berdasarkan opini publik dan kepentingan ideologis, idealis, politik dan kepentingan ekonomi masing-masing yang terbaca dari teksnya. Dalam proses pengkonstruksian itu dipengaruhi oleh kekuatan internal (ideologis, idealis) dan atau kekuatan eksternal (pasar, situasi politik).¹⁴

Buku *Islam Politik Di Dunia Kontemporer Konsep, Genologi, dan Teori* karya Noorhaidi Hasan banyak sekali menjelaskan perihal definisi dan konsep Islam politik, genologi, ideologi, sosiologi, teori gerakan sosial dan analisis terhadap wacana kritis serta militansi Islamis dan multikulturalisme dalam konstek pengalaman Indonesia. Dan dia secara khusus menyoroti di *bab lima* tentang teori gerakan sosial dan analisis wacana kritis, dengan mempertemukan dua teori tersebut. Menurutnya, dengan demikian memungkinkan kita menangkap “makna di balik makna” dari suatu wacana dan memahami peran performatif bahasa dalam gerakan Islam politik.¹⁵ dalam bab lima secara khusus dia menjelaskan, bahwa wacana Islam politik cenderung mendapatkan penekanan yang berlebihan pada sisi ideologis sekelompok orang yang ingin mengembalikan roda sejarah, dan jarang dimengerti bahwa wacana Islam politik sebagai impuls perlawanan terhadap rezim-rezim penguasa yang korup, gagal menjalankan amanah dan janji-janji mereka.¹⁶

¹⁴ Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*, hlm. 180-182.

¹⁵ Noorhaidi Hasan *Politik Di Dunia Kontemporer....*, hlm. 141-142.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 144.

Buku Dedi Kurnia Syah Putra yang berjudul *Media dan Politik; Menemukan Relasi antara Dimensi Simbiosis-Mutualisme Media dan Politik*. Buku ini membahas tentang hubungan media dan politik dalam kerangka saling menguntungkan. Dalam bukunya, dia banyak menyoroti kondisi politik dan media waktu pemilu 2009. Dengan kehadiran media informasi ini secara tidak langsung dijadikan sebagai acuan atau sumber untuk menciptakan realitas politik semu, kebaikan yang seolah-olah, kemudian disebut sebagai ladang citra sehingga untuk penilaian apakah politik itu baik atau buruk sangat abstrak.¹⁷ Dalam buku ini dia juga membahas para tokoh pengagas kajian media seperti Jean Baudrillard dan Marshal McLuhan.

Bedanya penelitian yang direncanakan dengan buku-buku terdahulu terletak pada Wacana Islam politik menjadi pemberitaan di (*Kompas* dan *Republika*), kemudian bagaimana wacana Islam politik berhubungan dengan kekuasaan, ekonomi, politik, ideologi, dan budaya. Setelah itu bagaimana masyarakat dunia mempersepsikan Wacana Islam.

¹⁷ Dedi Kurnia Syah Putra, *Media dan Politik...*, hlm. 142.

F. Kerangka Teori

Konsep media merupakan alat atau sarana untuk berkomunikasi.¹⁸ Media dalam ilmu komunikasi adalah sarana pengiriman pesan, dengan kata lain sarana komunikasi.¹⁹ Menurut Prof. Harsono Sumardi dalam pengantar buku *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Masa* karya Ibu Hamad, ia menjelaskan, banyak aspek dari media massa yang membuat dirinya penting dalam kehidupan politik, di antaranya; daya jangkauan yang sangat luas dalam penyebaran informasi politik, melampaui batas wilayah, kelompok umur, jenis kelamin, sosial ekonomi, status perbedaan paham dan orientasi. Selain itu kemampuan media melipat-gandakan pesan, bisa mewacanakan sebuah peristiwa, kemampuan *agenda setting* yang dimiliki media dan media juga mampu membuat pemberitaan peristiwa politik menjadi informasi yang berantai.²⁰ Dengan seperti itu pada dasarnya segala pemberitaan dapat dilakukan oleh media tetapi yang berkaitan dengan Islam politik memiliki sisi yang penting. Mengingat wacana Islam politik di berbagai media mendapat tempat tersendiri dalam pemberitaan.

Menurut Noorhadi Hasan yang dikutipnya dari Gilles Kepel, Islam politik adalah gejala sosial politik di berbagai belahan dunia, berkaitan dengan aktivitas sekelompok individu Muslim yang melakukan gerakan dengan

¹⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, cet.22, DepDikBud, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm

¹⁹ Dedi Kurnia Syah Putra, *Media dan Politik: Menemukan Relasi antara Simbiosis-Mutualisme Media dan Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 2.

²⁰ Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa...* hlm. XV-XVI.

landasan ideologi yang diyakini bersama.²¹ Jadi wacana ini merupakan persoalan sosial yang ramai dibicarakan di media. Sebetulnya banyak faktor penyebab masuknya wacana ini kedalam pemberitaan media.

Dengan masuknya Wacana Islam politik kedalam media maka dengan sendirinya banyak mengundang perdebatan yang tidak kalah sengitnya di samping berbagai teori dan persoalan dikemukakan untuk menjelaskan. Menurut peneliti, masuknya wacana ini kedalam media serta mengundang perdebatan di publik harus dilihat bahwa wacana ini tidak berdiri sendiri. Oleh karena analisis wacana kritis menjadi pilihan yang diambil peneliti melihat wacana Islam politik di media.

Untuk itu, menjelaskan media dan Islam politik dalam analisis isi dengan paradigma analisis wacana kritis dalam studi pemberitaan di *Kompas* dan *Republika* akan menggunakan teori. Diharapkan teori tersebut bisa membantu peneliti dalam menentukan tujuan dan arah penelitiannya dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna membantu pembentukan hipotesa-hipotesanya.²² Sedangkan teori itu adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.²³

Teori yang akan dipergunakan tersebut adalah teori diskursus analisis wacana kritis (CDA). Teori ini akan digunakan untuk menjelaskan diskursus

²¹ Noorhaidi Hasan, *Islam Politik Di Dunia Kontemporer...*, hlm. 2.

²² Koentjaraningrat (ed dan pen), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. Ke-X (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 21.

²³ Kerlinger, F. N. Yang dikutip oleh Masri Singaribun dan Sofian Effendi. dkk. *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, Edisi kedua, 1987), hlm. 37.

yang berada di balik teks atau isi pemberitaan media yang disampaikan ke publik. Teori ini akan di jadikan sebagai alat analisis terhadap relasi kuasa yang terdapat dalam praktek produksi wacana dan teks media *Kompas* dan *Republik*.

Selain relasi kekuasaan teori ini bisa mengungkap ideologi yang berada dibalik sebuah pemberitaan media. Ideologi itu secara partikular merupakan gagasan penjelasan yang dianggap kurang lebih sebagai penyembunyi hakekat kenyataan sesungguhnya, sedangkan pengetahuan tentang kenyataan itu sendiri dianggap tak sesuai dengan kepentingan-kepentingan lawan kita itu.²⁴

Ideologi tersebut merupakan bangunan oleh sekelompok orang yang dominan dengan tujuan untuk memproduksi dan melegetimasi dominasi mereka.²⁵ Serta bagaimana dampaknya pada seseorang atau kelompok dalam bertindak dan bersikap atas sebuah persoalan dikarenakan ideologinya. Sesungguhnya ideologi yang dianutlah pada akhirnya menentukan bagaimana seseorang atau sekelompok orang memandang sebuah persoalan dan harus berbuat apa untuk menyikapi persoalan tersebut,²⁶ dalam hal ini pemberitaan dan wacana Islam politik. Selain relasi ideologi, teori diskursus analisis kritis ini akan dipergunakan untuk melihat ekonomi, kekuasaan, politik dan budaya.

²⁴ Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia: MenyingkapKaitan Pikiran dan Politik* (Yogyakarta: kanisius. 1991), hlm. 60.

²⁵ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media ...* , hlm. 13.

²⁶ Franz Magnis Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 230.

G. Metode Penelitian

Metode adalah cara atau jalan. Dalam upaya ilmiah maka metode menyakut cara kerja; yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.²⁷ Metode dalam artian luas dapat diartikan sebagai cara bertindak menurut aturan tertentu, bertujuan: supaya kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah, agar mencapai hasil maksimal.²⁸ Maka untuk itulah metode tersebut digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan penelitian ilmiah adalah sistem aturan yang menentukan jalan untuk mencapai pengertian baru pada bidang ilmu pengetahuan tertentu. Metode menjamin hakiki bagi ilmu pengetahuan, menjadi pengetahuan sistematis-metodis.²⁹ Jadi metodologi penelitian yaitu ilmu yang mempelajari tentang metoda-metoda, ilmu tentang alat-alat untuk mencari kebenaran.³⁰ Untuk memudahkan cara kerja penelitian ini maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field riseach*). Seluruh data yang akan digali dan akan dianalisa, yang bersumber dari buku-buku ataupun tulisan di berbagai media perihal demikian. Sedangak

²⁷ Koentjaraningrat (ed dan pen), *Metode-metode Penelitian Masyarakat...*, hlm. 7.

²⁸ Akh. Minhaji, *Strategies For Sosial Research: The Methodological Imagination In Islamic Studies* (Yogyakarta: Suka Press, 2009), hlm. 21.

²⁹ *Ibid*, hlm. 22.

³⁰ Noeng Muhajir, *Metode Penlitian Kulitatif....*, hlm. 4.

penelitiannya diambil dari hasil wawancara dengan sejumlah informans. Data-data yang akan diambil tidak sebatas pada wacana Islam politik dan media, tetapi yang berkaitan dengan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif-analitik.³¹ Penelitian kualitatif adalah penelaahan yang dimaksudkan untuk menganalisis soal ditinjau dari segi teknik, isi, dan editorial dan secara teknis dimaksudkan sebagai penelaahan soal berdasarkan prinsip-prinsip pengukuran dan format penulisan soal.³² Setelah data terkumpul kemudian dilakukan klasifikasi, digambarkan, diuraikan dan dianalisa secara mendalam dan menyeluruh sehingga tergambarlah obyek yang akan dipeneliti tersebut. Di samping itu akan mempermudah dalam analisa dan pengambilan kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah politik media. Pendekatan ini dipergunakan untuk melihat kecenderungan media dan menganalisis tentang politik media terkait dengan hal ini media dan Islam politik. Dalam politik media sebuah wacana sangat menentukan terhadap apa yang akan disampaikan. Dalam wacana Islam politik tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik media dalam mengangkat wacana tersebut. Setidaknya media ikut mengembar-gemborkan wacana ini di

³¹ M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 69.

³² Sumarna Surapnata, *Analisis, Validitas, Realibilitas dan Interpretasi Hasil Tes Implementasi Kurikulum 2004* (Bandung: Rosdakarya, 2004), hlm. 1-2.

hadapan khalayak, dan upaya mempertahankan hegemoni dan legitimasi kekuasaan yang ada di balik pemberitaan tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan membaca dan menelaah sumber-sumber kepustakaan, khususnya tentang media, Islam politik dan wacana kritis. Data yang akan dipergunakan dan akan dianalisis merupakan data literal dan hasil wawancara. Data literal yang akan dipergunakan berupa kata-kata, kalimat, gambar, ilustrasi dan sebagainya.

5. Teknis Analisis Data

Dari data yang terkumpul seperti kata-kata, kalimat, gambar, ilustrasi, penyusun melakukan analisis terhadap data tersebut. Bentuk analisisnya yaitu analisis isi (*content analysis*). Dengan mencermati seleksi, penonjolan dan pentautan fakta ke dalam berita agar menarik atau lebih bermakna, lebih berarti, lebih menarik, atau lebih ingat untuk mengiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya.³³ dengan analisis tersebut diharapkan data yang diinginkan peneliti berbentuk data yang valid dan akurat sebagai jawaban permasalahan yang ada. Alat analisa data yang digunakan peneliti tersebut menggunakan instrumen deduktif-eksploratif,³⁴ yaitu analisa terhadap data dan penafsiran-penafsiran yang bersifat umum yang mempunyai unsur kesamaan dalam masalah yang

³³ Alex Sobor, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 162.

³⁴ M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah...*, hlm. 69.

sedang dikaji, kemudian data dan penafsiran tersebut dijelaskan secara rinci dan dijadikan premis mayor. Sedangkan masalah peneliti ini akan dijadikan sebagai premis minor. Dengan demikian diharapkan mempermudah peneliti dalam mengambil kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian skripsi ini, sistematika penulisannya direncanakan dengan lima bab, masing-masing bab saling terkait satu sama lain.

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang berisi tentang: latar belakang masalah sebagai pengantar dari penelitian ini, rumusan masalah yang berisi permasalahan yang ingin dijawab, batasan masalah yang berisi terkait dengan pembatasan permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan yang berisi tentang signifikansi penelitian serta kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai gambaran dari hasil penelitian atau buku yang terdahulu, kerangka teoritis yang akan dipergunakan sebagai teori atau pisau analisis yang dipergunakan dalam dalam menjawab permasalahan sekaligus sebagai kerangka berpikir terhadap penelitian ini, di samping itu ada metode penelitian sebagai penjelasan cara dan langkah yang dipergunakan dalam dalam penganalisis data, dan terakhir memuat sistematika pembahasan dalam rangka untuk mensistematisasikan dalam penyusunan skripsi ini.

Bab *kedua*, berisi tentang latar belakang pemberitaan Islam politik di media pengertian media, Wacana dan Wacana Islam politik , gambaran umum

Islam politik, ideologi, aktivitas, kognisi sosial yang ditimbulkannya, hubungan media, Wacana Islam politik dalam pemberitaan.

Bab *ketiga* menjelaskan konstelasi wacana Islam politik di media (*Kompas* dan *Republika*) dalam studi analisis wacana kritis. praktek-praktek wacana kritis di media, media dan kebijakan redaksional dan *framing* media, hubungan Wacana Islam politik dan ideologi, politik, ekonomi, dan kebudayaan.

Bab *keempat* berisi tentang analisis terhadap pengaruh pemberitaan media tentang Wacana Islam politik pada masyarakat. Bab *kelima* terdiri dari penutup dan saran.

BAB V

PENUTUP

Penelitian ini tentang wacana Islam politik dalam media, khususnya harian *Republika* dan harian *Kompas*. Peneliti menyoroti wacana Islam politik yang direalisasikan lewat berita-berita media. Akan tetapi berita ini tersebut tidak lagi sunyi dari berbagai kepentingan ideologi, ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam rangka mengetahui di balik pemberitaan tersebut, khususnya berita penyerang Ahmadiyah, Cekuesik, Pandaiglang, Banten, penyerangan Gereja Temanggung, Jawa Tengah, penyerangan Syiah Sampang, Jawa Timur, dan berita partai-partai Islam setelah verifikasi KPU Januari 2013 menggunakan analisis isi.

A. Kesimpulan

Islam politik merupakan gejala sosial politik aktivis sekelompok individu melakukan gerakan berdasarkan ideologi yang diyakininya, meliputi pemikiran dan aksi yang menggantikan istilah fundamentalisme, radikalisme, revivalisme, dan reformisme Islam. Wacana Islam politik menjadi perbincangan publik saat ini, termasuk media. Penyebab munculnya gerakan ini bukan sekedar kelanjutan konflik masa lalu, paham yang mengeras kemudian berubah menjadi radikal dan fundamental, akhir-akhir ini anti Amerikanisme/Barat dan keinginan meraih surgawi. Akan tetapi kondisi dan situasi sosial-politik sejumlah masyarakat muslim saat ini yang ditanggapi dengan sikap reaktif terhadap kondisi dan situasi masyarakat yang tidak memihak kepada mereka.

Di sini kehadiran media bukan sekedar menyoroti dan memfasilitasi laju informasi (wacana Islam politik), akan tetapi mengambil posisi tersendiri dalam maraknya wacana Islam politik yang sesuai dengan orientasinya sendiri. Akan tetapi sikap media seperti ini malahan ditanggapi masyarakat sesuai dengan orientasi sebagai pembaca/audiens, dalam memahami gerakan Islam politik.

Lewat analisis isi dari kasus –penyerangan Jama'ah Ahmadiyah di Cekuesik Banten, penyerangan Gereja di Temanggung Jawa Tengah, penyerang warga Syiah di Sampang Jawa Timur, dan pemberitaan parta-partai Islam paska verivikasi 2013 - didapatkan kesimpulan bahwa media – harian Republika dan harian Kompas- mampu mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap aksi-aksi yang dilakukan aktivis Islam politik. Selain itu kedua media juga telah menambah varian pada pandangan umat Islam yang terpola pada masyarakat Islam radikal, Islamfobia, dan Islam Moderat.

Dalam konteks ke Indonesiaan, harian *harian Kompas* dan Republika sama-sama menyoroti aksi gerakkan Islam politik ini, tetapi harian *Kompas* menyorotinya dalam kerangka kebinekaan bangsa Indonesiaan dan dinamika sosial keagamaan di Indonesiaan serta kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini. Sedangkan harian Republika selalu membungkus wacana ini dalam keislaman di Inonesia dan menekankan artipentingnya pemerintah dalam pemberitaan mereka.

B. Saran-saran

Penyusun menyadari bahwa telaah ini tidaklah memadai untuk mengungkap secara detil dan komprehensif pembahasan media dan wacana Islam politik ini. Untuk itu perlu dilanjutkan dan dikembangkan dalam penelitian yang lain agar pembahasan ini semakin sempurna dan utuh, baik sebagai konsumsi akademis maupun digunakan sebagai *problem solving*.

Oleh sebab itu, perlu kiranya pembahasan tentang wacana Islam politik ini dikembangkan lagi kedalam bermacam-macam disiplin ilmu pengetahuan. Mengingat terlalu banyak persoalan yang berkaitan dengan wacana Islam politik ini. Agar wacana ini dapat dibedah dan secara utuh tanpa mengesampingkan pemahaman lain. Apalagi di Indonesia, ada beberapa pihak yang sering dilanda kecemasan. Ini bisa jadi akibat minimnya informasi yang didapatkan secara utuh.

Upaya ini dimaksudkan agar pemahaman terhadap perkembangan wacana islam politik tidak sekedar perang wacana di media. Melainkan upaya ini ingin membangun pemahaman yang lebih utuh tentang isu tersebut. Sesudah itu seraya kembali untuk melihat apa yang sedang terjadi di tengah-tengah umat Islam saat ini. Mengingat umat Islam tengah menghadapi dinamika sosial politik yang teramat sulit untuk diselesaikan.

Ada dua saran konkret penulis, *pertama*; bagaimana media memproses serta memperlakukan wacana Islam politik oleh para redaktur media sebelum menyajikan kedalam bentuk berita?. *Kedua*, apa saja bentuk reaksi masyarakat terhadap wacana Islam politik yang disampaikan media massa ?.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal Ahmad, *Ilmu Politik Islam V: Sejarah Islam dan Umatnya sampai Sekarang Perkembangan dari Zaman Kezaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Abou, Khaled, El Fadel, *Selamatkan Islam dari Puritan, alih bahasa Helmi Mustaf*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Afadlal (Et. All) (Endang Turmudi & Riza Sihbudi: ed), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, 2005.
- Ahmed, Abdullah An-Na'im, *Dekonstruksi Syariah*, alih bahasa: Ahmad Suaedy & Amirudin ar-Rany, Yogyakarta: LKiS, 2011.
- Althusser, Louis, *Tentang Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, dan Cultural Studies*, terj. Osly Vinoi Arnof, Yogyakarta: Jalasutra, cet. III, 2010.
- Azhar, Ahmad Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Politik, dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1994.
- Barton, Will & Andrew Beck, *Persiapan Mempelajari Kajian Bahasa*, Yogyakarta, Jalasutra, 2010.
- Bondlm, F. Fraser, *Introduction to Journalism, alih bahasa justadi Suhendang, Pengantar Jurnalistik, Jilid I*, Bandung: PT Karya Nusantara, 1985.
- Brown, L. Carl, *Wajah Islam Politik: Pergulatan Agama dan Negara Sepanjang Sejarah Umat*, alih bahasa Abdul Ali, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta 2003.
- Budiarjdo, Mirianm, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Garamedia, 1982.

- Cangara, Hafied, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Rajawali, 2007.
- Chernov, Julie Hwang, *Umat Bergerak: Mobilisasi Damai Kaum Islamis di Indonesia, Malayasia, dan Turki*, alaih bahasa dan editor Samsudin Belian, Jakarta: Freedom Institute 2011.
- Danesi, Marcel, *Pengantar Memahami Semiotika Media*, terj. A. Gunawan Admoranto, Yogyakarta: Jalasutra, 2010.
- DepDikBud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, cet. 22, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Eko Pra Prasetyo, *Islam Kiri Melawan Kapitalis Modal dari Wacana Menuju Gerakan*, Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar, 2002.
- Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- , *Analisis Wacana: Pengantar Analisi Teks Media*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Esposito, Jhon L., *Islam dan Politik*, alih bahasa H.M. Joesoef Sou'yb, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- , (ed dan pen), *Islam dan Perubahan Sosial-Politik di Negara sedang Berkembang*, Yogyakarta: PLP2M, 1985.
- Firmanzah, *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realita*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, cet. III, 2012.
- Gilles, Kepel, *Pembalasan Tuhan: Kebangkitan Agama Samawi di Dunia Modren*, alih bahasa Masdar Hilmy, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.

- Hamad, Ibnu, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis Terhadap Berita-berita Politik*, Jakarta: Granit, Mei, 2004.
- Hardiman, F. Budi, *Kritik Ideologi, Pengetahuan dan Kepentingan*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Hari, Muhammad Zamaharir, *Agama dan Negara Analisis Pemikiran Politik Nurcholish Madjid*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Harrison, Lawrence E. & Samuel P. Huntington (ed), *Kebangkitan Peran Budaya: Bagaimana Nilai-nilai Membentuk Kemajuan Manusia*, Jakarta: Pustaka LP3ES, cet. Ke II, 2011.
- Hartley, John, *Communication Cultural, & Media Studies: Konsep Kunci*, alih bahasa Kartika Wijayati, Yogyakarta: Jalasutra, 2010.
- Hasan, Noorhaidi, *Islam Politik di Dunia Kontemporer: Konsep, Genealogi, dan Teori*, Yogyakarta: Suka Press, 2012.
- , *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru*, terj. Hairus Salim, Jakarta: LP3ES, 2008.
- Hasjmy, A. *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Hatington, Samuel P, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Jakarta: Grafiti, 1995.
- Herudjati Purwoko, *Discourse Analysis Kajian Wacana bagi Semua Orang*, Jakarta: Indeks, 2008.
- Ibrahim, Lathifah Khadhar, *Ketika Barat Memfitnah Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2005.

- In'am Muhammad, Esha, *Religi. Jurnal Studi Agama-agama*. Vol. I. No. I. Januari-Juni, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Kellner, Douglas, *Budaya Media: Cultural Studies, Identitas, dan Politik antara Modern dan Posmodern*, alih bahasa Galih Bondan Rambatan, Yogyakarta: Jalasutra, 2010.
- Kieren, Mitthew, *News Reporting and the Ideological Presumption*, *Jurnal of Commuication* , vol. 47, No. 2, 1997.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. X, Jakarta: Gramedia, 1990.
- Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF. (peb & ed), *Islam, Negara, dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005.
- Kumar, Deepa, *Isam Politik: Sebuah Studi Analisis Marxis*, alih bahasa Fitri Mohan, Yogyakarta: Resist Book, 2012.
- Kurnia, Dedi Syah Putra, *Media dan Politik: Menemukan Relasi antara Dimensi Simbiosis-Mutualisme Media dan Politik*, Yagyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Latif, Yudi, *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genologi Inteligensia Muslim Indonesia Abad Ke-20*, Jakarta, Democracy Proyek Yayasan Abad Demokrasi, 2012.
- Lull, James, *Media, Komunikasi, Kebudayaan: Suatu Tinjauan Pendekatan Global*, Terj: A Setiawan Abdi , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.
- Magnis, Franz, *Suseno, Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
-----, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1988.

- , *Pemikiran Karl Marx dari Sosialis Utopis ke Peselisihan Revolusioner*, Jakarta: Gramedia, cet. v. 2001.
- Majid, Nurcholish Dkk., *Islam Universalitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Mannheim, Karl, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Martin, Rederik, *Sosiologi Kekuasaan*, Jakarta: Rajawali, 1990.
- Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisa Isi dan Analisis Data Sekunder*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Minhaji, Akh., *Strategies For Sosial Research: The Methodological Imagination In Islamic Studies*, Yogyakarta: Suka Press, 2009.
- Montgomery, William, *Watt Islam*, judul asli: *Islam, A Sort History*, alih bahasa. Imron Rosjadi, Yogyakarta: Jendela. 2002.
- Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kulitatif: Pendekatan Positifistik, Rasionalitatif, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, cet. III, Yogyakarta: Rake Sarin, 1996.
- Muhammad Nur, *NII (Negara Islam Indoneasia) No, NII (Negara Islam Indoneasia) Yes: Pergulatan Konsep Negara dalam Peradaban Islam Modern*, Yogyakarta: Suka Press, 2011.
- Mulyana, *Kajian Wacana: Teori, Metode & Prinsip-prinsip Analisis Wacana*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.
- Muttaqin, Ahmad, *Agama dalam perspektif Ideologi Media Massa*, Jurnal Komunika: Dahwah dan Komunikasi, Vol. 6 No 2, Juli-Desember 2012, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Purwokerto.
- Nurudin, *Komunikasi Propaganda*, Bandung: Rosda Karya, cet. III, 2008.

- Pardoyo, *Sekularisasi dalam Polemik*, Jakarta: Grafitipress, 1993.
- Pawito, *Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan*, Yogyakarta: Jalasutra, 2009.
- Qodir, Zuly, *Gerakan Sosial Islam: Manifesto Kaum Beriman*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Quraisy, Mujahid, *Dinamika Gerakan Ekonomi Islam di Indonesia*, Jurnal Studi Islam Mutakaddimah. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta no. 12, VIII tahun 2002.
- Raharjdo, M. Dahwam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 1999.
- Rahmat, M. Imdadun, *Arus Baru Islam Radikal: transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2005.
- Razak, Abdur, *Bias Ideologi dalam Pemberitaan Republika dan Kompas tentang Invansi Amerika Serika Terhadap Irak*. Jurnal Penelitian Agama: Media, Komunikasi, dan Penelitian Pengembangan Ilmu Agama. Vol. XII, NO. I. Januari-April 2004.
- Refleksi Ideologis Amad Sumargono, *"Saya Seorang Fundamentalis"*, Bogor: Global Citra Press, 1999.
- Rusli, M. Karim, *Negara dan Pemingiran Islam Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Saharudin, *Perkembangan Teknologi Kounikasi: Sebuah Pengantar*, Lombok Timur, LP2M IAI Qomarul Huda & Pustaka Akademika, 2011.
- Singaribun, Masri dan Sofian Effendi. Dkk, *Metode Penelitian Survai, edisi kedua*, Jakarta: LP3ES, 1987.

- Sobur, Alex, *Etika pres: Profesionalisme dengan Nurani*, Bandung: Humanioran Utama Press, 2001.
- , *Teks Media: Sebuah Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, Bandung: Rosdakarya, 2006.
- Subana, M. dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Sudibibyo, Agus, *Ekonomi, Politik, Media* PeSudibyo, Agus, *Ekonomi Politik Media Penyiaran*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Sudjana, Eggi, *Islam Fungsional*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Sumbulah, Umi, *Konfigurasi Fudamnetalisme Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Surapnata, Sumarna, *Analisis, Validitas, Realibilitas dan Interpretasi Hasil Tes Implementasi Kurikulum*, Bandung: Rosdakarya, 2004.
- Takwin, Bagus, *Akar-akar Ideologi; Pengantar Kajian Ideologi dari Plato hingga Bourdieu*, Yogyakarta: Jalasutra, 2003.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-undang No. 10 tahun 1998, Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992.
- Undang-undang No. 8 tahun 2010 Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-undang No. 9 tahun 2013 Republik Indonesia, Tentang Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Kompas, Jum'at, 3 Mei 2013.
- Usuluddin, Win, Bernadien (ed dan pen), *Dance of God, Tarian Tuhan*, Yogyakarta: Apeiron-Philotes, 2003.

Wijayatama, Redra, *Pengantar Periklanan*, Yogyakarta, Pustaka Book Publisher.

Winter, Jeffrey, *Dosa-dosa Politik Orde Baru*, Jakarta: Djambatan, 1999.

Yasraf., *Tranpolitika: Dinamika Politik di dalam Era Virtual*, Cet. II, Yogyakarta: Jalasutra, 2005.

Zuhairi Misrawi, *Pandangan Muslim Moderat : Toleransi, Terorisme, dan Oase Perdamaian*, Jakarta: Kompas, 2010.

<http://nasional.sindonews.com/read/2013/04/18/18/739345/islamofobia-dan-masa-depan-hubungan-Islam-barat>. Diakses pada 20 Februari 2013.

<http://islamlib.com> Jaringan Islam Liberal-IslamLib.com .htm. 6 Mei 2013.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

Nama : Budi Ayani
Tempat Tanggal Lahir : Air Rahu, Kinali 15 Februari 1988
Alamat Yogyakarta : Jl. Timoho Gg. Gading No 22 B. Ngentak Sapen,
Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281
Alamat Asal : Air Rahu, Enam Koto Selatan, Kec. Kinali, Kab.
Pasaman Barat, Sumatera Barat.
Email : ayanibudi30@gmail.com
No HP : 0852 7427 5823
Nama Orang Tua :
Ayah : Bakhatiar
Ibu : Daniyah

Jenjang Pendidikan

1. SD 25 Kinali tahun 2001
2. MTS Darusalam Pinagar, tahun 2005
3. Aliyah Tarbiyah Islamiyah Canduang, Bukittinggi, tahun 2008
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009-2013

Pengalaman Organisasi

1. Waki Sekretaris BEM Fakultas Syariah dan Hukum 2011-2013
2. Tim Ahli Pusat Studi dan Konsultasi (PSKH) 2013
3. Bergiat di Surau Tuo Institute Yogyakarta
4. GenBI (Generasi Baru Indonesia) 2012-2013

Pengalaman Riset:

1. Tim Survey Quick Count Pilgub Jawa Tengah 2013 Bersama SMRC
2. Surveyor SURVEI PELAYANAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN 2013 (SPKP 2013) PSKK UGM ditempatkan di Kota Kupang, TTS dan Sumba Barat Daya.
3. Surveyor Cartha Politika Indonesia September 2013 di Gunung Kidul
4. Surveyor SMRC di Karanganyar.

Hukum Berat Pelaku Kekerasan

Intelijen Tak Optimal di Sampang

JAKARTA, KOMPAS — Aparat penegak hukum harus meningkatkan budaya secara tegas dan adil dalam kasus kekerasan yang terjadi di Sampang, Madura, Jawa Timur. Pelanggaran perlu ditindak berat. Dengan cara ini, kekerasan tak mudah berulang lagi.

"Saya berharap aparat penegak hukum bisa tegas dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi di Sampang, Madura, Jawa Timur. Pelanggaran perlu ditindak berat. Dengan cara ini, kekerasan tak mudah berulang lagi."

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, aparat penegak hukum harus meningkatkan budaya secara tegas dan adil dalam kasus kekerasan yang terjadi di Sampang, Madura, Jawa Timur. Pelanggaran perlu ditindak berat. Dengan cara ini, kekerasan tak mudah berulang lagi.



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, aparat penegak hukum harus meningkatkan budaya secara tegas dan adil dalam kasus kekerasan yang terjadi di Sampang, Madura, Jawa Timur. Pelanggaran perlu ditindak berat. Dengan cara ini, kekerasan tak mudah berulang lagi.

Kelompok yang diduga terlibat dalam penyerangan di Sampang, Madura, Jawa Timur, perlu ditindak berat. Dengan cara ini, kekerasan tak mudah berulang lagi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, aparat penegak hukum harus meningkatkan budaya secara tegas dan adil dalam kasus kekerasan yang terjadi di Sampang, Madura, Jawa Timur. Pelanggaran perlu ditindak berat. Dengan cara ini, kekerasan tak mudah berulang lagi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, aparat penegak hukum harus meningkatkan budaya secara tegas dan adil dalam kasus kekerasan yang terjadi di Sampang, Madura, Jawa Timur. Pelanggaran perlu ditindak berat. Dengan cara ini, kekerasan tak mudah berulang lagi.

Hukum Berat Pelaku Kekerasan

Selasa 28 August 2012

(Berita dari halaman 1)

warga negara Indonesia yang harus dihukum oleh negara," ujarnya.

Almar Hilbert. Secara berurutan, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Saif Anji Saif, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Uin Saemudin, dan Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nur Khairi mengemukakan apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku kekerasan yang terjadi di Sampang, Madura, Jawa Timur.

terjadi insiden semacam ini, kekerasan yang kita sadari itu," ujar Yudhoyono. Mengingat insiden ini terjadi yang harus dipertimbangkan, Kepala BIN Marizano Siagian mengatakan, intelijen harus lebih baik dan perlu memperkuat potensi ketegasan soal.

Presiden Yudhoyono menilai kasus di Sampang bisa terjadi karena aparat penegak hukum kurang optimal dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi di Sampang, Madura, Jawa Timur. Pelanggaran perlu ditindak berat. Dengan cara ini, kekerasan tak mudah berulang lagi.

Presiden Yudhoyono menilai kasus di Sampang bisa terjadi karena aparat penegak hukum kurang optimal dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi di Sampang, Madura, Jawa Timur. Pelanggaran perlu ditindak berat. Dengan cara ini, kekerasan tak mudah berulang lagi.

Presiden Yudhoyono menilai kasus di Sampang bisa terjadi karena aparat penegak hukum kurang optimal dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi di Sampang, Madura, Jawa Timur. Pelanggaran perlu ditindak berat. Dengan cara ini, kekerasan tak mudah berulang lagi.

YUHI LATIF
Pembina Korpri dan Korpri

021-50111022/04
47016K/JAM/PT/090/120

POLITIK & HUKUM

Keterangan Pers soal Sampang



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan keterangan pers mengenai kekerasan di Sampang, Jawa Timur, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/8). Presiden mengatakan, kekerasan di Sampang yang melibatkan kelompok Sunni dan Syiah tersebut terjadi karena lemahnya fungsi intelijen untuk mendeteksi potensi konflik. **Berita di Halaman 1**

ADVOKAT
Denny Dipros Hukum
JAKARTA, Menteri Hukum dan Peradilan Denny Soeryadarmo mengatakan, kekerasan yang terjadi di Sampang, Madura, Jawa Timur, merupakan pelanggaran berat. Dengan cara ini, kekerasan tak mudah berulang lagi.

KEKERASAN DI SAMPANG

Selamatkan Mereka yang Terancam

JAKARTA, KOMPAS — Kekerasan yang dialami kelompok Syiah di Desa Karang Gayam, Kecamatan Onken, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, sebenarnya tidak akan mungkin apabila diarahkan sejak awal. Namun, saat sudah menjadi budaya. Kini yang harus dilakukan adalah penegakan hukum secara tegas. "Ketertarikan ini merupakan orang-orang yang terancam. Tidak boleh ada pengalihan nilai rakyat untuk rakyat. Itu adalah," ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MDi Selasa (28/8).

Hingga kemarin, 235 warga terancam ke gedung Lapangan Tennis Indoor Sampang. Sebanyak 39 orang mulai terancam penyakit, utamanya berupa gangguan pernapasan dan diare, karena debu, etes dan kurangnya fasilitas di tempat pengungsian. "Mereka sudah lebih dari satu hari di pengungsian, pusing begini pikiran, dan kondisi fisik juga lemah," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Friantri Priy Abadi. Pengungsi yang sakit mendapat perawatan di posko kesehatan.

Sejak terjadi kekerasan pada Minggu lalu, ratusan warga terpaksa mengungsi. Selasa siang ada 235 pengungsi, terdiri dari 61 pria, 64 perempuan, 86 anak-anak, dan 24 anak balita. Jumlah pengungsi dapat terus bertambah karena ada warga yang belum dievakuasi dari tempat kejadian.

Lihat Video Terkait "Konflik Sampang" di vod.kompas.com/konflikSampang BACA JUGA HAL 2

malam lalu, banyak pengungsi kesulitan pada malam hari. Seorang pengungsi, Iki (40), mengatakan anaknya, Ali Zaenal Abidin GB, meninggal diare. "Sejak penyerangan itu, anak saya sering tidak mau makan. Kalau tidur juga kebingungan. Tetapi sekarang sudah sembuh setelah diberi obat," katanya.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Jawa Timur Andy Irfan Junaldi, selaku pendamping pengungsi, menambahkan, anak-anak pengungsi juga butuh sekolah. "Sebenarnya mulai minggu ini mereka sudah masuk sekolah. Ada 60 anak usia SD dan SMP," katanya.

Menurut Mahfud, konflik di Sampang sebenarnya tak akan meledak apabila diarahkan sejak awal. Semua warga diminta tidak bertindak sewenang-wenang terhadap golongan minoritas. "Yang paling esensial itu saling toleran," katanya.

Apalagi, menurut Ketua Umum Forum Keadilan dan Hak Asasi Umat Beragama (ForKagama) Jawa Tengah KH Arifin Husain alias Gus Nuril, yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Soko Tunggal di Sendanggunem, Tembung, Semarang, setiap kasus pernyalaan terhadap umat beragama, sekecil apa pun, merupakan tanggung jawab negara dalam melindungi warganya. Presiden tidak masuk akal kalau hanya menyatakan kasus di Sampang hanya kelainan insidien tanpa bertindak menegak pejabat instansinya yang disebut koruptif.



Seorang penjaga diarahkan untuk memeriksa...

KontraS

Fenomena Kekerasan di Sampang

P

eristiwa penyerangan di Sampang, Madura, Jawa Timur, merupakan fenomena kekerasan yang penanganannya perlu mendapat perhatian khusus.

Lebih-lebih karena serangan itu berlatarbelakangi tradisi dari segi komunalitas dan berpengaruh negatif terhadap kehidupan bermasyarakat sebagai warga bangsa. Paling tidak, 2 warga tewas, 37 rumah dibakar, dan 235 warga terpaksa mengungsi. Kejadian Minggu, 28 Agustus, yang dituntut sampai tuntas atas peristiwa pembunuhan pengungsi di lokasi yang sama 24 Desember 2011.

Kekerasan di Sampang memiliki kompleksitas dan sensitivitas dari perspektif hak asasi manusia dari prinsip kehidupan bersama dalam spektrum negara-bangsa yang berlandaskan Pancasila. Atas peristiwa kekerasan yang menimpa korban jiwa dan kerugian materi yang tidak bisa diukur, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan rapat kabinet terbatas dan memberikan keterangan pers.

Sorela jelas Presiden menilai kinerja intelijen kurang optimal dan meminta aparat menegakkan hukum secara tegas dan adil agar tidak terulang peristiwa kekerasan seperti ini. Pemerintah juga terharu ketika Kepala Polri Jenderal (P) Timur Pradopo, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kepala Badan Intelijen Negara Letnan Jenderal Maritano Norman, dan Menteri Agama Suryadharma Ali mengutarakan lokasi kejadian.

Kunjungan sejumlah pejabat tinggi ke lokasi kejadian sangat menarik perhatian karena berlangsung di tengah-tengah perkembangan dugaan tentang kemungkinan negara melakukan pembatasan terhadap kekerasan. Peran pemerintah memang disoroti dalam kasus kekerasan di Sampang. Sorotan lebih terakut dengan peran dan tanggung jawab pemerintah melindungi warga negara sesuai dengan amanat konstitusi.

Pemerintah sebagai pelaksana kedaulatan negara berperan dan bertanggung jawab melindungi warga negara yang kesulitan dan terancam tanpa membedakan warna kulit, suku, agama, keyakinan, bahasa, dan asal-usul. Tugas perlindungan itu dapat saja dijalankan pemerintah dengan menggunakan kekuatan bala tentara sebagai instrumen melindungi warga yang tidak tahu hukum dan memaksa warga melakukan kewajiban hukum.

Hanya negara yang mempunyai monopoli khusus dalam menggunakan kekerasan untuk meniadakan dan menanggulangi warga yang melanggar hukum dan tidak melaksanakan kewajiban. Jalan pada, tidak ada warga atau kelompok yang berhak melakukan kekerasan atas nama apa pun. Kekerasan yang dilakukan warga harus ditindak tegas dan dituntaskan.

Namun, perlu diperhatikan pula, kekerasan tidak dapat dipandang sewenang-wenang dalam alam negara demokrasi. Lebih-lebih karena kekerasan bukanlah substansi kemanusiaan karena menggunakan kekuasaan merupakan ancaman terhadap keberagaman dan kerukunan.

232 dan ratusan pengungsi...

 BACA JUGA HAL 1

KONFLIK SOSIAL

Selesaikan Kasus Kekerasan di Sampang secara Konstruktif

JAKARTA, BIMPAS — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil agar tidak terulang peristiwa kekerasan seperti ini. Pemerintah juga terharu ketika Kepala Polri Jenderal (P) Timur Pradopo, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kepala Badan Intelijen Negara Letnan Jenderal Maritano Norman, dan Menteri Agama Suryadharma Ali mengutarakan lokasi kejadian.

Kunjungan sejumlah pejabat tinggi ke lokasi kejadian sangat menarik perhatian karena berlangsung di tengah-tengah perkembangan dugaan tentang kemungkinan negara melakukan pembatasan terhadap kekerasan. Peran pemerintah memang disoroti dalam kasus kekerasan di Sampang. Sorotan lebih terakut dengan peran dan tanggung jawab pemerintah melindungi warga negara sesuai dengan amanat konstitusi.

Pemerintah sebagai pelaksana kedaulatan negara berperan dan bertanggung jawab melindungi warga negara yang kesulitan dan terancam tanpa membedakan warna kulit, suku, agama, keyakinan, bahasa, dan asal-usul. Tugas perlindungan itu dapat saja dijalankan pemerintah dengan menggunakan kekuatan bala tentara sebagai instrumen melindungi warga yang tidak tahu hukum dan memaksa warga melakukan kewajiban hukum.

Hanya negara yang mempunyai monopoli khusus dalam menggunakan kekerasan untuk meniadakan dan menanggulangi warga yang melanggar hukum dan tidak melaksanakan kewajiban. Jalan pada, tidak ada warga atau kelompok yang berhak melakukan kekerasan atas nama apa pun. Kekerasan yang dilakukan warga harus ditindak tegas dan dituntaskan.

Namun, perlu diperhatikan pula, kekerasan tidak dapat dipandang sewenang-wenang dalam alam negara demokrasi. Lebih-lebih karena kekerasan bukanlah substansi kemanusiaan karena menggunakan kekuasaan merupakan ancaman terhadap keberagaman dan kerukunan.

SUMBER DAYA ALAM
 Demam Emas di Tengah Taman Nasional

Selesaikan Kasus Kekerasan di Sampang secara Konstruktif
 (Lanjutan dari halaman 1)

Kawatir (30) pengungsi dari Desa Karang Gayam, Kecamatan Onken, misalnya, mengaku bekerja sebagai buruh lahan benih dan memiliki empat sapi. Saat kekerasan berlangsung, Minggu (28/8), Kawatir hendak memanen tembakau.

"Saya ingin tetap tinggal di sini karena dapat uang di sini, tetapi kami juga masih takut," kata Kawatir. Sejak kasus kekerasan di Sampang pertama kali terjadi pada Desember 2011 hingga pelepasan kasus kekerasan kedua pada Minggu lalu, Kawatir mengaku sering mendapat ancaman.

Jumlah pengungsi terdampak 235 orang. Mereka mengungsi ke gedung Lapangan Tennis Indoor Sampang. Namun, pengungsi mendapatkan minumannya kesulitan. Terkait dengan hal itu, kata Soekrawo, pihaknya sudah meminta izin Menteri Dalam Negeri untuk mengizinkan dan dari anggaran bencana daerah sebesar Rp 70 juta. Dana ini untuk menyediakan kebutuhan harian para pengungsi selama 14 hari. Presiden pun, menurut Julian, meminta agar penyelesaian kemanusiaan bagi pengungsi mendapat perhatian besar.

Redam situasi panas

Selamatan untuk Anti-Korupsi pada Jumat (24/8) di Sampang (GAKES) meminta tokoh-tokoh agama dan masyarakat setempat meredakan situasi panas dan menciptakan perdamaian, bukan justru memburu kekerasan.

"Kami juga meminta negara melakukan upaya pemulihannya kepada para korban, baik fisik, psikologis, keadilan, maupun ketidakterlindungannya kejadian kekerasan," kata Ahmad Zaimi Haniif, Kepala Departemen Hutan dan Adakasi CMA3S Surabaya, yang mewakili SAKZSS.

Seliditnya 28 komunitas wa-

KEKERASAN SAMPANG

Polisi Tangkap 1 Tersangka

kanis 6 sept 2012

SURABAYA, KOMPAS — Kepolisian Daerah Jawa Timur menetapkan seorang tersangka baru dalam kasus kekerasan di Sampang, Madura, Jawa Timur. Tersangka itu berinisial SP dan ditangkap polisi pada Selasa (4/9), pukul 03.00, di rumahnya, Desa Karang Gayam, Kecamatan Ormben, Sampang.

"Ada pengakuan dan barang bukti yang disita polisi," ujar Kepala Hilang Humas Polda Jatim Komisaris Besar Hilman Thayib di Kota Surabaya, Rabu. Sebelum SP Polda Jatim telah menetapkan satu tersangka, yakni Hois Al Hikama yang diduga menjadi otak pembakaran dan kekerasan terhadap warga Syiah di Sampang. SP bersama dengan Hois diduga membakar rumah warga.

Kekerasan terjadi 26 Agustus. Warga Syiah di Desa Karang Gayam diserang massa. Dua warga tewas, enam orang terluka, 205 orang mengungsi, dan 37 rumah dibakar (Kompas, 27/8).

Menurut Hilman, polisi terus mengembangkan penyelidikan dan tidak tertutup kemungkinan ada tersangka baru. SP kini diperiksa intensif di Polda Jatim. Untuk Hois, berkasnya dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jatim, Rabu.

Hilman menambahkan, terdapat sekitar 1.000 personel Polda Jatim dan Polres Sampang yang mengamankan Sampang. Kondisi

di Sampang pun berangsur normal meskipun pengungsi masih di tempat penampungan di lapangan tenis Sampang.

Menolak pindah

Sebelumnya, Gubernur Jatim Soekarwo menyatakan siap menjamin kebutuhan dan keamanan pengungsi. Pemerintah Provinsi Jatim menyiapkan lokasi penampungan baru yang lebih layak dan menandatangani Rp 700 juta untuk penempatan pengungsi itu selama 14 hari.

Sekarwo menegaskan, tidak akan merelokasi warga Syiah sebagai jalan keluar dari kasus kekerasan itu. Penyelesaian lebih ditekankan pada pendekatan dialogis di antara warga yang berbeda pendapat itu.

Dari Sampang, warga korban kekerasan menolak tawaran hunian sementara di Jemundo, Kabupaten Sidoarjo, yang disiapkan Pemprov Jatim. Mereka memilih segera kembali ke kampung halaman dan minta penjagaan dari kepolisian.

"Kalau kami keluar dari Sampang, walau cuma sebentar, kami akan semakin ditolak oleh mereka, saat kami kembali ke Sampang," kata Hidi Almilal, pengungsi dan saudara pemimpin Syiah di Sampang, Tajul Muhiq, Rabu. Mereka bertekad tidak meninggalkan Sampang. (ILO/DEN)

KASUS SAMPANG 5 Sept 2012

Pemprov Jatim Siapkan Hunian Sementara

sa Kalijaga, Kudus, dan Kacamatan Janti di sisi itu mengabdikan, dan memangguk, KUNIK, DUREG/EN

SURABAYA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan rumah susun sementara sebagai tempat tinggal sementara bagi pengungsi korban kekerasan di Sampang, Jawa Timur. Pengungsi diharapkan mau pindah sementara ke rumah susun di Jemundo, Kabupaten Sidoarjo, Jatim, itu karena pos pengungsian saat ini tidak layak.

"Sekali lagi ini bukan relokasi. Pengungsi dapat pindah sementara ke tempat yang lebih layak sampai mereka siap kembali ke kampung halamannya," kata Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf, Selasa (4/9). Rumah susun masih baru dan dapat dihuni hingga 90 keluarga. Jumlah pengungsi 62 keluarga atau 260 jiwa.

Sejak Minggu (26/8), pengungsi tinggal di gedung Lapangan Tenis Indoor Sampang, Kabupaten Sampang. Di tempat itu, pengungsi tidur di lapangan tenis yang diberi alas karpet dan tanpa sekat. Beberapa pengungsi ter-serang gangguan pernapasan, diare, dan herpes.

Saifullah menilai, pos pengungsian itu sangat tidak sehat. Masjid diomong, rencana pemindahan ke tempat tinggal sementara bergantung pada keputusan pengungsi. "Kalau mereka mau, kami siap fasilitasi. Kalau tidak mau, kami tidak memaksa. Itu hak mereka," ujar Saifullah.

La mengatakan, penindahan ke tempat tinggal sementara ini merupakan solusi jangka pendek yang terbaik. Alasannya, pembangunan rumah yang dibakar saat terjadi penyerangan akan membutuhkan waktu lama. Selain menyediakan anggaran

yang besar, pembangunan rumah warga itu harus dilakukan setelah situasi keamanan kembali pulih.

Di tempat terpisah, Gubernur Jatim Soekarwo juga menegaskan, tidak akan merelokasi pengungsi Syiah untuk mengatasi permasalahan di Sampang. Hois yang dituduh pembakaran adalah penyelesaian secara dialogis dengan mempertemukan berbagai pihak yang berkepentingan.

"Saya tak setuju direlokasi. Saya akan mencoba mereka berdialog. Prinsipnya yang mengungsi dan mereka yang berbeda pendapat harus bertemu, duduk bersama memusatkan penyelesaian," ujar Soekarwo.

Sekarwo juga akan memohon Menteri Agama Suryadharma Ali pada 10 September guna membahas penyelesaian kasus Sampang. Semua tokoh agama diminta melakukan pendekatan komunalis terhadap warga di Sampang.

Pemerhati anak Seto Mulyadi menilai perlu ada tempat tinggal sementara bagi pengungsi. "Bagi anak, hidup di tempat pengungsian seperti ini menimbulkan dampak psikologis yang sangat serius," katanya sesuai kunjungan lokasi pengungsian.

Sekarwo memastikan, pihaknya akan terus memenuhi kebutuhan dan menjamin keamanan pengungsi. Pemprov Jatim telah mengalokasikan Rp 700 juta untuk penempatan pengungsi di Sampang selama 14 hari terhitung dari akhir Agustus.

"Kami sudah menawarkan tempat yang ada kamarnya, tetapi semua tergantung pengungsi. Polikornya kita carikan tempat yang layak," ujar Soekarwo. (DRE/ULO)

6 September 2012: opini
6 September 2012:

Meredam Kekerasan Sektarian

kanis 6 sept 2012

Oleh FAJAR RIZA UL HAQ



Waspada eskalasi

antara kelompok/organisasi Islam pasca-kelompok abangan kehilangan kekuatannya. Aksi penyerangan kelompok tertentu terhadap kampung pengikut Tarekat At-Tijaniyah salah satu contohnya. Kedua, model pemahaman Salafisme dan Wahabisme dari jalur penyebarhan Timur Tengah bereproduksi di institusi-institusi pendidikan keagamaan dalam negeri.

Kedua ideologi ini dikenal menolak prinsip-prinsip politik kewarganegaraan menjadi fondasi bagi sebuah negara demokratis. Aras baru inilah yang menggerakkan Islamisasi di level akar rumput yang sebelumnya diarsitoki organisasi seperti NU dan Muhammadiyah.

Karena itu, pemerintah harus segera serius memetakan kebijakan dan strategi komprehensif dalam menanggapi berkembangnya kekerasan sektarian sebelum bertumbuh lebih jauh. Perlu penanganan yang lebih baik. Terlebih, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengakui, selama ini upaya penyelesaian persoalan konflik berlatar belakang agama tidak pernah tuntas.

Tak mengherankan apabila mengungkap intoleransi, bahkan kekerasan dalam kehidupan beragama, menjadi aksi lain yang gelap pada saat citra ekono-mi-politik Indonesia bersinar di kawasan Asia bahkan global. Ketidaksihan terobosan kebijakan politik dalam pengelolaan keberagaman bangsa akan berakibat pada memburuknya ancaman eskalasi konflik sektarian. Kondisi ini akan semakin buruk jika konflik itu diberikan beresalasi dan dipaparkan demi kepentingan politik dan keamanan.

FAJAR RIZA UL HAQ
Direktur Eksekutif Almarif Institute
for Culture and Humanity

Pesta ketupat belum usai, kekerasan sektarian sudah merenggut keceriaan komunitas Syiah, Sampang. Lebih ironis, perkampungan sebuah tarekat di Sukabumi dibakar tepat pada hari raya. Ratusan orang dipaksa mengungsi.

Pemerintah sudah membuat kesimpulan, konflik berlatar itu lebih bersumber pada perpelehan keluarga. Motif perpelehan aliran Suni-Syiah bukanlah faktor dominan. Menurut pihak kepolisian, aksi kekerasan yang menimpa komunitas Syiah merupakan kriminal murni. Pandangan ini dikuatkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Bahkan, Ketua Umum PBNU mengeluarkan pernyataan senada (Kompas.com, 28/8).

Namun, cukup banyak pihak meragukan temuan pemerintah tersebut mengingat aksi teror terhadap komunitas Syiah di Jawa Timur berlangsung sistematis. Menurut pimpinan Pondok Pesantren YAPI, Bangil, aksi intimidasi bahkan anarkis terhadap pengikut Syiah mulai dirasakan sejak tahun 2007. Kelompok anti-Syiah menebarkan kebencian melalui pelbagai media, terutama pengajian, dan tidak jarang mereka melakukan teror, seperti hujatan dan pelemparan. Laporan-laporan pengurus pesantren terkait aksi teror tersebut tidak mendapat tanggapan dari pihak kepolisian dan pemerintah.

Derajat demikian, mengupayakan penyelesaian kekerasan terhadap komunitas Syiah dalam kerangka konflik keluarga dan

kriminal murni mereduksi akar persoalan dan faktor pemicu teror kekerasan. Mengikuti pendekatan studi sektarianisme yang dilakukan Rikonen (2007) di Pakistan, kita sudah seharusnya cemas dengan adanya gejala kekerasan sektarian di negara yang menjadikan kebencian sebagai prinsip berbangsanya. Sektarianisme selalu berhubungan dengan sikap fanatisme keagamaan kelompok sehingga ikut memengaruhi keyakinan dan tindakan pemeluknya ketika berjumpa dengan kelompok yang berbeda.

Dalam konteks ini, kekerasan sektarian itu sering kali menjadi bagian dari ritual yang justru dilakukan di tempat suci, seperti mesjid, dan kesempatan mulia, seperti ceramah keagamaan. Pada dasarnya, tindakan menyebarkan kebencian-bencian dan permusuhan terhadap kelompok yang dianggap berbeda dan sesat sudah memasuki ranah kekerasan sektarian. Proses di tahap inilah yang bisa memacu satu kelompok melakukan kriminalisasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda secara pandangan keagamaan.

Banyak kasus memperlihatkan betapa kelompok minoritas, baik dalam satu agama maupun beda agama, sangat rentan menjadi korban intoleransi dan kriminalisasi. Tidak adanya tindakan hukuman terhadap pelaku kekerasan akan memancing aksi serupa di tempat lain, baik oleh kelompok yang sama maupun dari pihak kelompok korban. Adanya upaya propaganda anti-Syiah secara internal seperti

diungkap pimpinan Pesantren YAPI di atas menjadi bukti bahwa akar persoalan konflik di Sampang adalah gejala kekerasan sektarian.

Penulis melihat kemunculan konflik sektarian merupakan dampak dari Islamisasi yang kini mengakar di kalangan masyarakat Muslim, khususnya di Jawa. Bidefisi memahami Islamisasi sebagai proses pendalaman komitmen untuk hidup sesuai dengan standar kepercayaan normatif Islam, praktik, dan identitas keagamaan. Pada kenyataannya, rumusan standar Islamisasi adalah suatu yang dipersebutkan, baik di antara individu maupun kelompok. Inilah isu yang sangat krusial dan menyeruak ke ruang publik, siapa dan kelompok mana yang punya otoritas menentukan kebenaran dan ke-murnian ajaran agama.

Dalam *Islamisation and Its Opponents in Asia* (2012), sejarawan terkemuka ini menemukan fakta bahwa telah terjadi pendalaman Islamisasi di kalangan kelompok-kelompok suatru seiring kebalikan kelompok abangan. Kebijakan politik Orde Baru salah satu faktor utamanya. Kini, pengaruh kalangan suatru kian dominan di birokrasi negara dan masyarakat, yang menyingsingkan kelompok abangan yang mayoritas pada awal kemerdekaan.

Pertanyaan kemudian, kenapa fenomena pendalaman Islamisasi berkebalikan dengan menguatnya gejala konflik sektarian? Pertama, perebutan otoritas atas tafsir ajaran agama kian terbuka dan bersa di

Solusi Konflik SARA

Oleh AM FATMA

Konflik antara SARA-sARA, agama, ras, dan etnis merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Kita sebagai bangsa yang berkeadilan harus mampu mengelola konflik ini dengan baik. Kita sebagai bangsa yang berkeadilan harus mampu mengelola konflik ini dengan baik.

Negara wajib hadir... Untuk itu, pemerintah harus hadir untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di masyarakat.



menjadi konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. Kita sebagai bangsa yang berkeadilan harus mampu mengelola konflik ini dengan baik.

Untuk itu, pemerintah harus hadir untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. Kita sebagai bangsa yang berkeadilan harus mampu mengelola konflik ini dengan baik.

Terdapat tiga jenis konflik yang terjadi di masyarakat. Pertama, konflik yang terjadi di tingkat individu.

Kedua, konflik yang terjadi di tingkat kelompok. Ketiga, konflik yang terjadi di tingkat nasional.

Pada dasarnya, konflik adalah perbedaan pendapat atau kepentingan antara dua pihak atau lebih.

Salah satu penyebab konflik adalah perbedaan pendapat atau kepentingan antara dua pihak atau lebih.

Salah satu penyebab konflik adalah perbedaan pendapat atau kepentingan antara dua pihak atau lebih.

Kedua, konflik yang terjadi di tingkat kelompok. Ketiga, konflik yang terjadi di tingkat nasional.

Pada dasarnya, konflik adalah perbedaan pendapat atau kepentingan antara dua pihak atau lebih.

Salah satu penyebab konflik adalah perbedaan pendapat atau kepentingan antara dua pihak atau lebih.

Salah satu penyebab konflik adalah perbedaan pendapat atau kepentingan antara dua pihak atau lebih.

Kedua, konflik yang terjadi di tingkat kelompok. Ketiga, konflik yang terjadi di tingkat nasional.

Pada dasarnya, konflik adalah perbedaan pendapat atau kepentingan antara dua pihak atau lebih.

Salah satu penyebab konflik adalah perbedaan pendapat atau kepentingan antara dua pihak atau lebih.

Salah satu penyebab konflik adalah perbedaan pendapat atau kepentingan antara dua pihak atau lebih.

Kedua, konflik yang terjadi di tingkat kelompok. Ketiga, konflik yang terjadi di tingkat nasional.

Pada dasarnya, konflik adalah perbedaan pendapat atau kepentingan antara dua pihak atau lebih.

Salah satu penyebab konflik adalah perbedaan pendapat atau kepentingan antara dua pihak atau lebih.

KEKERASAN SAMPANG

Jumat 7 sep 12

Jangan Abaikan Solusi Kultural

SURABAYA, KOMPAS — Pemerintah pusat dan daerah perlu memberikan perhatian lebih besar tidak hanya untuk membatasi rekonsiliasi antarpihak, tapi juga mencari solusi kultural agar kasus kekerasan di Sampang, Madura, Jawa Timur, tidak terulang.

"Solusi yang lebih spesifik ini harus dirumuskan karena perselisihan antarkelempok sudah dua kali terjadi di Sampang. Kenapa konfliknya di Sampang? Karena ada hal berdimensi kultural yang tak ada di daerah lain," kata Priyatmoko, pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga Surabaya, di sela-sela diskusi bertajuk "Penyelesaian Kasus Sampang", di Surabaya, Kamis (6/9).

Dikatakan, solusi dialogis dan kultural yang dihasilkan harus berjangka panjang. Untuk itu perlu pengondisian masyarakat dengan melibatkan berbagai tokoh yang ada. Relokasi bukanlah jalan keluar yang tepat karena akan menjadi pembedaan bagi kaum mayoritas untuk mengusir minoritas.

Dalam diskusi yang dipagawai Pusat Studi Hak Asasi Manusia Unair ini dihadiri oleh berbagai tokoh dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), akademisi, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat.

Diskusi publik menghasilkan delapan rekomendasi. Itu antara lain penyelesaian kasus Sampang utamakan musyawarah melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah, dan kepolisian. Aparat negara harus membatalkan pelaksanaan hukum yang adil, termasuk kepada minoritas.

Ketua FKUB Surabaya Imam Ghazali Said mengatakan, pemerintah jangan memihak kepada kelompok mayoritas ataupun minoritas dalam penyelesaian konflik kekerasan. "Semua kelompok harus diperlakukan setara dan semua pihak diajak dialog," kata Ghazali.

Menurut Wakil Ketua Pengurus Wilayah NU Jatim Shiddiq Abdurrahman, untuk menyikapi perbedaan harus dilakukan dengan cara berdamai, bukan kekerasan seperti terjadi di Sampang. Apa pun alasannya cara kekerasan tak dibenarkan. (ILO)

Toleransi terhadap Intoleransi

Oleh BENNY SUSEPTO

8 Sep 2012

Salah satu penyebab konflik adalah perbedaan pendapat atau kepentingan antara dua pihak atau lebih.

Salah satu penyebab konflik adalah perbedaan pendapat atau kepentingan antara dua pihak atau lebih.

Salah satu penyebab konflik adalah perbedaan pendapat atau kepentingan antara dua pihak atau lebih.

Salah satu penyebab konflik adalah perbedaan pendapat atau kepentingan antara dua pihak atau lebih.

Salah satu penyebab konflik adalah perbedaan pendapat atau kepentingan antara dua pihak atau lebih.

Salah satu penyebab konflik adalah perbedaan pendapat atau kepentingan antara dua pihak atau lebih.

Merturut laporkan, Setan Institute, dalam laporan Januari-Juni 2012, terdapat 129 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama yang menyasar di 22 provinsi.

Salah satu penyebab konflik adalah perbedaan pendapat atau kepentingan antara dua pihak atau lebih.

Salah satu penyebab konflik adalah perbedaan pendapat atau kepentingan antara dua pihak atau lebih.

Salah satu penyebab konflik adalah perbedaan pendapat atau kepentingan antara dua pihak atau lebih.

Salah satu penyebab konflik adalah perbedaan pendapat atau kepentingan antara dua pihak atau lebih.

Salah satu penyebab konflik adalah perbedaan pendapat atau kepentingan antara dua pihak atau lebih.

Salah satu penyebab konflik adalah perbedaan pendapat atau kepentingan antara dua pihak atau lebih.

Salah satu penyebab konflik adalah perbedaan pendapat atau kepentingan antara dua pihak atau lebih.

Salah satu penyebab konflik adalah perbedaan pendapat atau kepentingan antara dua pihak atau lebih.

Salah satu penyebab konflik adalah perbedaan pendapat atau kepentingan antara dua pihak atau lebih.

Salah satu penyebab konflik adalah perbedaan pendapat atau kepentingan antara dua pihak atau lebih.

Salah satu penyebab konflik adalah perbedaan pendapat atau kepentingan antara dua pihak atau lebih.

Salah satu penyebab konflik adalah perbedaan pendapat atau kepentingan antara dua pihak atau lebih.

Salah satu penyebab konflik adalah perbedaan pendapat atau kepentingan antara dua pihak atau lebih.

Salah satu penyebab konflik adalah perbedaan pendapat atau kepentingan antara dua pihak atau lebih.

POJOK

Angelina Sondakh terancam hentikan hidup di bui. *Tentang saja Bu, grint koruptor masih bermula*

Kanopi gerbang stadion tenis PON XVIII Pekanbaru rebul. *Bukan simbol rebulnya olahraga kita, kan?*

Wapex: birokrat jangan perlaya diri. *Nabung aja yang banyak!*

MA promusikan hakim yang terlibat dugaan mafia peradilan. *Sebut saja majelis mafia!*

mang kil



Bentrok Kelompok Sampang Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) (dekat Kasim Birni) dan Koordinator Komnas HAM Rutia Setih, Selasa (28/8), mendiskusikan pemertintah mengungkap memunculkan serta melakukan penanganan kerusuhan bentrok antara kelompok Syiah dan anti Syiah di Dusun Sampang, Karang Gayam, Sampang, Madura.



Penyerangan Ahmadiyah di Jawa Barat dan Penyerangan Geraja di Temanggung Jawa Tengah Kompas

4 Aturan KPU Direvisi

Pemerintah Mengecam

Kekerasan di Cikeusik, Tiga Jemaah Ahmadiyah Tewas

PANDEGLANG, KOMPAS — Tiga warga tewas dan tujuh orang luka menyusul kekerasan yang terjadi di Kampung Peundeuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang, Banten, Minggu (6/2). Pemerintah mengecam keras kekerasan itu dan menjanjikan tindakan tegas terhadap pelakunya.

amanikan aset warga Ahmadiyah di Cikeusik. "Kita tidak bisa menoleransi kekerasan yang terjadi. Polisi akan menindak tegas dan mencari serta menangkap pelaku," kata Timus.

Informasi yang dihimpun Kompas, penampakan massa sudah mulai terjadi sekitar pukul 0900. Ketika itu ribuan warga dari beberapa kecamatan di Pandeglang mendatangi Kampung Peundeuy. "Perkiraan jumlah warga yang datang sekitar 2.000 orang," kata Kepala Kepolisian Sektor Cikeusik Ajun Komaris Mad Supar.

Warga yang berdatangan berdatuk kemalaman berhitung dengan beberapa orang yang berada di dalam rumah milik Supeman, warga Kampung Peundeuy yang menjadi pengikat Ahmadiyah.

Kemudian terjadi bentrok yang mengakibatkan tiga warga tewas dan tujuh orang luka-luka. Pemerintah menyebut enam terduga, Kertan Leman adalah Rini (warga Jakarta) serta Mulyadi dan Tarsu, warga Peundeuy, Cikeusik. Korban terduga adalah Apis (26) warga Serang, Delen Sujana (39) warga Bekasi, Beidi (40) warga Jakarta Barat, Dian (39) warga Bogor, Ahmad Masitani (22) warga Peninggilan, Yayan Hadi Wijaya (33) warga Pandeglang, dan Sarta warga Pandeglang.

Beberapa warga Peundeuy mengaku tak tahu soal ribuan warga yang mendatangi kampungnya Minggu pagi itu. "Kami hanya menonton," kata Dalang, seorang warga.

Pemertanian Minggu petang kembali Kampung Peundeuy terasng Kepala Badan Penertanian dan Ciman Petik Komunitas Desa Bayu Ruli Anas mengatakan, dia sempat sputus Petik Kepolisian Daerah Banten dan 1 kampu. Semasa Kejayaan Negeri Pandeglang menggunakan dan melalukan berbagai bentuk perlawanan itu, KARANG, TER, (2011)

Presiden: Cari Pihak yang Bertanggungjawab



Susilo Bambang Yudhoyono

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan bahwa pemerintah akan mencari pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan di Cikeusik. "Kita akan mencari siapa yang bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi di Cikeusik, Banten, Minggu (6/2) malam, menyatakan, pemerintah meminta Polri mencari dan menangkap semua pelaku kekerasan tersebut. Tuntutan buntut dalam pertemuan tersebut Kepala Polri Jenderal (Pj) Timor Pradopo, Menteri Dalam Negeri Gunawan Priat, Menteri Agama Suryadharma A, dan Juru Agung Harjo Aso.



Negara Gagal Lindungi Warga

Polri harus bergerak cepat. Siapa yang melakukan kekerasan, apalagi membunuh, harus segera ditangani, diadili," tutur dia.

Ketua Komisi III DPR Benny K Harman juga meminta Kepala Polri mengambil sikap tegas dengan mengambil langkah hukum terhadap pelaku kekerasan.

Agak sulit

Suryadharma menanggapi, banyak yang menaruhkan kerapi pemerintah tidak tegas dalam kasus Ahmadiyah. "Ada pertengahan yang agak sulit untuk dilemakan. Namun, ini bukan dibiarkan," kata Menteri Agama.

Menurut Suryadharma, pemerintah lebih memprioritaskan dialog. "Dengan demikian, saudara kita, jemaah Ahmadiyah itu bisa kembali menjadi Islam yang benar. Seperti di Banten, ada jemaah Ahmadiyah yang kembali, yakni di Desa Cicerek, Kecamatan Cicuta, Jumlahnya 26 keluarga kurang lebih dari 50 orang. Ini kan positif," tuturnya.

Ia melanjutkan, "Pemerintah pada masa lalu lebih mengutamakan dialog agar mereka kembali. Inya Allah dalam waktu dekat akan ada keputusan yang akan diambil pemerintah, yang tepat sebagai solusi permanen."

Di Jakarta, tokoh agama meminta pemerintah melindungi semua warga, termasuk kelompok minoritas agama, seperti jemaah Ahmadiyah. "Sebagai warga negara, Ahmadiyah harus di-

Polri Tetapkan Satu Tersangka

Ahmadiyah Mengadu ke Komnas HAM

SERANG, KOMPAS — Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan seorang tersangka, berinisial U, dalam kasus kekerasan terhadap warga Ahmadiyah di Kampung Peundeuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten. U disebut berperan dalam membunuh warga Ahmadiyah dan menyuruh pembakaran mobil.

Pemertanian terhadap sejumlah saksi, Selasa (8/2), masih berlanjut. "Ada satu tersangka dan tentu akan berkembang. Namanya (inisialnya) U," ujar Kepala Polri Jenderal (Pj) Timor Pradopo di Serang, Banten, Selasa.

Timor ditemui sesuai pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Gunawan Priat, Menteri Agama Suryadharma A, Gubernur Banten Ratu Atut Cholis, serta pejabat daerah dan tokoh agama di Banten.

Menurut Kepala Polda Banten Brigadir Jenderal (Pj) Agus Kusnadi, U berperan sebagai pembunuh dan menyuruh membakar mobil. U kini ditahan di Polres Pandeglang. Polisi sudah memeriksa 12 saksi.

Namun, di Jakarta, Selasa, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Alam, mengatakan, Polri menetapkan dua tersangka terkait insiden Cikeusik, yakni berinisial A dan U. Selain itu, Polri juga membentuk tim untuk memeriksa persepsi pengamanatan lapangan dalam menangani aksi kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Urbaingrum juga meminta Polri bergerak cepat menuntaskan pelaku kekerasan terhadap warga Ahmadiyah. Kekerasan itu sangat berbahaya karena menancam keberlangsungan Indonesia yang mademik.

"Kekerasan atau nama apa pun tak bisa ditoleransi. Karena itu,

Ke
Konsu
JAKAR
pemerit
kekeras
polri me
menunt
pemerit
kekeras
polri me
menunt

(HAM/ATO/GAN/PER/ED/ANA/NTA/WHY)



Sejumlah tokoh lintas agama mengadakan jumpa pers di kantor The Wahid Institute, Jakarta, Selasa (8/2), membahas permasalahan terhadap Ahmadiyah serta Diga gereja di Ternate. Hadir dalam jumpa pers tersebut (dari kanan ke kiri) Djohari Effendi, Hm Benny Susetya, Hanshardi, Yenny Wahid, Adhul Mansur, Toshiro Mulya Lubis, Hm Hary Hariyanto, dan Pendeta Albertus Patty.

KERUKUNAN

Agama Tak Ajarkan Kekerasan

JAKARTA, KOMPAS — Agama pada dasarnya mengajarkan pentingnya perdamaian dan menghindari kekerasan pada pemeluknya. Jika ada ajaran kekerasan dari agama, kemungkinan besar itu merupakan tafsir yang menyimpang.

Hal itu terungkap dalam dialog "Perbedaan: Kerukunan Antarumat Beragama di Indonesia" oleh Sahabuddin Institute di Jakarta, Selasa (8/2). Acara ini menampilkan pembicara antara lain Sekretaris Jenderal PB Nahdlatul Ulama KH Marsudi Syuhud, penasihat Sahabuddin Institute KH Muhi Syibli Sahabuddin, dan anggota DPD dari Provinsi Bali, I Wayan Sudirta.

Syibli menjelaskan, semua agama pada dasarnya mengajarkan perlukannya membangun perdamaian. Perbedaan antarumatiasin dan kelompok merupakan

hal yang alamiah yang mutlak adanya. "Agama sejatinya tidak pernah mengajarkan kekerasan, dan tidak pernah membenarkan kekerasan. Kalau ada ajaran kekerasan yang dianggap dari agama, pastilah itu tafsir yang keliru," katanya.

Agama juga mengajarkan manusia untuk menerima segala perbedaan sebagai rahmat atau anugerah. Jika mampu dikelola dengan baik, segala perbedaan tersebut justru bisa merekatkan hubungan antarmanusia. "Perbedaan itu rahmat yang indah dalam kehidupan manusia," kata Syibli.

Hal serupa diungkapkan Wayan Sudirta. Perbedaan dan keberagaman di Indonesia bisa menjadi sumber kekuatan apabila dikelola dalam solidaritas kuat untuk kemajuan, tetapi bisa disulut menjadi bentrokan antar-

kelompok jika tidak ditangani dengan baik.

Jika dipelajari, sesungguhnya akar masalah dalam bentrokan bernuansa agama tidak murni dari masalah agama. Banyak faktor lain yang menjadi penyebab gesekan, tetapi disalurkan secara tidak lewat agama. Padahal, konflik sesungguhnya bersumber dari soal hukum, politik, dan ekonomi. Elite agama dan politik semestinya tidak meredakan agama sebagai komoditas politik.

Marsudi Syuhud berharap pimpinan agama hendaknya menekankan semangat persaudaraan demi membangun peradaban bersama yang saling menghargai. Kalau kelompok agama berdalwah, seharusnya hal itu dilakukan dengan penuh kebajikan, kelembutan, dan teladan yang baik. (ANI)

memikirkan rencana untuk menyampaikan hal itu kepada masyarakat. "Bukan cinta ke pejabat," kata dia.

Wakil Kepala Divisi Pembinaan Hukum Mabes Polri Brigjen (Pol) Panggabean membantah hal melirik hasil kajian KHN sama sekali. Polri mengambil manfaat penelitian KHN (ANI)

Ulama KH Marsudi Syuhud, penasihat Sahabuddin Institute KH Muhi Syibli Sahabuddin, dan anggota DPD dari Provinsi Bali, I Wayan Sudirta.

Syibli menjelaskan, semua agama pada dasarnya mengajarkan perlukannya membangun perdamaian. Perbedaan antarumatiasin dan kelompok merupakan

hal yang alamiah yang mutlak adanya.

Hal serupa diungkapkan Wayan Sudirta. Perbedaan dan keberagaman di Indonesia bisa menjadi sumber kekuatan apabila dikelola dalam solidaritas kuat untuk kemajuan, tetapi bisa disulut menjadi bentrokan antar-

KEKERASAN

Ketika Kedamaian di Cikeusik Terusik

Konflik Kampung Peundeuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten, tak hanya perkampungan dan pelepasan kamarnya. Ribuan peponoran dan area persawahan sudah ditumbuhi di sepanjang jalan menuju perkampungan yang berada di wilayah Banten sel belasan km.

Dibutuhkan waktu sekitar lima jam dari Kota Serang, ibu kota Provinsi Banten, untuk menuju ke Kampung Peundeuy Cikeusik. Adapun untuk menuju ke ibu kota Kabupaten Pandeglang, warga Peundeuy tidak butuh waktu lama dengan menggunakan kendaraan melintasi jarak puluhan kilometer, cukup dengan lubang-lubang sepeyang ruas jalan.

Desain kondisinya yang relatif terpelosok seperti itu, wajar jika suasana tenang mendominasi permukiman warga. Namun, pada Minggu (6/2) pagi, suasana Kampung Peundeuy berubah menjadi terkejut terjadinya insiden kekerasan antara ribuan area wilayah sekitar dan jalan Ahmadiyah yang berada rumah milik Suparman.

Korban jiwa dan luka pun ratusan dalam peristiwa tersebut. Tak kurang, insiden Minggu pagi tersebut melibatkan peristiwa yang mengakibatkan pun sekecil jumlah perkampungan itu di suasana tenang yang sekian di selingkup Peundeuy.

Ketua Karang Taruna Peundeuy, masyarakat setempat sempat merasa tercekam pascainsiden itu. Beberapa di antaranya malah memilih mengungsi ke luar desa karena khawatir kemungkinan terjadi peristiwa insiden.

Beberapa warga Peundeuy yang ditemui menuturkan bahwa pada saat kejadian mereka hanya menonton. Ada pula penuturan bahwa saat terjadi pengajaran terhadap jemaah Ahmadiyah, ada warga setempat yang tengah memetik sayur, membiarkannya. Warga Peundeuy itu tahu bahwa jemaah tersebut sedang bersembunyi di balik tanaman dari kejaran orang-orang.

Informasi beberapa warga Peundeuy, ribaan orang yang Minggu pagi itu mendatangi rumah Suparman berasal dari luar kampung mereka. Keterangan kepolisian setempat mengkonfirmasi, orang-orang tersebut bukan hanya dari satu kecamatan, melainkan banyak kecamatan di Pandeglang.

Trauma insiden Minggu pagi tersebut tidak hanya melanda penduduk di Peundeuy secara massal, tetapi juga ke tiap warga yang berdiam di rumah-rumah mereka. Kampung sempat mengalami rumah Aminah, ibu Suparman, pada Senin (7/2). Di dalam rumah yang dindingnya belum sepenuhnya dilapisi semen itu, terlihat cucu-cucu perempuan Aminah berkumpul dengan punggung menempel di

dinding sambil memandang menelanya yang menangis.

Antisipasi meratapi ketidakpastian keberadaan kedua anaknya, Tarno dan Roni, yang Minggu pagi berada di dalam rumah yang dikelilingi banyak orang. Raut muka kebingungan dan ketakutan membayang di wajah bocah-bocah perempuan yang berusia 10 tahun kurang itu.

Gubernur Banten Hatu Atut Chotiyah pada Selasa (8/2), mengatakan, pihaknya mendukung dan meminta aparat memantaskan secara adil, baik terhadap kelompok Ahmadiyah maupun bagi masyarakat yang menghiakimi sampai terjadi korban. Jumlah penganut Ahmadiyah di Banten, kata Atut, sekitar 3.500 orang. Sebagian kecil, yakni 25 orang, berada di Cikeusik, Pandeglang.

Pemutaran Atut, pihak berwajib masih menelusuri pihak yang mengerahkan 1.500-an orang sehingga pada saat hampir bersamaan Minggu pagi lalu datang ke Peundeuy.

Atut berharap masyarakat tidak lagi bertindak anarkis hanya karena perbedaan keyakinan. "Saya berharap (insiden) ini tidak lagi terjadi di Banten," kata Atut se usai pertemuan dengan Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, jajaran unsur masjid, dan tokoh agama di pendapa Gubernur, Selasa. (CYPRILANUS ANTO S)

Insiden Cikeusik, Produk Negara Lemah

Oleh LAODE IDA 9 Februari 2011

Tindakan kekerasan dan bergis dilakukan sekelompok massa di Desa Cikeusik, Pandeglang, Banten.

Pembantaian pengikut ajaran Ahmadiyah itu menunjukkan rendahnya toleransi antarkelempok sosial yang berbeda keyakinan dan makin hilangnya rasa persukuanusiaan sebagian bangsa kita. Yang menonjol, ego kepercayaan berbasis tafsir subyektif atas teks atau ajaran agama (Islam) tanpa memberi ruang pada kelompok lain memafsirkan kebenaran sendiri. Fenomena itu secara sosiologis menunjukkan ada keberifak menyeringatkan kebenaran yang diyakini.

Barang siapa menjalankan aktivitas dengan kepercayaan dari tradisi berbeda, akan disingkirkan. Sebagian masyarakat kita masih menggunakan hukum rimba, hidup tanpa aturan dan keteraturan. Bahkan, pada tingkat tertentu, sangat terkesan dengan wasda dan komunitas bangsa ini berada dalam ruang tanpa negara. Pihak yang mengidentifikasi peryeragaman keyakinan bebas melau-

lukan kekerasan fisik terhadap yang dianggap harus "seiruan" dengan mereka. Kalaulah pemerintah atau yang berwenang hadir di tengah komunitas yang tengah berkumflik, perannya sungguh tidak terasa.

Kontroversi

Keberadaan Ahmadiyah memang sudah lama kontroversial. Ajaran yang dikembangkan Ghulam Ahmad itu dianggap sebagian besar ulama Indonesia menyimpang dari ajaran Islam sesungguhnya. Majelis Ulama Indonesia sudah dua kali (1980 dan 2005) mengeluarkan fatwa, Ahmadiyah ajaran sesat. Karena secara tafsir ulama esoteris ajaran Ahmadiyah dipandang bisa menggaruk akidah, maka harus ditiadakan dari negara yang pederaduknya sebagian besar umat Islam ini.

Pemerintah pun sudah membuat SKB antara Mendagri, Menag, dan Jaksa Agung (2008), yang melarang kegiatan Ahmadiyah di Indonesia. Semangat dari UU, MUI serta pemerintah sungguh saja baik. Barangkali juga ingin mencontoh Malaysia dan Brunei yang sejak awal melarang kelompok dan ajaran Ah-

madiyah eosis sebagai aliran dalam Islam. Mengapa hingga kini ajaran masih berlangsung?

Pertama, Indonesia memiliki prinsip dasar berupa penghargaan terhadap eksistensi dan nilai-nilai pluralisme (pangajawantahan Bhinneka Tunggal Ika). Konstitusi kita menjamin dan melindungi hak setiap warga negara untuk bebas menjalankan agama dan kepercayaannya. Tak boleh ada pemaksaan peryeragaman oleh kelompok tertentu. Dalam konteks ini, apabila melarang keberadaan pengikut Ahmadiyah, pemerintah bisa dianggap melanggar konstitusi.

Kedua, ada arus gerakan sosial HAM yang bersifat dan berskala universal. Kalangan aktivis atau pegiat HAM melihat substansi ajaran Ahmadiyah dari sudut pandang hak individu dan kelompok untuk menjalankan ajaran dan kepercayaannya. Dengan demikian, kalau kelompok Ahmadiyah terganggu, bukan orang atau masyarakat di sekitarnya yang membela, melainkan mereka yang menesakkan HAM.

Ketiga, Ahmadiyah punya jaringan internasional yang kuat (lebih dari 100 negara dengan

jemaah sekitar 150 juta orang), yang tentu saja punya fungsi advokasi lintas negara yang sejalan dengan gerakan dari nilai-nilai HAM. Saat jaringan komunitas Ahmadiyah terganggu menjalankan aktivitasnya di negeri ini, apalagi ada korban seperti di Cikeusik, solidaritas internasional akan muncul bersamaan dengan isu pelanggaran HAM. Tampaknya ini membuat pemerintah sedikit gamang menjalankan kebijakan yang dibuatnya.

Keempat, kita sedang terjebak dalam kepemimpinan yang serba ragu. Kondisi ini berdampak pada sikap, perilaku, dan bahkan karakter aparat pemerintah (pegasak bukam) di lapangan. Mereka lamban dan ragu bertindak untuk menghindari konflik dan korban jiwa. Tentu saja ini tak boleh jadi pembenaran terhadap pembiaran konflik dan benturan fisik yang terjadi, apalagi ada korban jiwa. Posisi dan peran pemerintah terasa lemah. Padahal, fungsi pemerintah melindungi seluruh warga, menciptakan keteraturan sosial dengan kebijakan implementatif.

LAODE IDA Sosiolog, Wakil Ketua DPD

KPK bantah larangan kasus G. Bukan lambat, telet.

Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya cat terkait per Wali Kota Surabaya. Istilahnya, sergan tuan.

Pengguna jalan Kota saling ser. Mencontoh pa mimpinnya?

mang

Persekusi dan Kebebasan Berkeyakinan

Oleh SUKIDI 9 Februari 2011

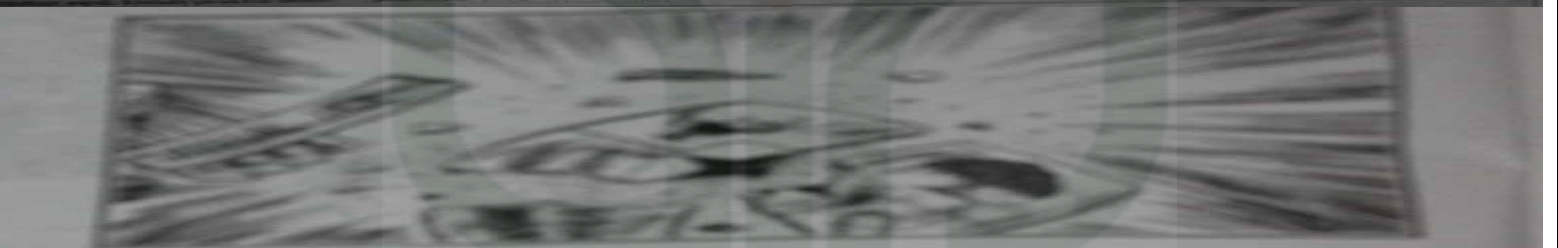
Dalam Ensiklopedia Teologi, kebebasan berkeyakinan adalah hak setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih gereja dan berkeyakinan, dan berkeyakinan sebagai sumber nilai kehidupan.

Kebebasan berkeyakinan adalah hak setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih gereja dan berkeyakinan, dan berkeyakinan sebagai sumber nilai kehidupan. Kebebasan berkeyakinan adalah hak setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih gereja dan berkeyakinan, dan berkeyakinan sebagai sumber nilai kehidupan.

Kebebasan berkeyakinan adalah hak setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih gereja dan berkeyakinan, dan berkeyakinan sebagai sumber nilai kehidupan. Kebebasan berkeyakinan adalah hak setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih gereja dan berkeyakinan, dan berkeyakinan sebagai sumber nilai kehidupan.

Kebebasan berkeyakinan adalah hak setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih gereja dan berkeyakinan, dan berkeyakinan sebagai sumber nilai kehidupan. Kebebasan berkeyakinan adalah hak setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih gereja dan berkeyakinan, dan berkeyakinan sebagai sumber nilai kehidupan.

Kebebasan berkeyakinan adalah hak setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih gereja dan berkeyakinan, dan berkeyakinan sebagai sumber nilai kehidupan. Kebebasan berkeyakinan adalah hak setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih gereja dan berkeyakinan, dan berkeyakinan sebagai sumber nilai kehidupan.



Solusi Ideal Soal Ahmadiyah?

U... (The rest of the page content is mostly illegible due to low resolution and blurring.)

Kecam Aksi Kekerasan

Prabowo Dukung Pembubaran Ormas yang Langgar Hukum

JAKARTA, 10 MEI 2014 - Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto mendukung pembubaran kelompok-kelompok yang melanggar hukum.

Prabowo Subianto mengatakan, kelompok-kelompok yang melanggar hukum harus dibubarkan. "Kita sebagai partai politik harus mendukung pembubaran kelompok-kelompok yang melanggar hukum," katanya.



Prabowo Subianto (kiri) bersama dengan beberapa orang lainnya di sebuah acara publik.

Prabowo Subianto mengatakan, kelompok-kelompok yang melanggar hukum harus dibubarkan. "Kita sebagai partai politik harus mendukung pembubaran kelompok-kelompok yang melanggar hukum," katanya.

Prabowo Subianto mengatakan, kelompok-kelompok yang melanggar hukum harus dibubarkan. "Kita sebagai partai politik harus mendukung pembubaran kelompok-kelompok yang melanggar hukum," katanya.

Prabowo Subianto mengatakan, kelompok-kelompok yang melanggar hukum harus dibubarkan. "Kita sebagai partai politik harus mendukung pembubaran kelompok-kelompok yang melanggar hukum," katanya.

Prabowo Subianto mengatakan, kelompok-kelompok yang melanggar hukum harus dibubarkan. "Kita sebagai partai politik harus mendukung pembubaran kelompok-kelompok yang melanggar hukum," katanya.

Prabowo Subianto mengatakan, kelompok-kelompok yang melanggar hukum harus dibubarkan. "Kita sebagai partai politik harus mendukung pembubaran kelompok-kelompok yang melanggar hukum," katanya.

Prabowo Subianto mengatakan, kelompok-kelompok yang melanggar hukum harus dibubarkan. "Kita sebagai partai politik harus mendukung pembubaran kelompok-kelompok yang melanggar hukum," katanya.

Prabowo Subianto mengatakan, kelompok-kelompok yang melanggar hukum harus dibubarkan. "Kita sebagai partai politik harus mendukung pembubaran kelompok-kelompok yang melanggar hukum," katanya.

Prabowo Subianto mengatakan, kelompok-kelompok yang melanggar hukum harus dibubarkan. "Kita sebagai partai politik harus mendukung pembubaran kelompok-kelompok yang melanggar hukum," katanya.

Prabowo Subianto mengatakan, kelompok-kelompok yang melanggar hukum harus dibubarkan. "Kita sebagai partai politik harus mendukung pembubaran kelompok-kelompok yang melanggar hukum," katanya.

Prabowo Subianto mengatakan, kelompok-kelompok yang melanggar hukum harus dibubarkan. "Kita sebagai partai politik harus mendukung pembubaran kelompok-kelompok yang melanggar hukum," katanya.

Prabowo Subianto mengatakan, kelompok-kelompok yang melanggar hukum harus dibubarkan. "Kita sebagai partai politik harus mendukung pembubaran kelompok-kelompok yang melanggar hukum," katanya.

Prabowo Subianto mengatakan, kelompok-kelompok yang melanggar hukum harus dibubarkan. "Kita sebagai partai politik harus mendukung pembubaran kelompok-kelompok yang melanggar hukum," katanya.

Prabowo Subianto mengatakan, kelompok-kelompok yang melanggar hukum harus dibubarkan. "Kita sebagai partai politik harus mendukung pembubaran kelompok-kelompok yang melanggar hukum," katanya.

Prabowo Subianto mengatakan, kelompok-kelompok yang melanggar hukum harus dibubarkan. "Kita sebagai partai politik harus mendukung pembubaran kelompok-kelompok yang melanggar hukum," katanya.

Prabowo Subianto mengatakan, kelompok-kelompok yang melanggar hukum harus dibubarkan. "Kita sebagai partai politik harus mendukung pembubaran kelompok-kelompok yang melanggar hukum," katanya.

Prabowo Subianto mengatakan, kelompok-kelompok yang melanggar hukum harus dibubarkan. "Kita sebagai partai politik harus mendukung pembubaran kelompok-kelompok yang melanggar hukum," katanya.

Prabowo Subianto mengatakan, kelompok-kelompok yang melanggar hukum harus dibubarkan. "Kita sebagai partai politik harus mendukung pembubaran kelompok-kelompok yang melanggar hukum," katanya.

Prabowo Subianto mengatakan, kelompok-kelompok yang melanggar hukum harus dibubarkan. "Kita sebagai partai politik harus mendukung pembubaran kelompok-kelompok yang melanggar hukum," katanya.

Prabowo Subianto mengatakan, kelompok-kelompok yang melanggar hukum harus dibubarkan. "Kita sebagai partai politik harus mendukung pembubaran kelompok-kelompok yang melanggar hukum," katanya.

Prabowo Subianto mengatakan, kelompok-kelompok yang melanggar hukum harus dibubarkan. "Kita sebagai partai politik harus mendukung pembubaran kelompok-kelompok yang melanggar hukum," katanya.

Prabowo Subianto mengatakan, kelompok-kelompok yang melanggar hukum harus dibubarkan. "Kita sebagai partai politik harus mendukung pembubaran kelompok-kelompok yang melanggar hukum," katanya.

Prabowo Subianto mengatakan, kelompok-kelompok yang melanggar hukum harus dibubarkan. "Kita sebagai partai politik harus mendukung pembubaran kelompok-kelompok yang melanggar hukum," katanya.

Prabowo Subianto mengatakan, kelompok-kelompok yang melanggar hukum harus dibubarkan. "Kita sebagai partai politik harus mendukung pembubaran kelompok-kelompok yang melanggar hukum," katanya.

Prabowo Subianto mengatakan, kelompok-kelompok yang melanggar hukum harus dibubarkan. "Kita sebagai partai politik harus mendukung pembubaran kelompok-kelompok yang melanggar hukum," katanya.

Prabowo Subianto mengatakan, kelompok-kelompok yang melanggar hukum harus dibubarkan. "Kita sebagai partai politik harus mendukung pembubaran kelompok-kelompok yang melanggar hukum," katanya.

Prabowo Subianto mengatakan, kelompok-kelompok yang melanggar hukum harus dibubarkan. "Kita sebagai partai politik harus mendukung pembubaran kelompok-kelompok yang melanggar hukum," katanya.

Prabowo Subianto mengatakan, kelompok-kelompok yang melanggar hukum harus dibubarkan. "Kita sebagai partai politik harus mendukung pembubaran kelompok-kelompok yang melanggar hukum," katanya.

Prabowo Subianto mengatakan, kelompok-kelompok yang melanggar hukum harus dibubarkan. "Kita sebagai partai politik harus mendukung pembubaran kelompok-kelompok yang melanggar hukum," katanya.

Prabowo Subianto mengatakan, kelompok-kelompok yang melanggar hukum harus dibubarkan. "Kita sebagai partai politik harus mendukung pembubaran kelompok-kelompok yang melanggar hukum," katanya.

Prabowo Subianto mengatakan, kelompok-kelompok yang melanggar hukum harus dibubarkan. "Kita sebagai partai politik harus mendukung pembubaran kelompok-kelompok yang melanggar hukum," katanya.

Prabowo Subianto mengatakan, kelompok-kelompok yang melanggar hukum harus dibubarkan. "Kita sebagai partai politik harus mendukung pembubaran kelompok-kelompok yang melanggar hukum," katanya.

Prabowo Subianto mengatakan, kelompok-kelompok yang melanggar hukum harus dibubarkan. "Kita sebagai partai politik harus mendukung pembubaran kelompok-kelompok yang melanggar hukum," katanya.

Prabowo Subianto mengatakan, kelompok-kelompok yang melanggar hukum harus dibubarkan. "Kita sebagai partai politik harus mendukung pembubaran kelompok-kelompok yang melanggar hukum," katanya.

Prabowo Subianto mengatakan, kelompok-kelompok yang melanggar hukum harus dibubarkan. "Kita sebagai partai politik harus mendukung pembubaran kelompok-kelompok yang melanggar hukum," katanya.

Advertisement for 'PENA' featuring a woman in a red and white outfit. Text includes 'PENA KEMBARAN', 'Barbaris, Peristiwa Tragis Itu Tak Terulang Lagi', and 'PENAWAR -20%'.

Pluralisme Vs Fundamentalisme

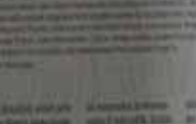
oleh YUDU KEMAL FATA

Pluralisme adalah pandangan yang mengakui adanya berbagai agama, suku, dan budaya yang sama-sama berhak untuk berkembang. Sementara fundamentalisme cenderung menolak keberagaman dan menginginkan kesatuan yang ketat.

JAJAK PENDAPAT "KOMPAS"

Kehadiran Negara Dipertanyakan

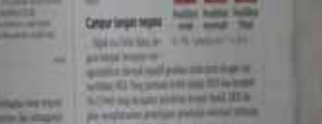
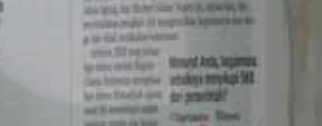
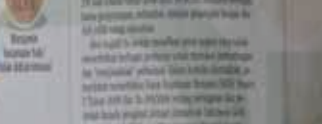
Sejauh ini, apa saja tindakan pemerintah yang dipertanyakan masyarakat?



KESUKSESAN BERAGAMA

Menimbang SKB Menteri

Keberhasilan pembangunan agama di Indonesia perlu ditinjau kembali. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah?



OPINI

Teladani Komunikasi Dialogis Nabi

Dialogis adalah komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling menghormati. Kita perlu meneladani komunikasi dialogis Nabi Muhammad SAW sebagai contoh.



KOMPAS

AMANAT HATI NURANI BAKYAT



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama para menteri dan pejabat tinggi lainnya saat menghadiri acara peringatan Hari Korpri di Gedung Sate, Jakarta, Senin (15/2).

Presiden Ajak Hidup Rukun

Indeks Indonesia sebagai Negara Gagal Akan Naik

JAKARTA, 15 FEBRUARI — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak bangsa Indonesia untuk hidup rukun dalam kerukunan. Hal tersebut dalam sambutannya di acara peringatan Hari Korpri di Gedung Sate, Jakarta, Senin (15/2).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, kerukunan adalah salah satu pilar yang akan membuat bangsa Indonesia maju. "Kita harus membangun kerukunan yang berkeadilan, yang menghormati hak-hak semua pihak," katanya.

Presiden juga menekankan pentingnya peran birokrasi dalam mendukung pembangunan. "Kita harus meningkatkan kinerja birokrasi agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik," katanya.

Presiden juga mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk hidup rukun dan berkeadilan. "Kita harus membangun kerukunan yang berkeadilan, yang menghormati hak-hak semua pihak," katanya.

Presiden Ajak Hidup Rukun

(Sambutan dari halaman 1)

semua permasalahan diselesaikan secara bermartabat. Itu adalah bagi umat Islam di Indonesia," kata Presiden.

Indeks negara gagal

Di Jakarta, Selasa, anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Yusuf Adi Prasetyo, mengingatkan, peringkat Indonesia dalam indeks negara gagal yang dikeluarkan Foreign Policy pada 2011 diperkirakan naik dari urutan ke-62, yang dicapai pada 2010. Berhenti keburukan akhir-akhir ini akan menambah nilai kepalan pemerintah dalam meningkatkan hukum dan melindungi warga.

Pembakaran dan perusakan tiga gereja di Temanggung serta pengurangan jemaah Ahmadiyah di Pangrehing termasuk dan ke-luarannya yang menonjol. Sebelum itu, banyak kasus kepalan pemerintah dalam menanggapi laporan, seperti pembunuhan dua penyusutan di Puncak Jaya, perusakan tanah sengketa, infrastruktur jalan rusak, dan perpecahan elite politik.

"Peringkat kepalan kita akan naik lagi. Artinya, semakin masuk kategori 60 negara gagal di dunia. Ini merupakan keburu bisa menghambat kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia yang bermasalah terhadap berkebangsanya investasi," katanya.

Mengutip data Failed States Index yang diterbitkan Foreign Policy, Yoseph menjelaskan, posisi Indonesia saat ini masuk kategori in danger atau dalam bahaya. Artinya, jika berbagai masalah tidak teratasi, negeri ini akan masuk dalam kategori 60 negara gagal. Penilaian didasarkan pada 12 parameter, antara lain tekanan penduduk, pemerintahan elektronik, delegitimasi terhadap negara, pelayanan publik, hak asasi manusia, korupsinya, dan perpecahan elite.

Pada 2007, Indonesia berada pada urutan ke-55. Peringkat itu menurun menjadi ke-60 pada 2008 dan urutan ke-62 pada 2010. Sebagai pembanding, urutan ke-60 ke-50 dan ke-58 saat ini diduduki Bosnia Herzegovina, Angola, dan Moldova.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh F Daudy meminta pemerintah berkonsentrasi menanggulangi kasus dengan adil. Kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah dan

16 Februari 2011

Kerukunan hidup

Di Jakarta, Senin, Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars (ICIS) KH Hayin Mutadi saat bertemu dengan para ulama, menggariskan keseimbangan antara keyakinan dan toleransi menjadi sangat penting dalam menjaga kerukunan kehidupan beragama dan berbudaya. Toleransi tanpa iman akan membuat orang menjadi liberal. Namun, keyakinan atau iman tanpa toleransi akan membuat orang menjadi fundamentalis, keras, dan kaku.

Hayin menambahkan, konflik antarumat beragama tak hanya disebabkan masalah agama. Faktor psikologis, ideologi, sosial, dan ekonomi juga menentukan.

Hayin menambahkan, di Bandung atau Bogor, Jawa Barat, mendirikan gereja kecil sulit dibandingkan dengan di Magelang atau Temanggung, Jawa Tengah. Hal itu terjadi karena faktor psikologis di tingkat lokal. "Dari mana itu menjadi kepala daerah dan komisi apa saat menjadi kepala daerah akan memengaruhi kehidupan kepala daerah," katanya.

Secara terpisah, sejumlah tokoh agama, Senin, bertemu dengan pimpinan MPR Tolkh agama itu menilai, kelekunan atas nama agama, seperti terjadi di Cirebon dan Temanggung, mengancam kehidupan berbangsa di Indonesia. Pemerintah perlu berkesinambungan tak satu suara dalam mengatasi masalah ini.

"Kami gelisah dengan kondisi kehidupan serta ketidakefektifan yang rapuh dan terancam," kata Zaenudin Arifin Chalid (Syekh Wahidi) dalam pertemuan dengan pimpinan MPR itu.

Dari Puncung, Jawa Timur, Selasa, dipaparkan, Syamsul Pransetyo (Yaqi) di Semarang, Beji di Serang, Banten, dan lain-lain. Tiga pejabat pemerintahan ditugaskan untuk memantau situasi di lapangan.

Kepala wilayah SMP dan SMA Yopi Muhammad Ali Ballo menambahkan, pengantar berjumlah 200-an orang. Sekitar 60 pengantar masuk ke kompleks dan saat itu sedang sekitar 30 orang.

Kepala Pida Jatin Impektur Andrei Bahudin Hani mengatakan, tiga pejabat pemerintahan ditugaskan dan mulai dipantau.

OTA, PER, TGA, IBA, KTI, EBI, ABE, IAM, IUK, IWA, IUK, IWEI

KANKER PADA ANAS

Melawan Pembohongan Publik



Pengamat politik dari berbagai institusi, Yudi Latih, Direktur Eksekutif Nasional Walhi Betty Nubdin Praga, Ketua Institut Himpun Indonesia Chaidir Mufiduddin, Direktur Lembaga Madani Indonesia Bay Bangharti, Sekjen Komisi Rakyat untuk Kondisi Perikanan Rina Dhananik, dan dosen FISIP UIN Ar-Raniry Profendi (dari kiri) menghadiri pertemuan dengan 400 organisasi mahasiswa pada Rabu (15/2) di Gedung Sate, Jakarta, Senin (15/2).

KEBINEKAHAN

Pemerintah Harus Minta Jaminan Ormas

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah harus meminta jaminan dari organisasi kemasyarakatan yang dianggap bergaris keras untuk mempertahankan Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak melakukan kekerasan. Jika ormas yang mengajukan jaminan itu dan melakukan kekerasan, pemerintah perlu membatasi akses tersebut.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars Hayin Mutadi di sela-sela pertemuan dengan tokoh agama di Jakarta, Senin (14/2). Hayin diminta tanggapan terkait dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta ormas perusak dibubarkan jika diperlukan.

"Memang saya, akan lebih efektif kalau bentuk ormanya dibubarkan, tetapi bentuk teologi tidak akan bergeser. Maunya apa sehingga dia (ormas) tidak melakukan kekerasan. Itu lebih efektif daripada dibubarkan," kata Hayin.

Humas Pivik Inspektur Jenderal Anam Bachrud Alan mengatakan, pihak kepalan belum dapat memuatkan kelompok yang diduga mengorganisasi massa yang mengancam dan menyuruh jemaah Ahmadiyah di Cirebon, Pangrehing, Bontok. "Poli belum dapat memastikan suatu ormas," katanya.

Diikuti minoritas

Seperti itu, Bas Syarifah Pengurus Bazar "Nabdilat Ulama Masjid Firdi Mansuli" mengatakan, sudah menjadi komitmen warga mahdilyn untuk menghijau kehidupan bangsa Indonesia.

"Vidi itu tetap ada di NU dan menjadi komitmen kami untuk tetap menjaga bangsa yang berkeadilan," ujar Masdar di Jakarta, Selasa.

Perwakilan perlembaan khilafah dari kelompok, lanjutnya, bukan budidaya bagi NU untuk melindungi kelompok minoritas. Menurut dia, karena komitmen atau bingkai-konstitusi, NU juga menjadi para depun dalam memelihara kebhinekaan nasional.

"Berbeda dengan Islam yang

POLITIK & HUKUM

Ha JAN mel selu ang mer met En dlat elat jebat erjat rmas dang Umas marta 113/2 Bu dlat vama wana bosan sekar sarta politk dlatu kama An PAI PI JAK Para seni k ur a Himpu Selcar kema nimal Umas 113/2 krah Thon "Kah PPP" Selcar PPP" ter ter Nubdin

TEMANGGUNG DAN CIKEUSIK

Bertambah 1 Tersangka Lagi

JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Senin (14/2), menetapkan satu tersangka lagi atas kasus kerusuhan di Kabupaten Temanggung, pekan lalu. Dengan demikian, kini tersangka berjumlah 16 orang dengan adanya 11 tersangka di dua aksi kerusuhan yang berlangsung Maret.

Kepala Bidang Inspeksi Kriminal Iqbal Anwar di Semarang, Senin, saat pertemuan dengan Lik di kota agribudaya, menambahkan, seorang tersangka baru itu adalah tuntut pasal 332 di Temanggung, karena dianggap menghambat proses hukum.

Iqbal menambahkan, secara kronologis, kerusuhan di Temanggung, Sabtu (12/2) di Temanggung, saat 373 dibelat Kepala Polisi Jatin yang berkeadilan, tak mengabaikan rencana pengisian tiga gereja di Temanggung Merka di PV Temanggung karena dapat menghambat proses hukum.

"Tidak dalam ke tak konyol dan di sini bukan yang" ujar Iqbal dalam dialog dengan anggota DPRD dan Komisi VIII DPR di Temanggung, Senin.

Ketua Komisi VIII DPR Abadi Kadi Kariyung mengatakan, perlu harus tanggap untuk menindak ormas yang menghambat proses hukum.



Natta Kurnia VII DPR (dari kiri) Kadi Kariyung (satu) dan Wakil Ketua DPRD Liris (dua) dan Wakil Ketua DPRD Temanggung Rina Dhananik (tiga) dan Wakil Ketua DPRD Temanggung Bay Bangharti (empat) dan Wakil Ketua DPRD Temanggung Bay Bangharti (lima) dan Wakil Ketua DPRD Temanggung Bay Bangharti (enam) dan Wakil Ketua DPRD Temanggung Bay Bangharti (tujuh) dan Wakil Ketua DPRD Temanggung Bay Bangharti (delapan) dan Wakil Ketua DPRD Temanggung Bay Bangharti (sembilan) dan Wakil Ketua DPRD Temanggung Bay Bangharti (sepuluh) dan Wakil Ketua DPRD Temanggung Bay Bangharti (sebelas) dan Wakil Ketua DPRD Temanggung Bay Bangharti (dua belas) dan Wakil Ketua DPRD Temanggung Bay Bangharti (tiga belas) dan Wakil Ketua DPRD Temanggung Bay Bangharti (empat belas) dan Wakil Ketua DPRD Temanggung Bay Bangharti (lima belas) dan Wakil Ketua DPRD Temanggung Bay Bangharti (enam belas) dan Wakil Ketua DPRD Temanggung Bay Bangharti (tujuh belas) dan Wakil Ketua DPRD Temanggung Bay Bangharti (delapan belas) dan Wakil Ketua DPRD Temanggung Bay Bangharti (sembilan belas) dan Wakil Ketua DPRD Temanggung Bay Bangharti (dua puluh).

Pemerintah Harus Lebih Tegas

(Sambungan dari halaman 7)

menentang. Negara juga tidak bisa menetapkan suatu aliran tertentu sebagai sesat atau tidak.

Dalam rapat dengar pendapat umum itu, tokoh lintas agama juga memunculkan kerukunan umat beragama di negeri ini yang rentan karena posisi negara kadang tak hadir ketika dibutuhkan untuk menegakkan hukum.

Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding mengakui, DPR segera meminta pendapat tokoh agama, salah satunya untuk merumuskan konstruksi kerukunan umat beragama. Terlebih ada niat DPR menyusun UU tentang kerukunan umat beragama.

Menurut Jusuf Kalla, ketiadaan seharusnya menjadi dasar rakyat Indonesia bernegara. "Kalau bicara kerukunan, berarti bicara bagaimana melaksanakan dasar yang kita setuju dari awal. Perbedaan yang membuat bangsa ini besar. Jangan hukum orang karena pikiran atau ideologinya, tetapi hukum karena tindakannya," katanya.

Jusuf Kalla mengingatkan, pemerintah harus tegas menghukum pelaku insiden terhadap jemaah Ahmadiyah di Cikeseuk, Kabupaten Pandeglang, Banten, dan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. "Kalau terjadi pembiaran, nanti ada anggapan, kalau kita hukum orang ramai-ramai, bisa bebas dari hukum. Ini yang berbahaya. Jika terjadi konflik antaragama, berhentinya sulit," katanya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin mengatakan, Islam mengakui tsa-muh (toleransi) terhadap perbedaan pendapat. Namun, MUI berpandangan, Ahmadiyah berada di luar wilayah perbedaan yang bisa ditoleransi sehingga dinilai sesat. Untuk memindahkan jati kesesatan itu, MUI menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah.

Ma'ruf meresip anggapan bahwa kekerasan kepada jemaah Ahmadiyah terjadi karena fatwa

MUI yang menyebarkan Ahmadiyah merupakan aliran sesat. MUI tidak menoleransi kekerasan oleh siapa pun.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Maedar F Mas'udi mengatakan, terkait Ahmadiyah, PBNU hanya menyatakan, aliran itu tidak sesuai dengan paham *ahlus sunnah wal jamaah* yang dianut warga NU. NU tak menggunakan kata sesat. "Kami berpandangan, yang berhak menyatakan sesat atau tidak itu hanya Allah," ujarnya.

Menurut mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Azyumardi Azra, Indonesia tidak bisa menghukum orang karena keyakinan yang dianutnya. Indonesia bukan negara agama. "Apabila Malaysia menetapkan aliran yang menyimpang, seperti Darul Arqam, Syiah, sampai Ahmadiyah, wajar karena negara yang berlandaskan agama. Islam menjadi agama resmi mereka. Namun, di Indonesia, tidak ada agama resmi negara," katanya.

Benny Susetyo dari Konferensi Waligereja Indonesia menambahkan, selama ini pemerintah cenderung absen dalam memberikan rasa aman terhadap warga negaranya. Tokoh agama yang sering harus menjadi "pemadam kebakaran" ketika terjadi kekerasan yang mengatasnamakan agama. "Kami tidak ingin terus-menerus jadi pemadam kebakaran. Pemerintah jangan bermain api terus," katanya.

Tak cepat tanggap

Sebaliknya, Salahuddin Wahid di Komnas HAM menyatakan prihatin dengan lemahnya sistem intelijen dan respons pemerintah dalam memindahkan jati data dari intelijen itu. Sebab, mungkin intelijen sudah memberikan laporan gejala kerusakan atau kekerasan, tetapi kepolisian tak cepat tanggap. "Aparat keamanan, dalam hal ini Polri, mungkin tidak siap mengatasi keadaan atau menganggap enteng," katanya.

Situasi itu terjadi akibat pe-

ngembangan sistem intelijen menjadi jemaah. Mungkin saja jumlah sumber daya manusianya terbatas, dan sedikit, atau kurang profesional kurang. Polri harus menginvestigasi kenapa kekerasan itu terjadi dan bagaimana memperbaiki sistem antisipasinya. Kemampuan deteksi dan intelijen mesti diberdayakan agar bisa mencegah kasus kekerasan serupa.

"Perbaiki sistem intelijen ini penting. Rakyat kan sekarang sudah merasa tidak dilindungi oleh kepolisian. Jika dibiarkan begini terus, pemerintah akan semakin kehilangan wibawa," katanya.

Secara terpisah, Menteri Pertahanan Purnomo Yuongiantoro mengingatkan, TNI akan turun tangan menindak massa anarkis. "Aksi kekerasan oleh massa menimbulkan keprihatinan TNI. Polisi berada di depan dan tentara memberikan dukungan. Namun, kalau keadaan tidak bisa diatasi, tentara akan masuk menindak massa anarkistis," ujar Menhan di Jakarta, Kamis.

Purnomo mengajak seluruh komponen bangsa bersatu menolak dan meniadakan kekerasan yang mengganggu ketenteraman masyarakat. Aparat penegak hukum bersama tokoh masyarakat agar mencermati masalah yang mengganggu stabilitas.

Dari Pandeglang, Kamis, dilaporkan, tersangka kasus Cikeseuk yang ditahan di Polda Banten menjadi tujuh orang. Tersangka baru, U, ditangkap di Bogor, Jawa Barat.

Kepala Bidang Humas Polda Banten Ajun Komisaris Besar Gunawan mengatakan, Polri masih mengejar sejumlah calon tersangka lain. Enam tersangka, selain U, yang kini ditahan, adalah UJ, YA, KE, KM, M, dan S.

Terkait penyerangan Pondok Pesantren Al Ma'hadul Islam Yayasan Pesantren Islam Pasuruan, Jawa Timur, jumlah tersangka menjadi enam orang, yaitu I, HS, S, AM, US, dan HA.

(JAM/BIL/UTI/ONG/WHY/HAR/CAS/ETA/EGI/NTA)



Siswa SD Negeri IV Cikokom, Kampung Tutul, Desa Cikokom, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, belajar di kelas yang baru dibangun pada 2009, tetapi hanya bertentam tanah. Sementara itu, sebagian kelas yang ada memiliki bangku dan meja. Mereka terpaksa duduk di lantai selama proses belajar-mengajar.

Pemerintah Harus Lebih Tegas

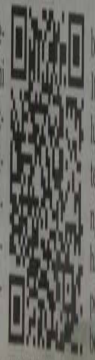
PR Berdialog dengan Tokoh Lintas Agama

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah diminta untuk bersikap lebih tegas dalam menerapkan hukum terkait terjadinya bertentangan akhir-akhir ini. Pelaku kekerasan itu harus ditindak sesuai aturan hukum yang ada dan keselamatan serta kebebasan masyarakat semestinya dilindungi.

sebelum sistem pemerintahan di negara ini juga tak berjalan maksimal. Itu terjadi karena faktor kepemimpinan yang tak berfungsi baik. Hal ini bisa berubah.

Setiap ada kasus kekerasan, menurut dia, pemerintah segera harus mempedulikan bagaimana memperbaiki undang-undang (UU). Pihaknya, semestinya segera ambil tindakan, tandas pelaku kekerasan, dan tepatkan hukum.

Pemerintah juga harus bersikap tegas terhadap kelompok atau organisasi yang nyata-nyata



bertentam kerusuhan. Itu dilakukan melalui penggalan yang terbuka dan adil dengan memberikan hak kepada kelompok itu untuk menanggapi. Langkah ini harus dipercepat se-

bagai proses yang paling fair. "Pemerintah segera bertindak. Karung ngomong, banyak bekerja," katanya.

Jusuf Kalla menekankan, jika pemerintah sekarang dinilai lemah menghadapi berbagai kekerasan, jalan keluarnya adalah perlu memperkuat diri. Caranya dengan menegakkan hukum se-

sesuai dengan aturan yang ada. "Ada aturan hukum soal penganiayaan atau pembunuhan. Laksanakan saja. Siapa yang melanggar, ambil tindakan hukum," katanya.

Tak boleh menghukum

Sejumlah tokoh lintas agama, termasuk Jusuf Kalla, Kamis malam, juga berdialog dengan Komisi VIII DPR. Dalam dialog itu terungkap, negara tak bisa menghukum keyakinan atau ideologi

(Bersambung ke hal 15 dan 16-1)

BACA JUGA [PALS](#)

Beban dari Mereka yang Marah...

Penurunan Produksi Padi di Beberapa Daerah di Indonesia

FOKUS

Saat China Jenuh,

Prognosis Produksi dan Kebutuhan Beras Nasional 2011

Wahyah

KEBERAGAMAN

Belajar dari Mereka yang Mampu Berempati

Pada saat banyak orang berdiskusi tentang ajaran agama, muncul sebuah kelompok akademis yang justru melihat secara kritis bagaimana agama-agama mampu berperan bagi masyarakat. Ternyata, studi yang bisa jadi belum lazim di Indonesia itu justru mampu membuka wawasan dan bujukan hujatan terhadap aneka ragam agama dan keyakinan yang tumbuh di Indonesia.

Oleh **A RUDI KURNIAWAN**



Warga dari berbagai agama dan tradisi menaruh bibit pohon di Dusun Pongraktyi, Umbulayu, Candiangan, Sragen, DI Yogyakarta, yang dikembangkan konsorsium PALM, Senin (7/2).

Dua tahun pascakonferensi 1998, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, berinisiatif untuk membuat Program Pascasarjana Center for Religion and Cross-cultural Studies (CRCS). Program studi itu secara khusus melakukan studi akademis tentang agama.

CRCS mengabdikan orang-orang dari berbagai latar belakang agama dan golongan untuk bersama-sama melakukan kajian tentang agama. TAA sebenarnya adalah bagaimana peran agama di masyarakat dan bukan tentang ajaran-ajaran.

Sejak 2000 CRCS menjadi kelompok studi berbagai macam mahasiswa. Mereka berasal dari berbagai pesantren, sekolah tinggi, universitas Islam, bahkan jenjang tinggi seperti universitas Islam dan lain-lain.

CRCS memiliki visi memantapkan untuk melihat dan meningkatkan keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Hal inilah yang selama ini menjadi pekerjaan utama lembaga Indonesia karena masalah agama sering kali justru menjadi banyak konflik di negeri ini.

Selama 2010, CRCS mencatat ada 20 presentasi di Indonesia yang dipertemukan. Sebagian besar adalah forum yang diselenggarakan oleh kelompok Muslim. Tahun-tahun tersebut, pada kesempatan yang sama, juga mengundang tokoh-tokoh dari agama lain.

Tantangan

Masih studi CRCS belum bisa dilaksanakan sejumlah universitas di Indonesia. Tak hanya, tetapi pihak yang belum sepenuhnya memahami tujuan program studi itu sehingga kadang orang salah paham tentang pendidikan tersebut.

"Mereka khawatir pendidikan bisa akan memberikan ruang para sarjana atau calon pesantren mereka. Kami bukan lembaga di mana ada yang ingin melihat agama-agama tertentu secara lebih," kata Zainal.

Keragaman

Selain CRCS di Yogyakarta muncul pula kelompok-kelompok lintas agama yang ber-sama-sama mengabdikan diri ke-

manisan. Contohnya, erapi Gunung Merapi yang mengabdikan 37 orang mengabdikan dan keragaman tradisi religius setempat mampu menggerakkan hati masyarakat lintas piktapan dan agama. Halnya dalam lapangan ini, sebanyak 47 elemen yang tergabung dalam Konsorsium Pengembangan Jemaah Lintas Merapi (PALM) tergerak untuk mengabdikan kembali lereng Merapi.

PALM diinisiasi oleh Satrio (72) dan didukung tokoh agama, antara lain Ukiy Agung Sembiring, Mgr Pajusmanus, Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummah KH Abdul Muhaimin, pateri almarhum KH Abdulrahman Wahid Aa Wahid, Bate Pannanun Sir Mahatma, dan para aktivis lintas agama, serta ratusan relawan. Meskipun belum program pengabdian di lereng Merapi dengan tema "Merapiku Benih, Memelihara Peradaban" mampu mengabdikan 12.000 bibit pohon. Karena itulah diperlukan masyarakat yang tanggap untuk memelihara, Konsorsium PALM terpaksa menandatangani

sementara pemerintah bantuan bibit pohon.

"Kami telah bibit bibit pohon telentang berhibrida dan justru nantinya mati. Sekarang kami lakukan pada penanaman pohon dan dari periode Februari hingga Juni 2011, penanaman bibit penanaman akan lebih kami lanjutkan," kata Koordinator Konsorsium PALM KH Abdul Muhaimin.

Kegiatan ini dan kolaborasi ini memang melibatkan berbagai macam elemen lintas agama mulai dari jemaah Baiturrahman NU, UIN, Pesantren Wahidul Ummah, Forum Pergerakan Umat Beriman, Komunitas Berkeadilan, Prodi Pendidikan di UIN, Prodi Pendidikan Nurul Ummah, berbagai macam pesantren, Mifta Tau.

Kesediaan untuk saling mengabdikan dan membantu akan memperkuat keberagaman masyarakat. Namun, tak bisa dipungkiri, berbagai masyarakat masih banyak yang belum mengabdikan ke-beragaman karena penanaman agama-agama yang berbeda. Karena itu, negara perlu lebih banyak bekerja untuk mengabdikan keberagaman dan berempati terhadap siapa pun.

Perlindungan Minoritas sebagai Patokan

Dalam laporan tentang Permusyawaratan Perwakilan (Permusyawaratan) dengan Indonesia (di Amerika), ketika berbicara tentang minoritas di Indonesia, para pembicara menyoroti bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman budaya dan suku bangsa yang sangat kaya. Namun, dalam hal perlindungan hak-hak minoritas, Indonesia masih memiliki banyak tantangan.

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak minoritas. Banyak orang masih memandang minoritas sebagai kelompok yang "lain" dan "asing", sehingga rentan terhadap diskriminasi dan kekerasan. Selain itu, aparat penegak hukum seringkali tidak tegas dalam menegakkan hukum yang melindungi hak-hak minoritas.

Salah satu contoh kasus yang mencuat adalah serangan terhadap gereja-gereja di Jawa Tengah. Serangan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat internasional, terutama Amerika Serikat, yang memiliki hubungan diplomatik yang erat dengan Indonesia. Pemerintah Indonesia harus segera mengambil langkah-langkah yang tegas untuk melindungi hak-hak minoritas dan menegakkan hukum yang berlaku.

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak minoritas melalui kampanye-kampanye publik. Selain itu, aparat penegak hukum harus diperkuat dan dilatih untuk dapat menangani kasus-kasus pelanggaran hak-hak minoritas dengan adil dan tegas.



Tersangka Insiden Cikewis Bertambah Jadi 9 Orang

Insiden yang terjadi di Cikewis, Jawa Barat, telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat internasional. Hingga saat ini, jumlah tersangka dalam kasus ini telah bertambah menjadi sembilan orang. Pemerintah Indonesia harus segera melakukan penyelidikan yang mendalam untuk mengungkap kebenaran faktual mengenai insiden ini.

Salah satu tersangka yang baru saja dituntut adalah seorang pria yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan terhadap umat Islam. Pemerintah harus memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, tanpa terpengaruh oleh tekanan politik atau sosial.

Insiden yang terjadi di Cikewis, Jawa Barat, telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat internasional. Hingga saat ini, jumlah tersangka dalam kasus ini telah bertambah menjadi sembilan orang.

BONUS INSTAN
Rp **50.000**

Super 10 Day Sale

20 Februari 2011 -----

Republika Penyerangan Ahmadiyah Jawa Barat dan penyerangan Gereja di Jawa Tengah

Ahmadiyah-Warga Banten Bentrok, 3 Tewas

Muhammad Fakhruddin
M Ikhsan Shiddiqy

7 Feb 2011
PANDEGLANG — Tiga orang tewas dan sejumlah lainnya luka-luka dalam bentrokan jemaat Ahmadiyah dengan warga di Kampung Pasir Peuteuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten, Ahad (6/2) sekitar pukul 10.30 WIB. Kepala Polres Pandeglang, AKBP Alex Fauzy Rasyad, mengungkapkan bentrokan itu dipicu sikap jemaat Ahmadiyah yang mengeluarkan pernyataan bernilai provokatif, terutama setelah kedatangan rombongan dari luar Banten.

Kapolda Jenderal (Pol) Timur Pradopo menyatakan, terdapat 15 anggota jemaat Ahmadiyah yang datang dari Bekasi. Sementara, para pesenteng Ahmadiyah dipastikan adalah warga setempat.

Ketua PBNU, Saif Agil Siraj, mengancam bentrokan dan mengutuk segala bentuk kekerasan karena akan merugikan citra umat Islam. "Nanti dikesankan bahwa Islam agama yang tidak beradab," katanya.

Ia meminta masyarakat menahan diri dan mengimbau seluruh elemen untuk mengedepankan dakwah

yang damai kepada pengikut Ahmadiyah yang dianggap sesat. "Kalau sudah keras, itu berarti bukan dakwah, bukan amar ma'kruf nahi munkar, itu sudah emosional," pungkasnya.

Kapolres menjelaskan, awalnya masyarakat setempat berkeinginan mengusir jemaat Ahmadiyah di bawah kepemimpinan Subarman secara damai. Warga meminta Barman membubarkan jemaat dan tidak menyebarkan ajaran sesat Mirza Ghulam Ahmad. "Diminta membubarkan Ahmadiyah, Barman malah mengatakan, lebih baik mati daripada membubarkan diri," ungkap Kapolres.

Namun, beberapa hari lalu, ketika suasana mulai memanas, Barman bersama istrinya dan Atep yang menjadi sekretaris jemaat Ahmadiyah Cikeusik meminta perlindungan ke Polsek Cikeusik. "Setelah Barman diamankan, situasi kembali tenang. Tapi, tadi pagi datang jemaat Ahmadiyah Jakarta sekitar 20 orang dan menyatakan siap memperthankan Ahmadiyah sampai titik darah penghabisan," kata Kapolres.

Pernyataan itu, lanjutnya, telah membakar emosi

Bersambung ke hlm 11 hal 1-3



pro kontra

E



ZAFRULLAH AHMAD JUBIR AHMADIYAH Semua Tokoh Agama Harus Mengimbau Umatnya

... (transcription of the article text) ...

KH AMIDHAN KETUA MUI

Pemerintah Harus Tegakkan Aturan

... (transcription of the article text) ...



Table with 3 columns and 10 rows of data, likely financial or statistical information.

Investigasi Cikeusik

Yusufina Hamid, Edis Purnama Putra
Menteri Agama meng-
usulkan Ahmadiyah jadi
aliran keagamaan.

PASARJAYA — Menteri Agama M. Syarifudin Hidayat mengatakan, Ahmadiyah layak dijadikan aliran keagamaan baru. "Ahmadiyah adalah salah satu aliran keagamaan yang ada di Indonesia," kata Hidayat dalam konferensi pers di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Ahad (6/2). Hidayat mengatakan, Ahmadiyah adalah salah satu aliran keagamaan yang ada di Indonesia. "Ahmadiyah adalah salah satu aliran keagamaan yang ada di Indonesia," kata Hidayat.

... (transcription of the article text) ...

... (transcription of the article text) ...

Sisi Lain Kisruh Politik Mesir (Bagian 1) Skenario Membuat Lapar Demonstran di Lan

REPUBLIKA

www.republika.co.id

Kerusuhan Temanggung



Kerukunan Tercoreng

Masa dibersihkan dari legal, ilegal, hingga soka

Tempo, Selasa, 8 Februari 2011, hal. 1

Tempo, Selasa, 8 Februari 2011, hal. 1

Komnas HAM: Polri Biarkan Bentrokan Terjadi

Tempo, Selasa, 8 Februari 2011, hal. 1

Harus Ada Penyelesaian Mendasar



B

Tempo, Selasa, 8 Februari 2011, hal. 1

Tempo, Selasa, 8 Februari 2011, hal. 1

Tempo, Selasa, 8 Februari 2011, hal. 1

Selesaikan Kekerasan di Tingkat Bawah



Forum KAMN ASIA ET PASIFIK HAM

KOMNAS HAM

Tempo, Selasa, 8 Februari 2011, hal. 1

Tempo, Selasa, 8 Februari 2011, hal. 1

Tempo, Selasa, 8 Februari 2011, hal. 1

dan him I

Tempo, Selasa, 8 Februari 2011, hal. 1

Tempo, Selasa, 8 Februari 2011, hal. 1

Tempo, Selasa, 8 Februari 2011, hal. 1



INVESTIGASI: KOMNAS HAM

Surabaya, 14 Desember 2018. Setelah lima hari melakukan pengujian di lokasi kejadian bencana gempa di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Tim Nasional Investigasi Bencana (Tim Nasional Penyelidikan Bencana) telah selesai melakukan pengujian terhadap lokasi kejadian gempa.

Pemerintah Segera Putuskan Status Ahmadiyah

Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) M. Hidayat mengatakan, pemerintah harus segera memutuskan status Ahmadiyah.

Menurut Hidayat, pemerintah harus segera memutuskan status Ahmadiyah karena mereka adalah umat yang beragama Islam. Dia mengatakan, pemerintah harus segera memutuskan status Ahmadiyah karena mereka adalah umat yang beragama Islam.

Menurut Hidayat, pemerintah harus segera memutuskan status Ahmadiyah karena mereka adalah umat yang beragama Islam. Dia mengatakan, pemerintah harus segera memutuskan status Ahmadiyah karena mereka adalah umat yang beragama Islam.

Menurut Hidayat, pemerintah harus segera memutuskan status Ahmadiyah karena mereka adalah umat yang beragama Islam. Dia mengatakan, pemerintah harus segera memutuskan status Ahmadiyah karena mereka adalah umat yang beragama Islam.

Menurut Hidayat, pemerintah harus segera memutuskan status Ahmadiyah karena mereka adalah umat yang beragama Islam. Dia mengatakan, pemerintah harus segera memutuskan status Ahmadiyah karena mereka adalah umat yang beragama Islam.

Menurut Hidayat, pemerintah harus segera memutuskan status Ahmadiyah karena mereka adalah umat yang beragama Islam. Dia mengatakan, pemerintah harus segera memutuskan status Ahmadiyah karena mereka adalah umat yang beragama Islam.

Menurut Hidayat, pemerintah harus segera memutuskan status Ahmadiyah karena mereka adalah umat yang beragama Islam. Dia mengatakan, pemerintah harus segera memutuskan status Ahmadiyah karena mereka adalah umat yang beragama Islam.

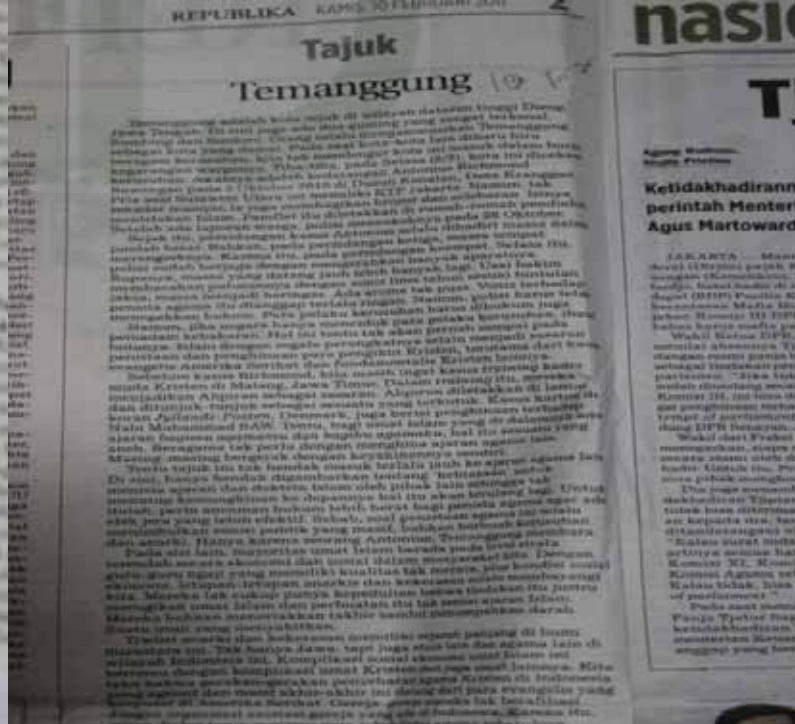
Menurut Hidayat, pemerintah harus segera memutuskan status Ahmadiyah karena mereka adalah umat yang beragama Islam. Dia mengatakan, pemerintah harus segera memutuskan status Ahmadiyah karena mereka adalah umat yang beragama Islam.

KOMNAS HAM
Surabaya, 14 Desember 2018. Setelah lima hari melakukan pengujian di lokasi kejadian bencana gempa di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Tim Nasional Investigasi Bencana (Tim Nasional Penyelidikan Bencana) telah selesai melakukan pengujian terhadap lokasi kejadian gempa.

Menurut Hidayat, pemerintah harus segera memutuskan status Ahmadiyah karena mereka adalah umat yang beragama Islam. Dia mengatakan, pemerintah harus segera memutuskan status Ahmadiyah karena mereka adalah umat yang beragama Islam.

Menurut Hidayat, pemerintah harus segera memutuskan status Ahmadiyah karena mereka adalah umat yang beragama Islam. Dia mengatakan, pemerintah harus segera memutuskan status Ahmadiyah karena mereka adalah umat yang beragama Islam.

Menurut Hidayat, pemerintah harus segera memutuskan status Ahmadiyah karena mereka adalah umat yang beragama Islam. Dia mengatakan, pemerintah harus segera memutuskan status Ahmadiyah karena mereka adalah umat yang beragama Islam.



JUMAT, 11 FEBRUARI 2011
8 RABIUL AWAL 1432 H
NOMOR 37 / TAHUN KE-19

Rp 2.900 / 28 Halaman
LUAR P. JAWA Rp 4.000 DITAMBAH ONGKOS KRUM

MAHAKA MEDIA

IKLAN: Telp: 021 791 84744, Faks: 021 798 1169,
e-mail: mahakamedia@indosat.net.id
SIRKULASI: Telp: 021 791 84746 Faks: 021 791
98442 e-mail: sirkulasi@republika.co.id

Penyulut Rusuh Temanggung yang Misterius

Oleh **Mohammad As'adi**

Raut wajahnya terlihat begitu tenang. Kehadiran massa pendemo yang memenuhi ruang sidang di Pengadilan Negeri Temanggung, Jawa Tengah, karena marah, tak membuatnya kecut.

Hari itu, Selasa (8/2), merupakan sidang vonis terhadap dirinya yang duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa kasus penistaan agama. Antonius Richmond Bowangan, itulah nama pria tersebut. Namanya mendarak muncul di media massa karena disebut-sebut sebagai penyulut kerusuhan di Temanggung sesaat sidang itu.

Sungguh tak disangka, kehadirannya di kota penghasil tembakau yang hanya untuk menginap semalam bisa berbuah rusuh. Membuat kita bertanya, siapakah sosok sebenarnya Antonius?

Sajak pertama kali kasus penistaan agama ini mencuat pada 23 Oktober 2010 lalu, hingga dua hari setelah rusuh, tak ada satu pun yang bisa menjelaskan identitas sesungguhnya pria berusia 50 tahun ini. *Republika* sempat mencari tahu dengan menelusuri Dusun Kenalan di Kecamatan Kranggan, Temanggung, tempat Antonius menginap tahun lalu.

PEMI

Infeksi En
spp) pada
selaput di
dengan ti
50 persen
menderita
bakteri in
kemungkin
karena pa
Produksi s
kering (dr
termasuk

Susu M

Indonesia n
per hari. Se
negeri (90 p
memenuhi
sehingga s
kebutuhan
dilmpor, ter
bahan baku
susu bubuk



MEGAT

Lima Tersangka Insiden Cikeusik

Muhammad Fakhri
Dewa Pribadi
Polisi harus usut
aktor intelektual.

Insiden Cikeusik yang terjadi pada Sabtu (10/1) malam lalu, telah menggemparkan warga Kabupaten Cilacap. Insiden tersebut melibatkan lima tersangka yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan terhadap warga sipil. Polisi harus mengusut aktor intelektual yang diduga terlibat dalam aksi tersebut.

Agung, dan Sidiyadhi, keduanya kerabat JAI. Menurut Agung, Sidiyadhi dan Sidiyadhi adalah intelektual yang terlibat dalam aksi tersebut. Mereka adalah tokoh-tokoh yang dikenal di lingkungan tersebut.

>> resonansi << Dan Zaini Unkred

Kekejian di Cikeusik

11 Feb 2011

Insiden Cikeusik yang terjadi pada Sabtu (10/1) malam lalu, telah menggemparkan warga Kabupaten Cilacap. Insiden tersebut melibatkan lima tersangka yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan terhadap warga sipil. Polisi harus mengusut aktor intelektual yang diduga terlibat dalam aksi tersebut.

REPUBLICA

11 Februari 2011

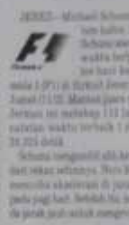
Insiden Cikeusik yang terjadi pada Sabtu (10/1) malam lalu, telah menggemparkan warga Kabupaten Cilacap. Insiden tersebut melibatkan lima tersangka yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan terhadap warga sipil. Polisi harus mengusut aktor intelektual yang diduga terlibat dalam aksi tersebut.

Garis Lurus Beragama

Dua organisasi kemasyarakatan beragama berkolaborasi untuk menggelar konferensi nasional yang bertema "Garis Lurus Beragama" di Gedung Sate, Bandung, Sabtu (12/2). Konferensi ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai organisasi keagamaan dan masyarakat sipil. Acara ini bertujuan untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keberagaman agama di Indonesia.

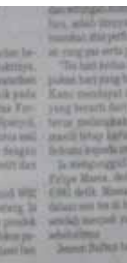
Salah satu pembicara dalam konferensi adalah Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Rida Sa'leh. Dalam sambutannya, Sa'leh menekankan pentingnya dialog antaragama untuk mencegah terjadinya konflik. Ia juga mengkritik tindakan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa kelompok radikal. Sa'leh berharap konferensi ini dapat menjadi titik tolak bagi terciptanya suasana damai dan harmonis di masyarakat.

Salah satu pembicara lainnya adalah Ketua Komisi Nasional Anti-Terrorisme (Komnas Antiteror), Agus Supriatno. Ia menegaskan bahwa terorisme adalah ancaman nyata bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme. Supriatno juga mengkritik tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok radikal yang mengancam keselamatan masyarakat.



GARIS LURUS

Tempat itu bisa jadi beragama tertentu, tetapi juga bisa jadi beragama lain. Itu yang harus kita pahami. Kita sebagai masyarakat harus menghormati kebebasan beragama. Kita sebagai pemerintah harus melindungi kebebasan beragama. Kita sebagai masyarakat harus menjaga kebebasan beragama. Kita sebagai pemerintah harus melindungi kebebasan beragama. Kita sebagai masyarakat harus menjaga kebebasan beragama.



GARIS LURUS

Tempat itu bisa jadi beragama tertentu, tetapi juga bisa jadi beragama lain. Itu yang harus kita pahami. Kita sebagai masyarakat harus menghormati kebebasan beragama. Kita sebagai pemerintah harus melindungi kebebasan beragama. Kita sebagai masyarakat harus menjaga kebebasan beragama. Kita sebagai pemerintah harus melindungi kebebasan beragama. Kita sebagai masyarakat harus menjaga kebebasan beragama.



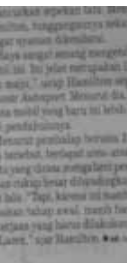
GARIS LURUS

Tempat itu bisa jadi beragama tertentu, tetapi juga bisa jadi beragama lain. Itu yang harus kita pahami. Kita sebagai masyarakat harus menghormati kebebasan beragama. Kita sebagai pemerintah harus melindungi kebebasan beragama. Kita sebagai masyarakat harus menjaga kebebasan beragama. Kita sebagai pemerintah harus melindungi kebebasan beragama. Kita sebagai masyarakat harus menjaga kebebasan beragama.



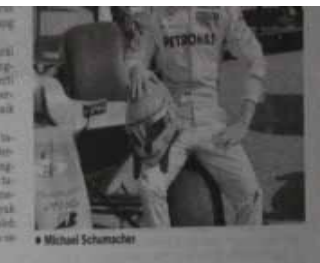
GARIS LURUS

Tempat itu bisa jadi beragama tertentu, tetapi juga bisa jadi beragama lain. Itu yang harus kita pahami. Kita sebagai masyarakat harus menghormati kebebasan beragama. Kita sebagai pemerintah harus melindungi kebebasan beragama. Kita sebagai masyarakat harus menjaga kebebasan beragama. Kita sebagai pemerintah harus melindungi kebebasan beragama. Kita sebagai masyarakat harus menjaga kebebasan beragama.



GARIS LURUS

Tempat itu bisa jadi beragama tertentu, tetapi juga bisa jadi beragama lain. Itu yang harus kita pahami. Kita sebagai masyarakat harus menghormati kebebasan beragama. Kita sebagai pemerintah harus melindungi kebebasan beragama. Kita sebagai masyarakat harus menjaga kebebasan beragama. Kita sebagai pemerintah harus melindungi kebebasan beragama. Kita sebagai masyarakat harus menjaga kebebasan beragama.



Michael Schumacher

Indonesia (PPMI) Mesir di Kairo. Pernyataan senada diutarakan Ketua Kesepakatan Keluarga Minang (KMM) Alno-

televisi yang menyiarkan perkembangan situasi di Mesir. Maklum, adik kami berada di Mesir." ■ **antara ed: rina chayani**

karyanya ke orang lain. "Jadi, tidak sedikit-sedikit meminta uang ke orang tua," ujar Arif. ■ **42 ed: rina chayani**

Komnas HAM akan Kirim Tim ke Temanggung

JAKARTA—Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengirim tim ke Temanggung, Jawa Tengah. Hal ini dilakukan untuk mengungkap dalang di balik aksi perusakan tiga gereja di Temanggung, Jawa Tengah, Selasa (8/2). Karena itulah, agenda pertama yang akan dilakukan Komnas HAM adalah meminta penjelasan soal kejadian ini dari aparat kepolisian.

"Sebab, aparat kepolisian terkesan lalai, jadi ini yang mau kita periksa," kata Wakil Ketua Komnas HAM Rida Sa'leh kepada *Republika*. Sa'leh (12/2). Fokus dari tim yang akan melakukan pemeriksaan, menurut dia, adalah ketelaahan kepolisian atas kejadian tersebut. Apalagi, tambah dia, kejadian tersebut sangat terkait dengan tanggung jawab polisi di lapangan.

Rida belum bisa menjelaskan kapan tim itu akan dikirim dan berapa orang yang hendak dikirim. "Kami masih mendis-

kusikan timnya," katanya.

Sementara itu, kemarin (12/2), dua dari 24 tersangka aksi amuk massa di Temanggung yang dibawa ke Semarang menjalani penahanan terpisah. Jika ke-22 tersangka sebelumnya dibawa ke Mapolda Jawa Tengah, dua orang tersangka ini ditempatkan di Mapolrestabes Semarang.

Keduanya, Sihabudin (46 tahun) warga Dusun Warurejo, Kebonsari Temanggung dan Lutfi Hakim Aziz (33) warga Desa Mandisari RT 2 RW 6 Parakan Temanggung Di Mapolrestabes Semarang pun mereka ditempatkan di ruang tahanan yang berbeda.

Kedua orang yang disangka memiliki peran dalam aksi amuk massa akibat ketidakpuasan atas hasil sidang kasus penistaan agama di PN Temanggung ini mendapatkan pengawasan ketat oleh aparat kepolisian.

Ketua Umum DPP Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba

Tawaran dan Anarkisme. Brigjen Polisi (Purn) Parasian Simanungkalit, mengatakan, untuk menghindari tindak kerusuhan dan anarkis, masyarakat harus memiliki daya tangkal.

Simanungkalit menyangkal kedatangan mereka untuk membentuk tim pencari fakta. "Kami ke sini untuk bertemu teman-teman dan berkoordinasi untuk menyelenggarakan dialog antartokoh masyarakat," katanya sesuai bertemu Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Edward Aritonang di Mapolres Temanggung, kemarin.

Seperti diketahui, tiga gereja di Temanggung menjadi sasaran amuk massa menyusul kerusuhan dalam persidangan kasus penistaan agama dengan terdakwa Antonius Richmond Barwengan, di Pengadilan Negeri Temanggung.

Sementara itu, penggiat Human Rights Watch (HRW) yang juga mengunggah video kejadian penyerangan warga Ahmadiyah ke situs Youtube, An-

dreas Harsono mengakui bahwa Arif, perekam secara lengkap insiden Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, merupakan orang yang berpengalaman dengan video. Sebab, menurut Andreas, Arif mampu mengambil gambar yang bermutu.

Andreas tidak bisa mengatakan bahwa Arif merupakan seorang profesional atau bukan. Ia menyatakan telah menerima secara total 28 file video dari Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Secara terpisah, Wakil Sekretaris Tim Pencari Fakta MUI, Cholil Nafis, mengungkapkan bahwa kasus Cikeusik bukanlah peristiwa penyerbuan terhadap Ahmadiyah. Dari investigasi yang dijalankan MUI, kata dia, peristiwa itu lebih tepat disebut bentrokan. "Di situ Ahmadiyah juga terbukti melanggar SKB," tutur dia. ■ **yasmira husni/s** towo pribadi/m as/as/rihan jatiadi **ed: rina chayani**

REPUBLICA

Indonesian newspaper masthead.

Small text block containing contact information or publication details.

Religi Akhlak Rasuli

Nabi Muhammad
diutus untuk mem-
perbaiki akhlak dan
peradaban.

Nabi Muhammad
diutus untuk mem-
perbaiki akhlak dan
peradaban.



KAJIAN AGAMA

14/07/2012 - Minggu, 14
di Desa Mekarjaya Kecamatan
Kaliwungu yang memiliki penduduk
sekitar 100 jiwa.

Desa Mekarjaya Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, pada Sabtu (12/7) kemarin, digelar kegiatan keagamaan yang bertema "Religi Akhlak Rasuli". Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Acara dibuka oleh Kepala Desa Mekarjaya, H. M. Hidayat, yang menyampaikan sambutan. Ia mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat, serta memperbaiki akhlak dan peradaban. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, yaitu Sabtu dan Minggu. Pada Sabtu, kegiatan dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan dilanjutkan dengan ceramah oleh Ustadz H. M. Hidayat. Pada Minggu, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya-jawab. Kegiatan ini ditutup dengan doa dan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Kegiatan ini mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat, serta memperbaiki akhlak dan peradaban.

Desa Mekarjaya Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, pada Sabtu (12/7) kemarin, digelar kegiatan keagamaan yang bertema "Religi Akhlak Rasuli". Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Acara dibuka oleh Kepala Desa Mekarjaya, H. M. Hidayat, yang menyampaikan sambutan. Ia mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat, serta memperbaiki akhlak dan peradaban. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, yaitu Sabtu dan Minggu. Pada Sabtu, kegiatan dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan dilanjutkan dengan ceramah oleh Ustadz H. M. Hidayat. Pada Minggu, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya-jawab. Kegiatan ini ditutup dengan doa dan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Kegiatan ini mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat, serta memperbaiki akhlak dan peradaban.

Desa Mekarjaya Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, pada Sabtu (12/7) kemarin, digelar kegiatan keagamaan yang bertema "Religi Akhlak Rasuli". Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Acara dibuka oleh Kepala Desa Mekarjaya, H. M. Hidayat, yang menyampaikan sambutan. Ia mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat, serta memperbaiki akhlak dan peradaban. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, yaitu Sabtu dan Minggu. Pada Sabtu, kegiatan dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan dilanjutkan dengan ceramah oleh Ustadz H. M. Hidayat. Pada Minggu, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya-jawab. Kegiatan ini ditutup dengan doa dan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Kegiatan ini mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat, serta memperbaiki akhlak dan peradaban.

Desa Mekarjaya Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, pada Sabtu (12/7) kemarin, digelar kegiatan keagamaan yang bertema "Religi Akhlak Rasuli". Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Acara dibuka oleh Kepala Desa Mekarjaya, H. M. Hidayat, yang menyampaikan sambutan. Ia mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat, serta memperbaiki akhlak dan peradaban. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, yaitu Sabtu dan Minggu. Pada Sabtu, kegiatan dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan dilanjutkan dengan ceramah oleh Ustadz H. M. Hidayat. Pada Minggu, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya-jawab. Kegiatan ini ditutup dengan doa dan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Kegiatan ini mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat, serta memperbaiki akhlak dan peradaban.

SYB Diduga Aktor Rusuh Temanggung

M As'adi,
S Bawo Pitahdi

Perekaman bentrok
Cikeusik diduga
dilakukan secara
terencana.

TEMANGGUNG — Kepolisian menyatakan warga Kecamatan Wanasaboyi, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah (Jateng), berinisiatif SYB sebagai salah seorang penggerak kerusuhan Temanggung yang terjadi pada Selasa (6/7). Menurut Kepala Jajeng Iriyan Pol Edward Ardiyaning, yang bertanggung jawab dalam penanganan kerusuhan, mengungkap warga, memberi petunjuk, dan mendanai kegiatan. "Saat ini kita memang harus menemukannya satu orang yang diduga telah intelektual dalam peristiwa kerusuhan pada Selasa (6/7). Hanya saja, nanti bertumbuh," katanya. Setelah (12/7) pagi, di Mapolres Temanggung. Hingga saat ini, pihak kepolisian telah meminta keterangan 22 warga. 24 dipanggil sebagai tersangka, dan telah dibawa ke Mapolda Jateng di Semarang. Kepala mengatakan, peristiwa kerusuhan yang berakibat perusakan dan pembakaran gereja tersebut tidak ada keterkaitan dengan organisasi teroris. Mereka datang ke pondokan selaku pribadi. Pengoperannya mereka dilakukan oleh SYB. SYB dua kali melakukan pengumpulan warga, yakni pada Senin (7/7) atau satu hari sebelum pembenturan kasus penuntutan agama di Pengadilan Negeri (PN) Temanggung dengan terdakwa Antonius Richmond Barungga,

Pengumpulan warga yang diduga dilakukannya pada Selasa juga, sebelum mereka berangkat untuk menyaksikan pertandingan yang berakhir rusak. "Pada pertemuan itu, warga juga diberi uang saku dan nasi bungkus." Sementara itu, di Semarang, dua dari 24 tersangka warga Temanggung yang diwawancarai kepolisian ke Semarang, menjalani pemeriksaan terpisah. Sebanyak 22 orang sebelumnya diwawancarai ke Mapolda Jateng, sedangkan dua orang lainnya ditempatkan di Mapolresabes Semarang. Penahanan kedua orang ini terkait dengan peran mereka dalam aksi kerusuhan akibat ketidakpercayaan atas hasil sidang kasus Richmond itu. Kedua orang itu adalah Sihabuddin (46), warga Dusun Waratejo, Kebonjari, Temanggung dan Lutfi Hakim Anas (33) warga Desa Mandisari RT 2 RW 6, Pakoran, Temanggung. Sidhadin ditandatangani di ruang tabuhan nomor 1, sedangkan Lutfi di ruang tabuhan nomor 6. Menurut keterangan sumber di Mapolresabes, penahanan Lutfi ke-2nya (14), warga Dusun Waratejo, Kebonjari, Temanggung. Berdasar data di Mapolda Jawa Tengah, mobil paksa M15-selada L200 model AS 1189 AK yang dirita polisi dari terdakwa Nardono (36), warga Dusun Kemporan, RT 13 RW 4, Purwasari Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, dipanggil sial bukti. Mobil ini ditampatkan di Mapolda Jateng. Alat bukti lainnya yang ikut ditata, antara lain sepeda motor patah (gigit dan gigitnya), berikis, magalon, dan bukti perusakan (geperan nama, papan rambu lalu lintas, dan lainnya). Di antara barang bukti itu juga terdapat empat peti besi yang masing-masing berisi berakusan



KASUS TEMANGGUNG

Sebanyak 24 warga Temanggung tiba di Mapolda Jateng untuk menjalani pemeriksaan, di Semarang, Sabtu (12/7). Mereka diperiksa terkait kasus kerusuhan di Temanggung pada Selasa (6/7).

vidisme satu meter kubik. Kepolisian belum memberikan penjelasan terkait barang bukti itu. Sampai akhir pekan ini, Mapolda Jateng menampung 14 orang tersangka. Enam tersangka terakhir merupakan penambuhan dari pemeriksaan ke-24 warga Temanggung yang dilakukan pada Jumat. "Kerusuh terungkap adalah pelakunya di lapangan," kata Edward.

Pita biru
Di Jakarta, Ketua Dewan Pembina Tim Pembela Madia (TPM) Mahendradatta, mengungkapkan ada pihak tak dikenal yang membagikan pita biru kepada warga. Pembagian pita biru sudah dilaksanakan sebelumnya terduga bentoran di Kampung

Paar Peutuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikusik, Kabupaten Punggelang, Duren, Abad (6/7). Menurutnya, pita biru itu sebagai pemada para pererat kelompok Ahmadiyah. "Ada beberapa orang yang membagikan pita biru itu kepada warga dan tidak dikawal. Karena, warga di sana saling mengenal satu sama lain," katanya, Abad (12/7). Pembagian pita biru ini mengungkap pekeran perusakan Cikeusik yang dikenal dengan nama Arif. Pita biru itu, lanjut Mahendradatta, dibagikan karena para pengawal gambar menuntutkan perbedaan antara peserang dan korban. Dengan begitu, ia menyimpulkan, pengambilan gambar yang dilakukan Arif itu dilaku-

memutuskan Detasemen Kinara (Denas) BR. Mahendradatta juga menyoroti tersangka bentoran Cikusik yang kini menjadi tujuh orang. Diakunya, para tersangka itu tidak terlihat dalam gambar rekaman. Arif, Da memantolkan, terungkap UJ, tidak ada dalam rekaman Arif. Wakil dari Indonesia Police Watch, Neta S Pase, dalam persyaratannya meminta jajaran Polri untuk mengungkap siapa di belakang kelompok Pita Biru. "Penggunaan pita biru dalam kasus Pandeglang patut dicermati untuk memajukan kelompok tertentu. Polri harus segera mengungkapkan siapa di belakang kelompok Pita Biru agar tidak muncul keributan dan konflik di akar rumput." Sementara itu, pengingat Human Rights Watch (HRW), Andras Harsono, mengungkap, Arif merupakan orang yang berpengalaman dengan video. Itu terlihat dari pengambilan gambar yang dimulainya bermula. Itu dimirsa oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) untuk menyebarkan video Arif itu. Namun, Andras tidak bisa mengungkap bahwa Arif merupakan seorang profesional atau bukan, karena Andras tidak mengetahui apa jenis pekerjaan yang digeluti Arif sehari-hari. "Yang pasti kerjanya bermula," katanya. Andras dihubungi JAI yang memberikan 28 file video bentoran. JAI ingin agar video ini bisa diupload ke masyarakat. Maka itu, pada Senin (7/7), satu hari pembenturan, Andras menemui para anggota JAI. "Tapi bukan Arif. Karena Arif pada waktu itu masih dalam kondisi tertekan. Yang harus dipikirkan bukan dia, namun dari Jemaat Ahmadiyah," ■ (sumber: www.pikiran-rakyat.com, 14/07/2012)

Jangan Mencemari Agama Lain

Mengoyak Kerukunan Beragama

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai umat beragama tentu saja memiliki keyakinan masing-masing. Namun, sebagai sesama manusia, kita juga harus menghormati keyakinan orang lain. Jangan sampai kita mencemari agama lain, karena hal itu dapat mengoyak kerukunan beragama.

Agama adalah keyakinan yang dianut oleh manusia. Agama memiliki fungsi sosial, yaitu untuk mengatur kehidupan manusia di dunia ini. Agama juga memiliki fungsi individu, yaitu untuk memberikan makna hidup bagi penganutnya.

Salah satu prinsip dalam agama adalah saling menghormati. Kita harus menghormati keyakinan orang lain, meskipun kita berbeda-beda keyakinan. Dengan saling menghormati, kita dapat hidup rukun dan damai.

Jika kita mencemari agama lain, kita akan merusak kerukunan beragama. Kita akan menimbulkan pertentangan dan konflik antar umat beragama. Oleh karena itu, kita harus menjaga kerukunan beragama dengan saling menghormati.

Menyampaikan kepada umat beragama, agar tetap menghormati keyakinan orang lain. Kita sebagai umat beragama harus saling menghormati dan menjaga kerukunan beragama. Jangan sampai kita mencemari agama lain, karena hal itu dapat mengoyak kerukunan beragama.

Agama adalah keyakinan yang dianut oleh manusia. Agama memiliki fungsi sosial, yaitu untuk mengatur kehidupan manusia di dunia ini. Agama juga memiliki fungsi individu, yaitu untuk memberikan makna hidup bagi penganutnya.

Salah satu prinsip dalam agama adalah saling menghormati. Kita harus menghormati keyakinan orang lain, meskipun kita berbeda-beda keyakinan. Dengan saling menghormati, kita dapat hidup rukun dan damai.

Jika kita mencemari agama lain, kita akan merusak kerukunan beragama. Kita akan menimbulkan pertentangan dan konflik antar umat beragama. Oleh karena itu, kita harus menjaga kerukunan beragama dengan saling menghormati.

33 Secara umum, umat Islam sangat toleran. Orang Indonesia mayoritas Islam, tapi Indonesia bukan negara Islam, Islam juga bukan dasar negara. **33**



Walaupun Islam sangat toleran, kita sebagai umat beragama harus saling menghormati dan menjaga kerukunan beragama. Jangan sampai kita mencemari agama lain, karena hal itu dapat mengoyak kerukunan beragama.

Agama adalah keyakinan yang dianut oleh manusia. Agama memiliki fungsi sosial, yaitu untuk mengatur kehidupan manusia di dunia ini. Agama juga memiliki fungsi individu, yaitu untuk memberikan makna hidup bagi penganutnya.

Salah satu prinsip dalam agama adalah saling menghormati. Kita harus menghormati keyakinan orang lain, meskipun kita berbeda-beda keyakinan. Dengan saling menghormati, kita dapat hidup rukun dan damai.

Jika kita mencemari agama lain, kita akan merusak kerukunan beragama. Kita akan menimbulkan pertentangan dan konflik antar umat beragama. Oleh karena itu, kita harus menjaga kerukunan beragama dengan saling menghormati.

Walaupun Islam sangat toleran, kita sebagai umat beragama harus saling menghormati dan menjaga kerukunan beragama. Jangan sampai kita mencemari agama lain, karena hal itu dapat mengoyak kerukunan beragama.

Agama adalah keyakinan yang dianut oleh manusia. Agama memiliki fungsi sosial, yaitu untuk mengatur kehidupan manusia di dunia ini. Agama juga memiliki fungsi individu, yaitu untuk memberikan makna hidup bagi penganutnya.

Salah satu prinsip dalam agama adalah saling menghormati. Kita harus menghormati keyakinan orang lain, meskipun kita berbeda-beda keyakinan. Dengan saling menghormati, kita dapat hidup rukun dan damai.

Jika kita mencemari agama lain, kita akan merusak kerukunan beragama. Kita akan menimbulkan pertentangan dan konflik antar umat beragama. Oleh karena itu, kita harus menjaga kerukunan beragama dengan saling menghormati.

Walaupun Islam sangat toleran, kita sebagai umat beragama harus saling menghormati dan menjaga kerukunan beragama. Jangan sampai kita mencemari agama lain, karena hal itu dapat mengoyak kerukunan beragama.

Agama adalah keyakinan yang dianut oleh manusia. Agama memiliki fungsi sosial, yaitu untuk mengatur kehidupan manusia di dunia ini. Agama juga memiliki fungsi individu, yaitu untuk memberikan makna hidup bagi penganutnya.

Salah satu prinsip dalam agama adalah saling menghormati. Kita harus menghormati keyakinan orang lain, meskipun kita berbeda-beda keyakinan. Dengan saling menghormati, kita dapat hidup rukun dan damai.

Jika kita mencemari agama lain, kita akan merusak kerukunan beragama. Kita akan menimbulkan pertentangan dan konflik antar umat beragama. Oleh karena itu, kita harus menjaga kerukunan beragama dengan saling menghormati.

ANDREAS ANANGGURU YEWANGOE KETUA PGI

Fundamentalisme Kasar Harus Disadarkan



Fundamentalisme kasar yang mengancam kerukunan beragama harus disadarkan. Kita sebagai umat beragama harus saling menghormati dan menjaga kerukunan beragama. Jangan sampai kita mencemari agama lain, karena hal itu dapat mengoyak kerukunan beragama.

Agama adalah keyakinan yang dianut oleh manusia. Agama memiliki fungsi sosial, yaitu untuk mengatur kehidupan manusia di dunia ini. Agama juga memiliki fungsi individu, yaitu untuk memberikan makna hidup bagi penganutnya.

Salah satu prinsip dalam agama adalah saling menghormati. Kita harus menghormati keyakinan orang lain, meskipun kita berbeda-beda keyakinan. Dengan saling menghormati, kita dapat hidup rukun dan damai.

Jika kita mencemari agama lain, kita akan merusak kerukunan beragama. Kita akan menimbulkan pertentangan dan konflik antar umat beragama. Oleh karena itu, kita harus menjaga kerukunan beragama dengan saling menghormati.

Walaupun Islam sangat toleran, kita sebagai umat beragama harus saling menghormati dan menjaga kerukunan beragama. Jangan sampai kita mencemari agama lain, karena hal itu dapat mengoyak kerukunan beragama.

Agama adalah keyakinan yang dianut oleh manusia. Agama memiliki fungsi sosial, yaitu untuk mengatur kehidupan manusia di dunia ini. Agama juga memiliki fungsi individu, yaitu untuk memberikan makna hidup bagi penganutnya.

Salah satu prinsip dalam agama adalah saling menghormati. Kita harus menghormati keyakinan orang lain, meskipun kita berbeda-beda keyakinan. Dengan saling menghormati, kita dapat hidup rukun dan damai.

Jika kita mencemari agama lain, kita akan merusak kerukunan beragama. Kita akan menimbulkan pertentangan dan konflik antar umat beragama. Oleh karena itu, kita harus menjaga kerukunan beragama dengan saling menghormati.

33 Kita ingatkan, tidak boleh ada yang memusuhi dan mengancam agama lain. **33**

Walaupun Islam sangat toleran, kita sebagai umat beragama harus saling menghormati dan menjaga kerukunan beragama. Jangan sampai kita mencemari agama lain, karena hal itu dapat mengoyak kerukunan beragama.

Agama adalah keyakinan yang dianut oleh manusia. Agama memiliki fungsi sosial, yaitu untuk mengatur kehidupan manusia di dunia ini. Agama juga memiliki fungsi individu, yaitu untuk memberikan makna hidup bagi penganutnya.

Salah satu prinsip dalam agama adalah saling menghormati. Kita harus menghormati keyakinan orang lain, meskipun kita berbeda-beda keyakinan. Dengan saling menghormati, kita dapat hidup rukun dan damai.

Jika kita mencemari agama lain, kita akan merusak kerukunan beragama. Kita akan menimbulkan pertentangan dan konflik antar umat beragama. Oleh karena itu, kita harus menjaga kerukunan beragama dengan saling menghormati.

publik

Cepat Sikapi Ahmadiyah

Presiden serukan penanganan umat beragama.

Presiden Joko Widodo menyerukan penanganan yang cepat terhadap Ahmadiyah. Beliau mengatakan bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang menyebarkan ajaran sesat dan dapat mengancam kerukunan beragama. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengambil tindakan tegas terhadap Ahmadiyah.

nasional

Kapolri: UJ Penggerak Kerusakan Cikeusik

Kapolri menyatakan bahwa UJ (Umat Jawa) adalah penggerak utama kerusakan di Cikeusik. Beliau mengatakan bahwa UJ melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan merusak kerukunan beragama. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengambil tindakan tegas terhadap UJ.

wawasan

Arie Sujito Sosiolog UGM

Negara tidak Hadir Saat Dibutuhkan

Arie Sujito, sosiolog UGM, menyatakan bahwa negara tidak hadir saat dibutuhkan. Beliau mengatakan bahwa pemerintah tidak mengambil tindakan yang tegas terhadap kelompok-kelompok yang mengancam kerukunan beragama. Oleh karena itu, masyarakat harus mengambil inisiatif sendiri untuk menjaga kerukunan beragama.

AMANAT BANI NURANI BAKYAT

Banyak Partai Politik Rontok

Diperkirakan Hanya 10 Parpol yang Lolos

AMMANA, 8 JANUARI - Pemilihan umum umum (Pemilu) 2014 akan digelar pada tahun 2014. Banyak partai politik yang diperkirakan akan rontok atau tidak lolos ke parlemen. Diperkirakan hanya 10 partai politik yang akan lolos ke parlemen.

Menurut pengamatan, banyak partai politik yang diperkirakan akan rontok atau tidak lolos ke parlemen. Diperkirakan hanya 10 partai politik yang akan lolos ke parlemen.

DAFTAR PARTAI POLITIK

Partai Politik	Anggota
PKS	100.000
PKB	100.000
PKU	100.000
PKS	100.000
PKB	100.000
PKU	100.000
PKS	100.000
PKB	100.000
PKU	100.000
PKS	100.000
PKB	100.000
PKU	100.000

POLITIK & HUKUM

Drama Awal Pemilu 2014

AMMANA, 8 JANUARI - Drama awal pemilu 2014 akan dimulai dengan pengumuman hasil verifikasi partai politik. Banyak partai politik yang diperkirakan akan rontok atau tidak lolos ke parlemen.

Menurut pengamatan, banyak partai politik yang diperkirakan akan rontok atau tidak lolos ke parlemen. Diperkirakan hanya 10 partai politik yang akan lolos ke parlemen.



Parpol Menggugat, KPU Siap Adu Data

PEMERINTAH KOMPAR - Ratusan partai politik menggugat hasil verifikasi partai politik yang digelar KPU. KPU siap mengadu data.

AMMANA, 9 JANUARI - Ratusan partai politik menggugat hasil verifikasi partai politik yang digelar KPU. KPU siap mengadu data.

Menurut pengamatan, banyak partai politik yang diperkirakan akan rontok atau tidak lolos ke parlemen. Diperkirakan hanya 10 partai politik yang akan lolos ke parlemen.

TAJUK BENCANA

Setelah Menuju 9 April 2014

AMMANA, 9 JANUARI - Setelah menuju 9 April 2014, pemerintah akan menggelar pemilu. Banyak partai politik yang diperkirakan akan rontok atau tidak lolos ke parlemen.

Menurut pengamatan, banyak partai politik yang diperkirakan akan rontok atau tidak lolos ke parlemen. Diperkirakan hanya 10 partai politik yang akan lolos ke parlemen.

POLITIK & HUKUM

Ada Syarat untuk Bergabung

AMMANA, 10 JANUARI - Ada syarat untuk bergabung ke partai politik. Banyak partai politik yang diperkirakan akan rontok atau tidak lolos ke parlemen.

Menurut pengamatan, banyak partai politik yang diperkirakan akan rontok atau tidak lolos ke parlemen. Diperkirakan hanya 10 partai politik yang akan lolos ke parlemen.

Sembilan Tambah Satu

AMMANA, 10 JANUARI - Sembilan tambah satu partai politik yang diperkirakan akan rontok atau tidak lolos ke parlemen.

Menurut pengamatan, banyak partai politik yang diperkirakan akan rontok atau tidak lolos ke parlemen. Diperkirakan hanya 10 partai politik yang akan lolos ke parlemen.

Partai yang Gaduh

17 Januari 2013 Oleh BAYU DARDIAS

Ritual menjelang pemilu hampir selalu mirip. Seluruh partai kecil dan partai baru, optimistis dapat memenuhi syarat menjadi peserta pemilu saat Undang-Undang Pemilu disahkan.

Setahun kemudian, mereka gaduh karena tidak lolos persyaratan dan gagal menjadi peserta pemilu. Sasaran kegaduhan adalah penyelenggaraan pemilu. Mereka tak mungkin mengaitkan partai pesingnya di DPR karena telah telanjur optimistis. Mereka juga tidak mungkin menerima begitu saja karena kehormatan dan terutama uang telah telanjur ditunjukkan.

Hanya saja, tahun ini kegaduhan semakin menjadi. Tengoklah kegaduhan yang baru lalu, bahkan interupsi telah datang bahkan sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai mendengarkan presentasi KPU daerah. Mirip pasar malam yang penuh pedagang yang memasarkan dagangannya sendiri. Partai-partai yang bersemangat menepikan demokrasi, tetapi justru memantulkannya.

Penyebabnya antara lain partai-partai tersebut sudah telanjur diberi hati. Dua institusi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang seharusnya meredakan kegaduhan justru memercikannya.

Bersama KPU, kedua institusi tersebut seharusnya bekerja sama menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan minim kegaduhan. Sayangnya, veto kuasa yang tersebut menjadikan masing-masing merasa berkuasa. Ketiganya bahkan menjelma menjadi penyelenggara pemilu; semua menjadi KPU dengan caranya sendiri-sendiri.

KPU dan Bawaslu selalu diingatkan Ganjar Pranowo, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, jangan seperti kartun Tom dan Jerry. Namun, sejak awal keduanya tepat dipersonifikasikan dua tokoh imajiner itu.

Bawawlu adalah kucing Tom yang selalu mencari-cari kesalahan dan kelengahan Tioas Jerry, si KPU. Tinggallah si anjing budak DKPP yang selalu dibanggakan dari kantukanya. Karena baru bangun tidur, keputusannya menjadi mimpi buruk.

Veto politik

Dalam bukunya yang berjudul *The Power of Institution* (2003), pengamat Indonesia yang pernah mengajar di Filsafat Universitas Gadjah Mada, Andrew McIntyre, menuliskan hal menaruh tentang veto politik dan efektivitas pemerintahan. Menurut dia, negara di mana veto politik hanya bertumpu pada segelintir institusi menjadikan negara tersebut penuh masalah.

Sebaliknya, negara di mana veto politik terlalu banyak, juga akan dirundung masalah. Dia menggaribarkan seperti kurva huruf V. Sumbu X merupakan veto politik dan sumbu Y masalah. Semakin tinggi angkanya, Kita dituntut untuk menemukan titik tengah yang rendah dari masalah dan sebaran veto yang pas.

Pemilu kita akan dirundung bencana karena veto politik tidak hanya dimiliki KPU sebagai penyelenggara, tetapi dimiliki secara menyebar ke dua yang lain. Desain awal yang berusaha mengeliminasi kemungkinan KPU main mata dengan peserta pemilu dipahami berlawanan.

Hanya sedikit setelah KPU memutuskan 10 peserta pemilu, Bawaslu sudah menyatakan keputusan tersebut belum final. Sebagaimana pengalaman pada seleksi administratif, kita final didapatkan dari DKPP yang mewajibkan KPU membuat verifikasi faktual terhadap partai yang tidak lolos seleksi administratif. Janggal dan jauh hubungannya dengan kode etik yang menjadi domain kewenangannya.

Jika belajar dari pengalaman saat verifikasi, dari 12 partai yang direkomendasikan Bawawlu untuk mengikuti verifikasi faktual, setelah gagal di administrasi, tidak ada satu pun yang akhirnya menjadi peserta pemilu.

Hampir dapat dipastikan, seluruh tahapan penting di KPU

akan selalu mengalami tahapan yang sama, yakni diputuskan KPU, gugatan difasilitasi Bawaslu, dan kata akhir ada di DKPP. Hal ini tentu mengganggu tahapan pemilu dan mengancam demokrasi Indonesia yang disebarkan pada partai politik, pemilu, dan parlemen.

Bangsa ini sudah memiliki pekerjaan rumah yang luar biasa besar terkait dengan partai politik yang tidak terinstitusionalisasi dan parlemen yang tidak mewakili rakyat. Jangkakan bekerja sama dengan partai lain, faksi di internal partai lebih sering berseteru. Parlemen kita, selain tidak pernah memenuhi target capaian kerja sejak reformasi, juga selalu bersemangat jika studi banding meskipun bukan negara yang tepat untuk dituju.

Hanya saja, dalam tiga pemilu setelah reformasi, demokrasi diselamatkan oleh pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Secara umum hasil pemilu dapat diterima dan menjadi pegangan untuk melangkah ke depan.

Bahkan dengan KPU lalu yang compang-camping, kita masih memiliki DPR yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai hasil pemilu. Kita juga memiliki presiden dengan legitimasi kuat. Kita beruntung Susilo Bambang Yudhoyono menang dengan cukup meyakinkan. Jika hasilnya mungkin bencana Surtiba bisa terjadi di sini.

Saat ini, pemilu terancam oleh kegaduhan yang tidak perlu. Desain dan tahapan pemilu kita tidak mengakomodasi kegaduhan yang sama untuk terus berulang. Selain energi yang terbuang, waktu untuk seluruh tahapan pemilu juga sangat berlimpitan. Jika semua merasa saling berkuasa, bangsa ini akan binasa.

Sudah saatnya kita hentikan kegaduhan karena kita sedang dalam ujian demokrasi. Di mana mana, pada saat ujian, semua harus tenang agar bisa lulus dengan baik.

BAYU DARDIAS
Dosen Jurusan Politik dan Pemerintahan Filsafat Universitas Gadjah Mada, Mahasiswa PhD di Australian National University

JELANG PEMILU Amankan Pemilu 2014 secara Optimal

JAKARTA, KOMPAS - Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Jr) Tumar Siregar dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hani Manik menandatangani nota kesepakatan (MOU) yang berisi langkah-langkah pengamanan penyelenggaraan pemilu tahun 2014. Tanda tangan ini ditandatangani di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (16/1).

CALON ANGGOTA LEGISLATIF Partai Siap Penuhi Kuota Perempuan

JAKARTA, KOMPAS - Partai politik peserta Pemilihan Umum 2014 menyatakan siap memenuhi syarat keberagaman perempuan minimal 30 persen dalam daftar calon anggota legislatif. Hampir semua partai juga telah melakukan dialog pemerintah untuk bagi peran yang tak menentu untuk tercapai.

menjadi aman dilaksanakannya langkah pengamanan Polri. Saat dilaksanakan, penyelenggaraan pemilu tetap dipantau oleh berbagai institusi dan tidak terganggu dari pihak yang berkepentingan atau pihak lain.

Partai Siap Penuhi Kuota Perempuan

sekitar kesulitan memenuhi kuota perempuan pada Pemilu 2014. Apolagi, PAN memiliki sejumlah organisasi yang bergerak di perempuan, seperti Perempuan Amanat Perjuangan dan Forum Solidaritas Amanat Perempuan.

Untuk itu, partai-partai tersebut akan melakukan dialog dengan pemerintah untuk berbagi peran yang tak menentu untuk tercapai.

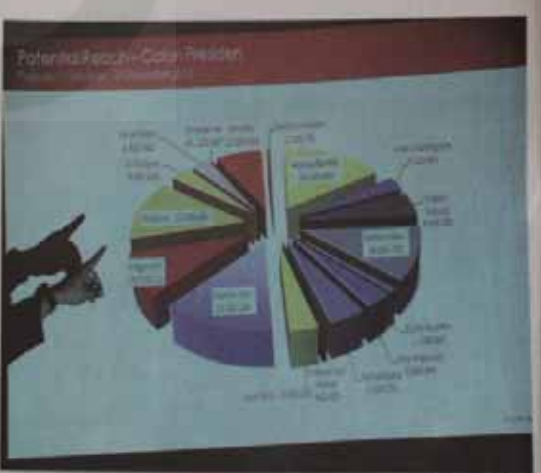
Partai Siap Penuhi Kuota Perempuan

sekitar kesulitan memenuhi kuota perempuan pada Pemilu 2014. Apolagi, PAN memiliki sejumlah organisasi yang bergerak di perempuan, seperti Perempuan Amanat Perjuangan dan Forum Solidaritas Amanat Perempuan.

POLITIK & HUKUM

PARTAI POLITIK Simak Media Sosial

JAKARTA, KOMPAS - Di tengah suasana menjelang pemilu, partai-partai politik semakin aktif di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa partai-partai politik semakin dekat dengan masyarakat.



Partai-partai politik semakin aktif di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa partai-partai politik semakin dekat dengan masyarakat.

Parpol Terancam Gagal Pemilu

Penuhi Keterwakilan Perempuan

JAKARTA, KOMPAS — Partai politik yang gagal memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam daftar calon anggota legislatif di suatu daerah pemilihan dinyatakan tidak memenuhi syarat ikut Pemilu 2014 di dapil tersebut. Komisi Pemilihan Umum akan menyusun simulasi ketentuan itu dengan memperhatikan alokasi kursi tiap dapil.

"Syarat keterwakilan perempuan minimal 30 persen di daftar caleg sudah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD. Kami hanya menegaskan lewat peraturan KPU," kata Ketua KPU Hani Kamil Manik, Kamis (17/1), di Kompleks Parlemen, Jakarta.

KPU akan terus mengemban tugas berat dalam mengatur pemilu, antara lain memastikan ketentuan keterwakilan perempuan. "Pengambilan syarat caleg yang belum memenuhi syarat akan terus dilakukan selama masih ada waktu. Jika waktu perbaikan daftar caleg sudah habis dan persyaratan belum dipenuhi di suatu dapil, KPU akan menyatakan partai tersebut tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu di dapil yang bersangkutan," papar Hani.

Sebagai panduan dari pelaksanaan ketentuan itu, lanjutnya, KPU akan membuat simulasi dengan memperhatikan alokasi kursi tiap dapil. Misalnya, jumlah kursi DPR di setiap dapil berbeda-beda, 3-10 kursi, sehingga jumlah caleg juga berbeda-beda.

Hasil simulasi yang disusun KPU, ujar anggota Komisi II DPR, Nurul Arifin, akan ditunjukkan dalam peraturan KPU.

Ray Bangkita dari Lingkar Madani Indonesia berharap tidak ada tawar-menawar atas ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30 persen. Kesepakatan itu sebagai bentuk *affirmative action* bagi peran politik perempuan.

Namun, sanksi disqualifikasi bagi parpol yang tidak memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan di dapil dinilai terlalu berat. "Salah satu upaya afirmasi untuk perempuan itu harus dipejuangkan, realitasnya masih sulit menjangkau perempuan untuk mengisi daftar caleg, terutama di tingkat kabupaten/kota."

Pandangan itu disampaikan Ketua Badan Pembinaan Hukum Partai Hati Nurani Rakyat Yuddy Christand, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan M. Hamahumarty, serta Wakil Ketua Bidang Politik, Pemerintahan, Hukum, dan Keamanan Partai Keadilan Sejahtera Agus Nurcahya.

Ketiganya sepakat, kebijakan afirmasi untuk perempuan harus didukung. Namun, mereka tak sepakat jika perhitungan kuota 30 persen caleg perempuan itu berbasis dapil karena realitasnya tidak pada semua daerah ketentuan itu bisa di-



Simpatisan Jaringan Soli memperhatikan spanduk di memasuki lingkungan fatar pemerintah Presiden melepas pelangaran hak asasi manusia, atau dikenal dengan

HAKIM AGUNG Y. Polri Tungg

JAKARTA, KOMPAS — Nyidik Badan Reserse Krin Kepolisian Negara RI be memperoleh putusan selu hakim agung peninjauan ker dalam perkara narabekta des terpidana Hanky Gunawan 3 diduga dipaparkan Hakim Ag Ahmad Yaminis. Burek Polri masih berkoordinasi negri Mahkamah Agung in mendapatkan surat putusan tersebut.

"Dokumen dari Komis Y sid (KY) tidak ala surat put asil," kata Kepala Bareskrim I Komisaris Jenderal Sutarna Jakarta, Kamis (17/1), saat tanya perbandingan peneliti an kasus dengan pemalanan tasan oleh Yaminis.

Surat putusan asli yang makud adalah putusan selu hak terpidana Hanky Gun

POLITIK & HUKUM

PEMILU 2014 Politisi Busuk dan Pengangguran Politik

Pemilihan umum akan datang paling lambat tiga bulan lagi. Saat ini, politisi busuk dan pengangguran politik sudah mulai bermunculan. Banyak politisi yang sudah lama tidak aktif di partai mereka, namun tetap saja namanya ada di daftar calon anggota legislatif. Hal ini menunjukkan bahwa politisi busuk dan pengangguran politik sudah mulai bermunculan.

Tolak Politisi Korup

Masyarakat agar Awasi Perekrutan Caleg

JAKARTA, KOMPAS — Partai politik dituntut untuk menolak politisi korup dan pengangguran politik dalam perekrutan caleg dan daftar calon anggota legislatif. Masyarakat harus mengawasi perekrutan caleg dan daftar calon anggota legislatif.

Proses seleksi caleg oleh parpol merupakan momen penting karena menentukan wajah DPR dan DPRD

Proses seleksi caleg oleh parpol merupakan momen penting karena menentukan wajah DPR dan DPRD. Masyarakat harus mengawasi perekrutan caleg dan daftar calon anggota legislatif. Politisi korup dan pengangguran politik harus ditolak.

Media Center for Partai Buka Daftar Caleg. Includes a photo of several men sitting at a table, and text about the party's recruitment process and criteria for candidates.

Media Center for Partai Buka Daftar Caleg. Includes a photo of several men sitting at a table, and text about the party's recruitment process and criteria for candidates.

8 Januari 2013



9 Januari 2013



10 Januari 2013



11 Januari 2013



12 Januari 2013



13 Januari 2013
14 Januari 2013



15 Januari 2013



16 Januari 2013



Peneilitian Tugas Akhir
Oleh: Budi Ayani
Tema penelitian: Media dan Islam Politik: Analisis Isi Pemberitaan *Kompas* dan
Republika

No:

Identitas:

Nama	L/P:	Umur:	Tahun
Pekerjaan			
Alamat			
No telepon/email			
Pewawancara			
Tanggal wawancara			

1. Media/koran apa saja yang sering anda baca?
 - a. Sebutkan?
 - b. Kenapa anda membaca media /koran tersebut?
2. berapa kali anda baca?
 - a. kapan saja anda baca?.
 - b. Dimana saja anda baca?
3. Bagaimana anda membacanya?
 - a. Apa tahapan anda dalam membacanya?.,
 - b. Kriteria apa/berita apa saja yang anda baca?
 - c. Berita apa yang sering anda baca?
4. Informasi apa saja yang anda peroleh dari media (koran)? Sebutkan?
5. Informasi yang ada di media, apakah langsung anda konsumsi?
 - a. Jika iya kenapa?
 - b. Jika tidak kenapa?
6. Apakah informasi itu dijadikan refrensi pengetahuan anda?
 - a. Jika iya kenapa?.
 - b. Bagaimana caranya ?
 - c. Jika tidak kenapa?
7. Apa tujuan anda membaca koran? .Apakah bermanfaat bagi anda membaca media/koran?.
 - a. Sebutkan manfaatnya?.
 - b. Kenapa bermanfaat bagi anda?
8. Apakah dengan membaca koran dan media Media (surat kabar) itu membantu anda?
 - a. Dalam apa hal saja ?,.
 - b. Apa guna nya dalam kehidupan anda?
9. Apakah anda merasa di pengaruhi media?
10. Apa pengaruh dari membaca media/koran kepada anda?
 - a. Sebutkan?
 - b. Bentuknya?
 1. Terhadap sikap anda?
 2. Terhadap pandangan anda?.
 3. Keputusan anda?
 4. Seberapa besar pengaruh yang anda rasakan?
 5. Menurut anda bagaimana bisa media mempengaruhi anda?.
 6. Contohnya apa?
11. Apakah anda pernah mendengarkan berita tentang penyerangan Ahmadiyah di Cekuesik Banten pada tanggal 6 Februari 2012 yang lalu?

- a. Menurut anda, bagaimana pemberitaan media tentang Ahmadiyah di serang tersebut?
 - b. Menurut anda, apa perbedaan berita Kompas dan Republika tentang Ahmadiyah tersebut?
Apa persamaan pemberitaan Kompas dan Republika? Kompas:
 - c. Bagaimana menurut anda tentang gambar yang di tampilkan media tersebut?
 - d. Apa pengaruh pemberitan kedua media tentang penyerangan Ahmadiyah terhadap anda?..
 - e. Apa sikap anda terhadap penyerangan Ahmadiyah setelah membaca pemberitaan media tersebut? .Kenapa demikian?.
 - f. Menurut anda bagaimana seharusnya tentang hal tersebut?
12. Apakah anda mengetahui Penyerangan Gerja di Temanggung Jawa Tengah?
- a. Menurut anda, bagaimana pemberitaan Kompas? .dan Repulika tentang hal itu.? .
 - b. Bagaimana sikap anda tantang Penyerangan Gereja tersebut setelah membaca media tersebut ?.
 - c. Bagaimana menurut anda tampilan gambaran tersebut?
 - d. Apa persepsi anda setelah membaca media tersebut?
 - e. Bagaimana seharusnya tentang hal tersebut?.
13. Apakah anda mengetahui Penyerangan Syiah di Sampang Madura?..Darimana anda mengetahuinya?
- a. Menurut anda, bagaimana pemberitaan Kompas.dan Repulika.? .
 - b. Bagaimana sikap anda tantang Penyerangan Syiah di Sampang tersebut setelah membaca media tersebut ?
 - c. Bagaimana menurut anda tampilan gambar tersebut?
 - d. Apa persepsi anda setelah membaca media tersebut?
 - e. Bagaimana seharusnya tentang hal tersebut?
14. Apakah anda mengetahui tentang Verifikasi Partai Politik untuk pemilu 2014 mendatang?
- a. Menurut anda, bagaimana pemberitaan Kompas...dan Repulika tentang virifikasi partai-partai Islam. ?.
 - b. Menurut anda, bagaimana tampilan gambaran dimedia tersebut tersebut?
 - c. Bagaimana sikap anda tantang partai Islam setelah membaca media tersebut ?.
 - d. Bagaimana menurut anda tampilan gambar-gambar dimedia tersebut tersebut?
 - e. Apa persepsi anda setelah membaca media tersebut?
 - f. Bagaimana seharusnya tentang hal tersebut?
 - g. Media meberitakan media,.

Lis Responden

No	Nama
1	Abl Hamid
2	Waryin
3	Arifkasputra
4	Dewa Priyoga
5	Didik Hariyanto
6	Ana Juliana
7	Yudi setiadi

h.